



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020-2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2040

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
7. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Provinsi.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIP 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPIK; dan
- c. Pelaku Industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor Industri.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan Provinsi Jambi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. peran aktif masyarakat.

### BAB III

#### INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

##### Pasal 5

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terdiri dari :

- a. industri pangan;
- b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
- c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
- d. industri alat transportasi;
- e. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- f. industri hulu agro; dan
- g. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

##### Pasal 6

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan akses kesempatan kerja kepada masyarakat setempat pada Industri Unggulan Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

##### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan provinsi menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Industri Unggulan dalam RPIK.
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 8

RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020-2040.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
  - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan Industri Provinsi; dan
  - e. penutup.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Laporan pelaksanaan RPIP disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIP.
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIP Tahun 2020-2040.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Februari 2021  
GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

**ttd**

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd  
M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR: (2-27/2021)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2020-2040**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jambi mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 “Jambi TUNTAS Tahun 2021” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, Sejahtera”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jambi dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 adalah “Menjadikan Industri di Provinsi Jambi yang Mandiri, Berdaya Saing, Berdampak Perekonomian Nasional, berkelanjutan, Ramah Lingkungan, serta Mampu Mensejahterakan masyarakat”.

Misi dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi tersebut adalah:

- Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber daya Alam yang Dimiliki Sebagai Bahan Baku Industri;
- Mengembangkan Inovasi dan Teknologi Sehingga Berperan Sebagai Rantai Pasok Produk Nasional;
- Berperan Sebagai Pendorong Utama Ekonomi Nasional dan Gejolak Perekonomian Nasional;
- Berkomitmen Mendukung Industri Hijau (*Green Industri*) Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan
- Menciptakan dan Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat.

Penyusunan RPIP 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2020 – 2040 disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Provinsi Jambi.

Penyusunan RPIP 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keinginan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi;
- b. Meningkatkan peran sektor industri sehingga dapat menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- d. menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- e. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Jambi;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- g. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- h. dapat tercipta kemampuan daya saing yang tinggi melalui penguasaan teknologi dan manajemen, dalam akses pasar global maupun pasar dalam negeri, serta kemampuan memanfaatkan peluang bisnis yang ada;
- i. meningkatkan daya saing industri dan daya saing investasi;
- j. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, serta praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab;
- k. mengendalikan pemanfaatan ruang; dan

1. memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan Industri dan Kawasan Industri di Provinsi Jambi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Provinsi berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Bentuk kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar dapat dilakukan dengan strategi aliansi atau strategi naik kelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2040

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kondisi Daerah .....	7
2.1.1 Aspek Geografis .....	7
2.1.1.1 Administrasi Wilayah .....	7
2.1.1.2 Topografi .....	8
2.1.1.3 Jenis Tanah .....	9
2.1.1.4 Hidrologi .....	11
2.1.2 Karakteristik Lahan .....	12
2.1.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja .....	15
2.1.3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk .....	15
2.1.3.2 Tenaga Kerja .....	19
2.1.4 Aspek Infrastruktur .....	23
2.1.4.1 Infrastruktur Transportasi .....	23
2.1.4.2 Infrastruktur Energi Listrik .....	25
2.1.4.3 Infrastruktur Sumber Daya Air .....	26
2.1.5 Aspek Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri dan Ekspor Import .....	35
2.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri .....	35
2.1.5.2 Nilai Ekspor Sektor Industri .....	39
2.2 Sumber Daya Industri .....	41
2.3 Sarana dan Prasarana .....	43
2.3.1 Kawasan Peruntukan Industri .....	43
2.3.2 Jaringan Energi dan Kelistrikan .....	46
2.3.3 Pengelolaan Lingkungan dan Sanitasi .....	51
2.3.4 Jaringan Transportasi .....	52
2.3.4.1 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) .....	57
2.3.4.2 Sistem Jaringan Perkeretaapian .....	58
2.3.4.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut .....	58
2.3.4.4 Sistem Jaringan Transportasi Udara .....	59
2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .....	59
<b>BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH</b> .....	<b>74</b>
3.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi .....	74
3.1.1 Visi Pembangunan Industri .....	74

3.1.2	Misi Pembangunan Industri.....	75
3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Jambi.....	75
3.2.1	Tujuan Pembangunan Industri .....	75
3.2.2	Sasaran Pembangunan Industri .....	76
3.2.3	Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Pembangunan Industri Provinsi Jambi.....	81
3.2.4	Sasaran Penyerapan Investasi Pembangunan Industri Provinsi Jambi...	82
3.2.5	Sasaran Nilai Output Pembangunan Industri Provinsi Jambi.....	82
3.2.6	Sasaran Pembangunan Industri di Provinsi Jambi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.....	83

#### **BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI**

	.....	<b>85</b>
4.1	Strategi Pembangunan Industri .....	85
4.2	Program Pembangunan Industri .....	95
4.2.1	Penetapan dan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.....	95
4.2.2	Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.....	100
4.2.3	Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi .....	107
4.2.3.1	Pembentukan Kawasan Peruntukan Industri.....	109
4.2.3.2	Kawasan Industri .....	110
4.2.3.3	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah.....	124
4.3	Pembangunan Sumber Daya Industri.....	125
4.3.1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.....	125
4.3.2	Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam....	126
4.3.2.1	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri .....	128
4.3.2.2	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi .....	129
4.3.2.3	Penyediaan Sumber Pembiayaan .....	130
4.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	131
4.4.1	Pengelolaan Lingkungan.....	131
4.4.2	Lahan.....	132
4.4.3	Jaringan Energi dan Kelistrikan .....	133
4.4.4	Jaringan Telekomunikasi.....	133
4.4.5	Jaringan Sumber Daya Air .....	134
4.4.6	Jaringan Sanitasi .....	134
4.4.6.1	Jaringan Transportasi .....	135
4.4.6.2	Sistem Informasi Industri .....	136
4.4.6.3	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri .....	136
4.4.7	Pemberdayaan Industri.....	137

#### **BAB V PENUTUP..... 140**

## DAFTAR TABEL

2.1	Wilayah Administrasi Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	8
2.2	Klasifikasi Topografi di Provinsi Jambi .....	9
2.3	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi. ....	10
2.4	Luas Penutupan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	13
2.5	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Berdasarkan Fungsi Tahun 2017	15
2.6	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	16
2.7	Laju Pertumbuhan Provinsi Jambi Penduduk Tahun 2018 .....	16
2.8	Jumlah Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	17
2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	17
2.10	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (AMS) Tahun 2018.....	21
2.11	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2018.....	22
2.12	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi Tahun 2018 .....	22
2.13	Luas Wilayah dan Proyeksi Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi 2010-2033 .....	22
2.14	Kapasitas Pembangkit Eksisting .....	25
2.15	Debit Sungai Pada Berbagai Lokasi Pengambilan Air Sungai .....	30
2.16	Kebutuhan Air Untuk Ruma Tangga, Konsumsi dan Industri WS Batanghari s/d 2033 .....	30
2.17	Kebutuhan Air Rumah Tangga, Industri, Irigasi Berdasarkan Neraca Air 20 Tahun.....	33
2.18	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Indeks Perkembangan Tahun 2013 – 2018.....	36
2.19	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 .....	36
2.20	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi (Persen)2014-2018 ....	38
2.21	Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Asal Barang dari Provinsi Jambi Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2017 dan 2018.....	40
2.22	SDM Industri Hulu Agro-Karet.....	41
2.23	SDM Industri Hasil Hutan .....	42
2.24	SDM Industri Hulu Agro-Sawit .....	42
2.25	Industri Hulu Agro-Kelapa Dalam.....	42
2.26	Luasan Kawasan Peruntukan Industri.....	46
2.27	Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang Tahun 2011 – 2018 .....	47
2.28	Penjualan Tenaga Listrik dan Air Minum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2014 .....	47
2.29	Rencana Pembangunan Pembangkit .....	48
2.30	Rencana Pembangunan GI 150 kV.....	49
2.31	Rencana Pembangunan GI 275 kV dan 500 kV.....	50
2.32	Rencana Pembangunan Transmisi 150 kV .....	50
2.33	Rencana Pembangunan Transmisi 275 kV dan 500 kV .....	51
2.34	Data Industri Menengah dan Besar Provinsi Jambi.....	59
2.35	Rekap Data Industri Kecil Menengah Provinsi Jambi 2019.....	68
3.1	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jambi (Persen) 2014-2018 .....	77
3.2	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi	

Jambi .....	78
3.3 Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri di Provinsi Jambi.....	80
3.4 Kebutuhan Tenaga Kerja Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi	82
3.5 Kebutuhan Investasi Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi....	82
3.6 Nilai Output Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi .....	82
3.7 Nilai Perubahan PDRB Provinsi Jambi akibat Penerapan StrategiPembangunan Industri di Provinsi Jambi.....	83
4.1 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Sawit sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Sawit .....	87
4.2 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Karet sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Karet .....	87
4.3 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Kelapa sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Kelapa .....	88
4.4 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Sawit dan Kebutuhan Lahan .....	89
4.5 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Karet dan Kebutuhan Lahan .....	89
4.6 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Kelapa dan Kebutuhan Lahan .....	89
4.7 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Hasil Hutan sebagai Strategi Pembangunan Produk industri Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jambi	90
4.8 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Hasil Laut sebagai Strategi Pembangunan Produk industri Pengolahan Hasil laut Provinsi Jambi....	91
4.9 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Batu Bara sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Batu Bara .	91
4.10 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Kopi sebagai StrategiPembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Kopi	91
4.11 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Hasil Hutan dan Kebutuhan Lahan 2020 -2040 .....	92
4.12 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Hasil Laut 2020 -2040	92
4.13 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Kopi dan Batu Bara 2020- 2040 .....	93
4.14 Jenis Industri dan Tahapan Industri Unggulan Provinsi Jambi .....	96
4.15 Program Pengembangan Industri Pangan.....	101
4.16 Program Pengembangan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	102
4.17 Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka....	103
4.18 Program Pengembangan Industri Alat Transportasi.....	104
4.19 Program Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri.....	105
4.20 Program Pengembangan Industri Hulu Agro.....	106
4.21 Program Pengembangan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara....	106
4.22 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri .....	108
4.23 Lokasi, Luas dan Rekomendasi Pembangunan Industri KPI Provinsi Jambi	109
4.24 Roadmap Kawasan Industri Kemingking Provinsi Jambi .....	110
4.25 Proyeksi Kebutuhan Lahan untuk Aktivitas IKM .....	124
4.26 Proyeksi Pertumbuhan IKM di Provinsi Jambi.....	124
4.27 Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2020-2040 .....	125
4.28 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2040.....	126
4.29 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2020-2040 .....	127
4.30 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2020-2040	129
4.31 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan InovasiPeriode	



	020-2040 .....	130
4.32	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 – 2040 .....	131
4.33	Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Jambi Tahun 2020-2040 .....	132
4.34	Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020- 2040 .....	133
4.35	Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan TelekomunikasiJambi Tahun 2020-2040 .....	134
4.36	Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Jambi Tahun 2020-2040.....	135
4.37	Program Pembangunan InfrastrukturJaringan Transportasi di Jambi Tahun 2020-2040 .....	136
4.38	Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Jambi Tahun 2020-2040.....	136
4.39	Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Jambi Tahun 2020-2040 .....	137
4.40	Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020-2040 .....	137

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi Provinsi Jambi.....	8
2.2	Peta Kelerengan di Provinsi Jambi .....	9
2.3	Peta Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi .....	11
2.4	Kecenderungan Air Sungai Pada Musim Kemarau dan Musim Hujan	11
2.5	Peta Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi.....	14
2.6	Peta Kawasan Hutan di Provinsi Jambi.....	15
2.7	Tren Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971-2010.....	18
2.8	Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990 dan Tahun 2000	19
2.9	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2018	20
2.10	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan 2018.....	21
2.11	Ilustrasi Pola Perdagangan Barang dan Jasa Eksisting di Provinsi Jambi.....	23
2.12	Proyeksi Pola Perdagangan Barang dan Jasa di Provinsi Jambi....	24
2.13	Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Sebagai Hub Konektivitas Jalur Perdagangan Regional di Provinsi Jambi.....	24
2.14	Peta Kelistrikan Provinsi Jambi .....	26
2.15	Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Sedang Periode 2008-2013 .....	34
2.16	Peta Peruntukan Industri Provinsi Jambi 2017-2037.....	43
2.17	Perbandingan Produksi dan Distribusi Listrik Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.....	47
3.1.	Ilustrasi Perubahan Nilai PDRB Provinsi Jambi Setelah Konsep Pembangunan Industri RPIP Jambi 2020-2040 (Satuan Juta Rp)....	83
3.2.	Ilustrasi Perubahan Nilai Industri Pengolahan setelah Penerapan Strategy Pengembangan Industri RPIP Jambi 2020 – 2040 (Satuan Juta Rp) .....	84
3.3.	Ilustrasi Perbandingan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Pada Kondisi BAU Dan RPIP (Satuan Juta Rp) .....	84
4.1.	Peta Pengembangan Kawasan Industri Kemingking .....	111
4.2.	Peta Deliniasi Kawasan Industri Kemingking .....	111
4.3.	Peta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Jambi 2020–2040 .....	112
4.4.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Jambi.....	113
4.5.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat	114
4.6.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur	115
4.7.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Muaro Jambi .....	116
4.8.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sarolangun .....	117
4.9.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Merangin .....	118
4.10.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Batang Hari .....	119
4.11.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bungo.....	120
4.12.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kerinci.....	121
4.13.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Sungai Penuh.....	122
4.14.	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tebo .....	123
4.15.	Strategi dan Kebijakan Afirmatif IKM.....	139

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional ***“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”***

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Salah satu misi pembangunan industri kedepan adalah mendorong penyebaran industri keseluruh wilayah Indonesia dan secara bertahap menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan. Walaupun kontribusi pulau Sumatera dalam PDB sektor industri pengolahan non migas masih sangat dominan, namun demikian menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, secara perlahan sektor industri pengolahan non migas mulai bergeser ke luar Pulau Jawa. Disamping itu pertumbuhan industri non migas di luar Pulau Jawa mencapai 6,31%, lebih tinggi dari pertumbuhan Pulau Jawa sebesar 6,2% pada tahun 2017 (BPS, 2018). Hal ini disebabkan belum berkembangnya infrastruktur pendukung industri, untuk itu pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan pemeratan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia, agar kedepannya kontribusi wilayah di luar Pulau Jawa dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor industri akan terus ditingkatkan dari 28% pada tahun 2017 menjadi 45% pada tahun 2035.

Sesuai dengan amanat pada Pasal 14 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah negara RI melalui Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
- b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
- c. Pembangunan Kawasan Industri (KI).
- d. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pada perencanaan dan pembangunan industri maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah menyusun perencanaan ditingkat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dimana wilayah yang dirancang dengan pola basis pembangunan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur, industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat. Provinsi/kabupaten/kota yang tidak termasuk sebagai WPPI diberikan peranan sebagai pendukung WPPI. Peranannya dapat berupa: penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja, tempat penelitian dan pembangunan, penyedia sumber air bersih, dan lain-lain. Dalam kerangka persaingan yang ketat tersebut, Visi Pembangunan Industri Nasional Indonesia yaitu pada Tahun 2020 Indonesia telah menjadi sebuah Negara Industri Maju Baru. Untuk mewujudkan visi tersebut maka strategi yang dilakukan berupa peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pembangunan klaster industri, pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pembangunan industri yang berkelanjutan, persebaran industri, dan pengembangan industri kecil dan menengah. Implementasi terhadap strategi pembangunan industri nasional tersebut, pada Provinsi Jambi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang berbasiskan keunggulan komparatif daerah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tersebut berupa pembangunan kawasan industri dengan ciri-ciri: (1) diarahkan untuk pembangunan kota baru; (2) infrastruktur sudah terintegrasi dengan sistem logistik yang efektif dan efisien; (3) berorientasi pada pelayanan jasa; (4) adanya sarana pendidikan kekhususan industri; (5) adanya pusat inovasi; dan (6) memperhatikan aspek lingkungan.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perindustrian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk urusan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan daerah sesuai potensi dimiliki daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang oleh negara menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagai berikut: (a) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui kawasan industri; (b) pembangunan sumber daya manusia industri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang industri; (c) memfasilitasi penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan industri di pusat pertumbuhan industri; (d) mendorong pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan; (e) menjamin ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri dalam negeri melalui kerja sama antar daerah; (f) pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri; (g) memfasilitasi kerja sama penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri; (h) memfasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain ke industri kecil dan industri menengah; (i) memfasilitasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri; (j) memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri; (k) memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri; (l) menjamin tersedia infrastruktur industri; (m) membangun sistem informasi industri dan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala melalui sistem informasi industri yang terintegrasi; (n) melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah; (o) pemberian izin usaha industri; (p) mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah yang sebesar-besarnya dalam pemanfaatan sumber daya daerah dan/atau nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing industri; (q) memberikan fasilitas industri untuk mempercepat pembangunan industri; (r) mengawasi dan mengendalikan pembangunan industri; (s) memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Sehubungan tugas dan wewenang tersebut, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebutuhan (urgensi) perencanaan pembangunan industri Provinsi Jambi sangat diperlukan, agar setiap implementasi pembangunan industri sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada Pemerintah Daerah melalui UU No. 3 Tahun 2014. Selain itu, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Jambi, pelaku industri dan masyarakat dalam penyelenggaraan industri di Provinsi Jambi yang selama ini belum memiliki payung hukumnya. Atas dasar itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pembangunan industri di Provinsi Jambi.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPIP Provinsi Jambi, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
- j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10).

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi, berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dijelaskan secara singkat, mengenai latar belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dasar hukum dan sistematika penyusunan.

#### **BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai kondisi daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi serta infrastruktur, seperti jalan, Pelabuhan, Bandar Udara, air dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri dan sumberdaya industri yang dimiliki serta sarana dan prasarana pendukung dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.

### BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri provinsi, yang meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja disektor industri dan nilai investasi sektor industri.

### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Pada bagian ini menguraikan strategi pembangunan industri yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai, tujuan dan sasaran pembangunan industri provinsi melalui program-program indikatif. Disamping itu akan diuraikan juga mengenai program-program pembangunan industri di Provinsi Jambi dan penetapan produk unggulan, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri.

### BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini memberikan gambaran ringkasan dari uraian bab I sampai dengan bab IV, serta upaya dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi selama kurun waktu 20 tahun kedepan.



## **BAB II**

# **GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

### **2.1 Kondisi Daerah**

#### **2.1.1 Aspek Geografis**

Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lalu lintas letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang ke luar dan masuknya barang jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari Provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA). Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara  $0^{\circ} 74'' - 2^{\circ} 46,16''$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ} 12'' - 104^{\circ} 44''$  Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 km<sup>2</sup> yang terbagi atas luas daratan 50.160,05 km<sup>2</sup> serta dengan luas perairan sebesar 3.274,95 km<sup>2</sup>. Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi terletak pada Kabupaten Merangin dengan luas wilayah 7.679 km<sup>2</sup> atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 5.461 km<sup>2</sup> dan 6.184 km<sup>2</sup>.

Batas-batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### **2.1.1.1 Administrasi Wilayah**

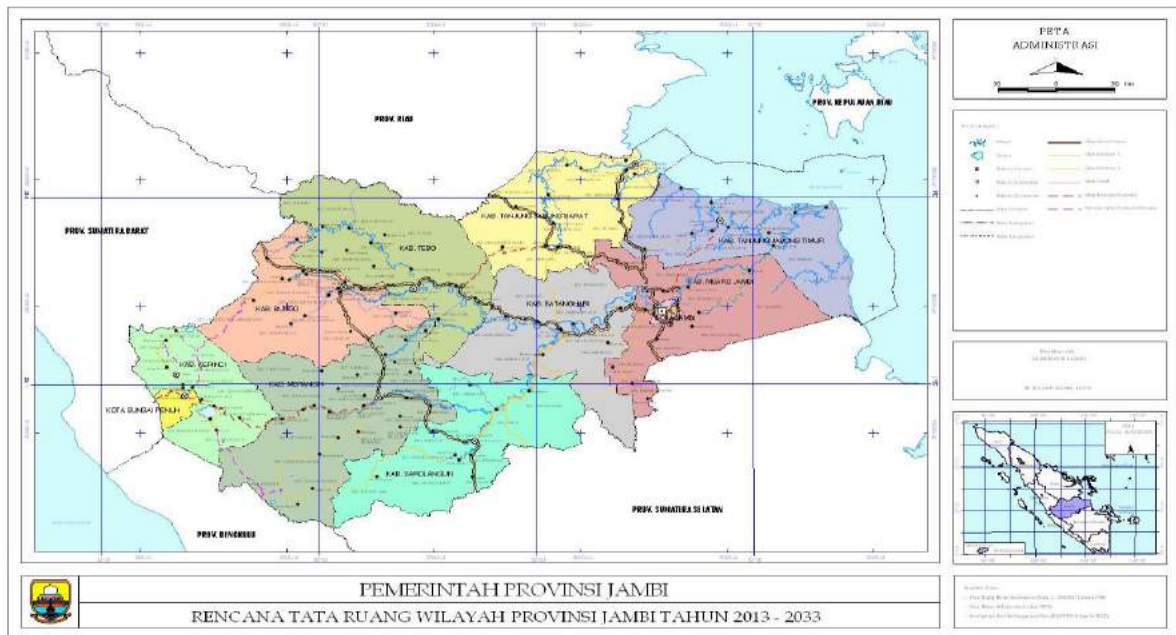
Provinsi Jambi pada Tahun 2018 terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan 141 kecamatan, 1.375 desa dan 187 kelurahan. Jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu sebanyak 287 desa/kelurahan. Secara rinci luas dan jumlah administrasi pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jambi Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase (%)
1	Kerinci	3.355,27	Siulak	16	287	6,69
2	Merangin	7.679,00	Bangko	24	215	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	Sarolangun	10	158	12,33
4	Batanghari	5.804,00	Muara Bulian	8	124	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	Sengeti	11	155	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	Muara Sabak	11	93	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	Kuala Tungkal	13	134	9,27
8	Tebo	6.461,00	Muara Tebo	12	112	12,88
9	Bungo	4.659,00	Muara Bungo	17	153	9,29
10	Kota Jambi	205,43	Jambi	11	62	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	Sungai Penuh	8	69	0,78
<b>Jumlah</b>		<b>53.435,92</b>		<b>141</b>	<b>1.562</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2019

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi**



### 2.1.1.2 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) dibagian timur sampai pada ketinggian diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), kearah barat kontur lahannya semakin tinggi dimana bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan

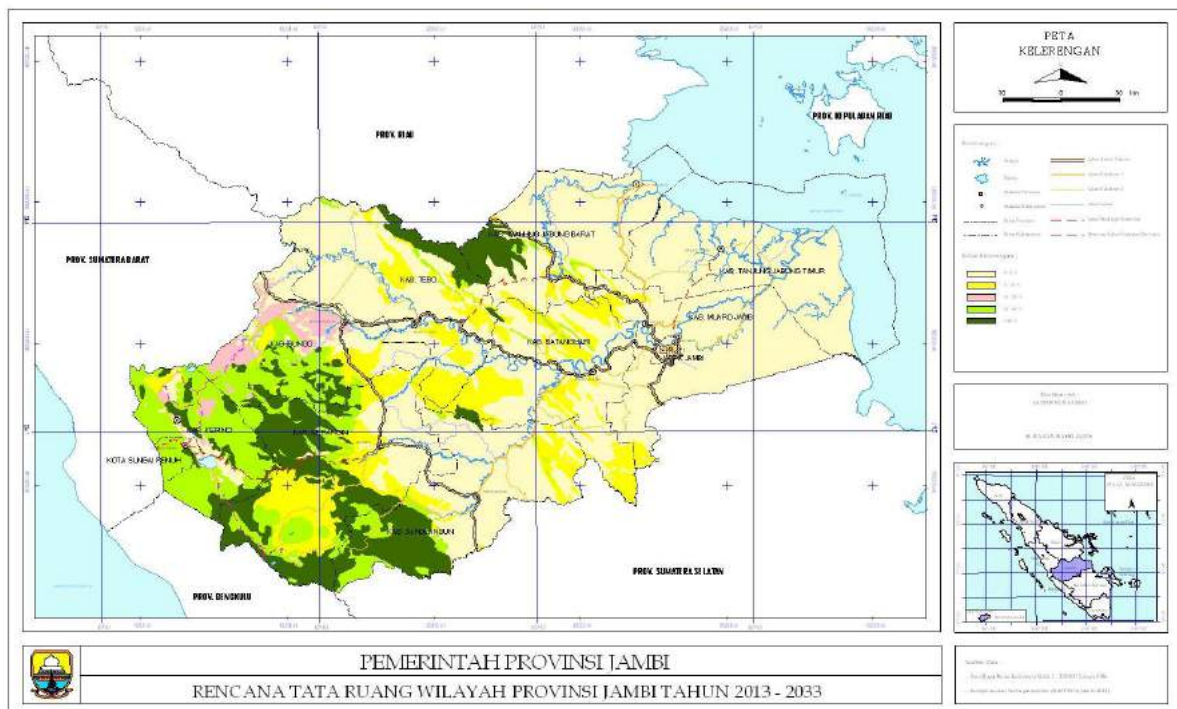
Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Nasional Kerinci Seblat. Adapun klasifikasi topografi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 Klasifikasi Topografi di Provinsi Jambi**

Topografi (meter dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0-100)	3.282.315,00	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang hari dan sebagian Sarolangun
Dataran Sedang (100-500)	832.826,26	17	Tebo, Sebagian Batanghari, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sebagian Tanjung Jabung Barat
Dataran Tinggi (>500)	783.836,48	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, Sebagian Merangin, Sebagian Sarolangun dan Sebagian Bungo
Jumlah Luas Daratan	4.898.978,00	100	

Sumber : Bappeda Prov. Jambi 2010

**Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Provinsi Jambi**



### 2.1.1.3 Jenis Tanah

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini di dominasi oleh tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya

dukung lahan terhadap pengembangan wilayah rendah dibanding wilayah tengah dan barat sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya.

Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburan relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan.

Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak ditemui jenis tanah alluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas. Beberapa jenis tanah yang ada di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

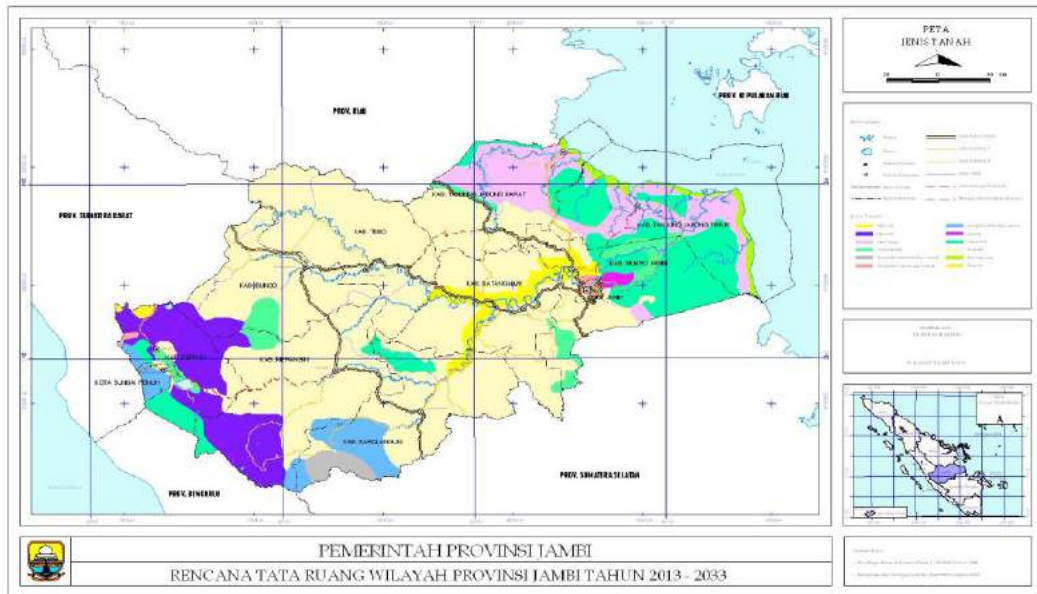
**Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi.**

No	Jenis Tanah	Jumlah	%
1	Podzolik Merah Kuning	1.956.162	39,93
2	Latosol	914.639	18,67
3	Gley Humus Rendah	526.150	10,74
4	Andosol	340.479	6,95
5	Organosol	296.388	6,05
6	Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik	264.545	5,40
7	Podzolik Merah Kuning	226.823	4,63
8	Alluvial	191.550	3,91
9	Hidromorfik Kelabu	80.343	1,64
10	Latosol Andosol	57.808	1,18
11	Rawa Laut	41.151	0,84
12	Komplek Latosol + Litosol	2.449	0,05
<b>Jumlah</b>		<b>48.989,78</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : RTRW Provinsi Jambi*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang dominan di wilayah Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas 1.956.162 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan jenis tanah yang terendah adalah komplek latosol yaitu 2.449 hektar atau 0,05%.

**Gambar 2.3 Peta Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi**



#### 2.1.1.4 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

**Gambar 2.4 Kecenderungan Air Sungai Pada Musim Kemarau dan Musim Hujan**



Musim Kemarau

Musim Hujan

Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasi dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang wilayah Sungai Batanghari baik sebagai tempat tinggal maupun

sebagai tempat usaha tani. Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya. Sementara itu DAS Batanghari dibagi menjadi beberapa sub DAS yaitu :

- a. Sub DAS Batang Tembesi
- b. Sub DAS Jujuhan
- c. Sub DAS Batang Tebo
- d. Sub DAS Tungkal dan Mendahara
- e. Sub DAS Air Hitam
- f. Sub DAS Air Dikit
- g. Sub DAS Banyulincir
- h. Sub DAS lainnya.

### **2.1.2 Karakteristik Lahan**

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi dapat disimpulkan bahwa kondisi karakter lahan di Provinsi Jambi ini adalah sebagai berikut :

- a) Pertanian Lahan Basah (LB), luasnya 684.060 ha atau 13,96% dari total luas daratan Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3% dan ketinggian 0-10 mdpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 ha atau 56,08% dari luas total daratan Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12% dan ketinggian 10-100 mdpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).
- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 ha atau 18,44% dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-4-% dan ketinggian 100-500 mdpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kabupaten Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 11,53% merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 mdpl merupakan daerah psgunungan dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi. Jika dibandingkan dengan data luas sawah pada BPS Tahun 2010-2015 dengan data perhitungan dan interpretasi citra satelit maka dilihat bahwa luas lahan sawah pada masing-masing kabupaten/kota secara umum mengalami penurunan. Perbedaan luas yang cukup signifikan dapat dilihat di Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten

Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Hal ini diperkirakan akibat perubahan penggunaan lahan ke lahan non pertanian seperti permukiman, perkebunan dan industri lainnya. Sementara itu berdasarkan kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi menjadi tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

### Penggunaan Lahan

Pada Tahun 2018 selain kawasan hutan yang mencapai porsi 26,37 %, penggunaan lahan non hutan di Provinsi Jambi berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia masih didominasi oleh lahan perkebunan dengan kontribusi sebesar 20,35 %, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 16,37% dari total luas penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

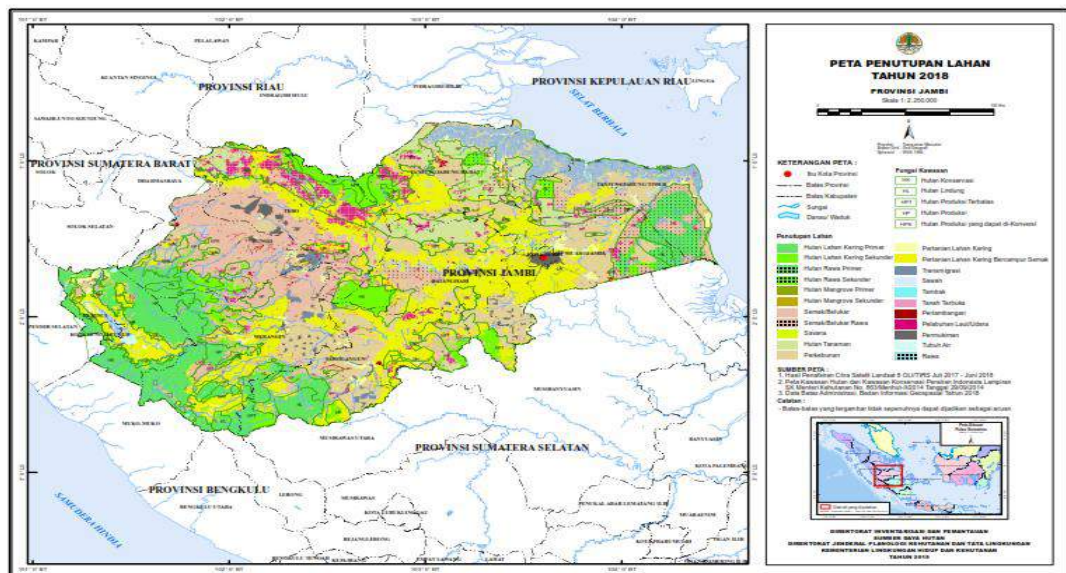
**Tabel 2.4 Luas Penutupan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2018**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jmlh			
		HK	HL	HPT	HP	Jmlh					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>A. Hutan</b>										
1	Hutan lahan kering primer	357,9	83,0	35,1	69,3	545,3	-	545,3	26,0	571,3	
2	Hutan lahan kering sekunder	92,7	14,3	65,3	83,0	255,3	0,0	255,3	22,6	277,9	
3	Hutan rawa primer	97,0	14,2	11,5	0,3	123,1	-	123,1	0,6	123,7	
4	Hutan rawa sekunder	2,1	18,9	12,1	13,8	46,9	-	46,9	2,8	49,7	
5	Hutan mangrove primer	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,3	
6	Hutan mangrove sekunder	2,1	-	-	-	2,1	-	2,1	4,7	6,8	
7	Hutan tanaman *	-	0,1	4,3	230,2	234,6	0,1	234,7	9,8	244,5	
	<b>Jumlah Hutan</b>	<b>551,9</b>	<b>130,6</b>	<b>128,3</b>	<b>396,6</b>	<b>1.207,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1.207,4</b>	<b>66,8</b>	<b>1.274,2</b>	
	<b>B. Non Hutan</b>										
8	Semak/Belukar	30,3	9,3	26,3	155,5	221,4	0,8	222,2	523,3	745,5	
9	Belukar rawa	54,7	12,1	14,3	32,2	113,3	0,2	113,5	113,6	227,1	
10	Savana	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	
11	Perkebunan	4,9	9,0	23,2	74,8	111,9	8,6	120,5	865,0	985,5	
12	Pertanian lahan kering	3,9	2,2	0,7	6,4	13,2	-	13,2	85,7	98,9	
13	Pertanian lahan kering campur semak	32,6	13,7	48,5	181,9	276,6	1,7	278,3	861,0	1.139,3	
14	Transmigrasi	0,1	-	-	0,0	0,1	-	0,1	26,9	26,9	
15	Sawah	0,0	-	0,0	0,2	0,2	-	0,2	16,8	17,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jmlh		
		HK	HL	HPT	HP	Jmlh				
16	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
17	Tanah terbuka	6,7	2,5	17,0	114,3	140,5	0,0	140,5	59,0	199,5
18	Pertambangan	0,0	-	0,0	1,6	1,7	-	1,7	13,9	15,6
19	Permukiman	0,0	-	0,0	0,3	0,3	-	0,3	86,6	87,0
20	Rawa	0,3	0,2	-	0,0	0,5	-	0,5	15,0	15,5
21	Pelabuhan Udara/Laut	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
<b>Jumlah Non Hutan</b>		<b>133,6</b>	<b>49,0</b>	<b>130,0</b>	<b>567,2</b>	<b>879,8</b>	<b>11,3</b>	<b>891,1</b>	<b>2.667,1</b>	<b>3.558,2</b>
<b>Total</b>		<b>685,5</b>	<b>179,6</b>	<b>258,3</b>	<b>963,8</b>	<b>2.087,1</b>	<b>11,4</b>	<b>2.098,5</b>	<b>2.733,8</b>	<b>4.832,3</b>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2019

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi



Sementara itu data eksisting Tahun 1993-2009 penggunaan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2015 diluar fungsi kawasan hutan didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi penggunaan sebesar 26,2 %, diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22 %. Melihat perkembangan guna lahan tahun 1993 hingga tahun 2009 dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan untuk hutan mengalami penurunan, sedangkan untuk perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan terutama perkebunan sawit dan kulit manis. Khusus untuk perkebunan karet dapat tergambar bahwa sementara untuk pemanfaatan sektor perkebunan karet mengalami masa gemilang pada tahun 2002 yakni sebesar 32 %. Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsi didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional dimana terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26. Tahun 2008 ditetapkan



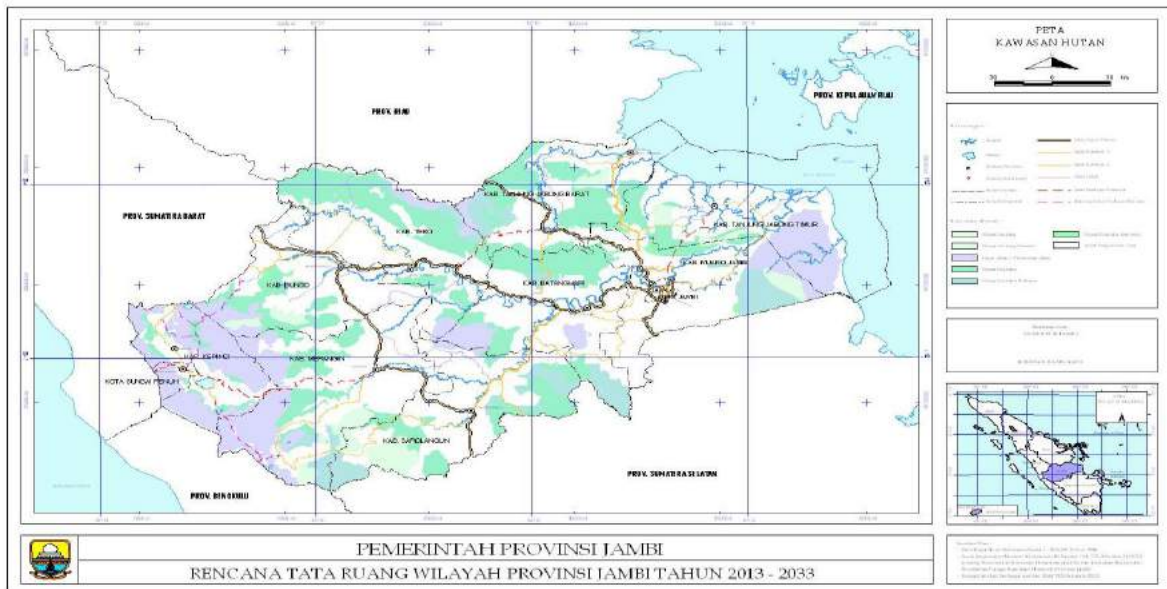
sebagai Kawasan Strategis Nasional. Rincian luas kawasan hutan dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Berdasarkan Fungsi Tahun 2017**

No	Jenis Hutan	Luas Hutan (ha)
1	Hutan Produksi	973.920
2	Hutan Lindung	182.302
3	Hutan Wisata dan Hutan Wisata	685.471
4	Hutan di Konversi	11.416

Sumber : Dinas Kehutanan Tahun 2017

**Gambar 2.6 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Jambi**



## 2.1.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja

### 2.1.3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik yang dapat diamati adalah jumlah penduduk 15-24 tahun yang lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk yang lebih muda maupun penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun. Ini menggambarkan bahwa pada Tahun 1990-an laju pertumbuhan penduduk relatif rendah. Namun pada akhir tahun 1990 hingga kini laju pertumbuhan penduduk tinggi sehingga penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia dewasa (15-24 tahun). Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan dengan penduduk usia di atasnya.

Jumlah penduduk di Provinsi Jambi mencapai 3,34 juta jiwa pada tahun 2015. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2018 sudah mencapai 3,57 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk (SP-2010) selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,56%, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990-2000 yang hanya sebesar 1,77%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,96% dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,41%.

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Kerinci	3.355,27	237.791	70,87
2	Merangin	7.679,00	383.480	49,94
3	Sarolangun	6.184,00	295.985	47,86
4	Batanghari	5.804,00	269.966	46,51
5	Muaro Jambi	5.326,00	432.305	81,17
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	218.413	40,11
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	328.343	70,61
8	Tebo	6.461,00	348.760	53,98
9	Bungo	4.659,00	367.182	78,81
10	Kota Jambi	205,43	598.103	2911,47
11	Kota Sungai Penuh	391,5	89.944	229,74
<b>Jumlah</b>		<b>50.160,05</b>	<b>3.402.052</b>	<b>67,82</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Provinsi Jambi Penduduk Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribuan)		Kepadatan Penduduk	
	2010	2018	2000-2010	2010-2018
Kerinci	229.495	237.791	(21,99)	3,31
Merangin	333.206	383.480	31,75	14,50
Sarolangun	246.245	295.985	39,04	19,53
Batang Hari	241.334	269.966	27,21	11,33
Muaro Jambi	342.952	432.305	47,48	25,27
Tanjung Jabung Timur	205.272	218.413	7,48	6,08
Tanjung Jabung Barat	278.741	328.343	35,52	17,19
Tebo	297.735	348.760	34,68	16,53
Bungo	303.135	367.182	40,36	20,45
Kota Jambi	531.857	598.103	28,02	11,90
Kota Sungai Penuh	82.293	89.944	100,00	8,87

Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribu)		Kepadatan Penduduk	
	2010	2018	2000-2010	2010-2018
<b>Jambi</b>	<b>3.092.265</b>	<b>3.570.272</b>	<b>29,10</b>	<b>14,89</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Tabel 2.8 Jumlah Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin	
	2010	2018
Kerinci	99,33	99,60
Merangin	105,18	104,83
Sarolangun	104,16	103,77
Batang Hari	104,45	104,09
Muaro Jambi	107,19	106,85
Tanjung Jabung Timur	105,08	105,48
Tanjung Jabung Barat	107,73	107,42
Tebo	106,51	106,30
Bungo	104,84	104,55
Kota Jambi	101,23	101,02
Kota Sungai Penuh	98,05	98,44
<b>Jambi</b>	<b>104,25</b>	<b>104,14</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

Dengan luas wilayah sekitar 50.160 km<sup>2</sup> (daratan), setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 67,82 orang pada tahun 2018. Angka ini selalu meningkat karena tingginya laju pertumbuhan penduduk sementara luas wilayah tidak mengalami penambahan. Pola penduduk jika dilihat dari jenis kelamin secara umum sama yaitu jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari angka seks rasio yang nilainya lebih dari 100. Tahun 2018 seks rasio sebesar 104,14 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

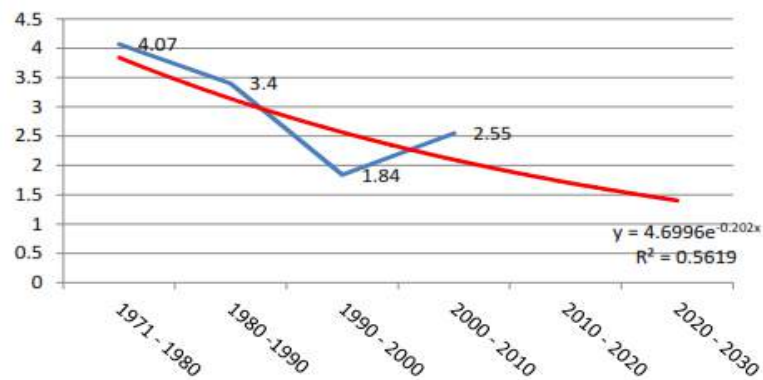
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Total
0 – 4	164.066	157.442	321.508
5 – 9	162.395	157.155	319.550
10 – 14	163.092	158.680	321.772
15 – 19	156.951	153.118	310.069
20 – 24	153.718	148.301	302.019
25 – 29	157.817	150.511	308.328
30 – 34	154.061	146.702	300.763
35 – 39	148.928	145.348	294.276
40 – 44	139.180	130.877	270.057
45 – 49	117.263	109.342	226.605
50 – 54	95.306	89.635	184.941

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Total
55 – 59	76.327	71.670	147.997
60 – 64	56.404	51.507	107.911
65 -69	35.409	32.725	68.134
70 -74	20.510	21.414	41.924
75 +	19.954	24.464	44.418
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.821.381</b>	<b>1.748.891</b>	<b>3.570.272</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2018

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi tiap dasawarsa menunjukkan kondisi fluktuatif dengan trend cenderung menurun seperti pada Gambar 2.7 dan pada tahun 2030 diperkirakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi tidak akan melebihi angka 1,5% per tahun sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

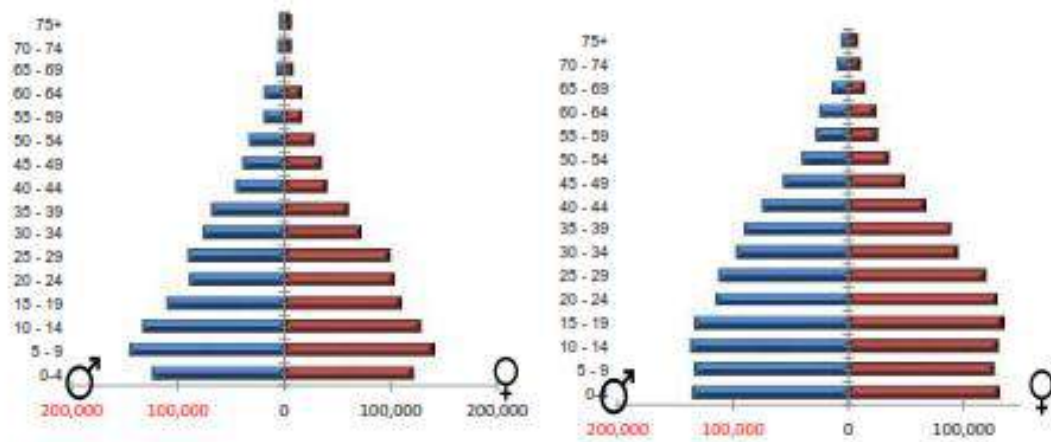
**Gambar 2.7 Tren Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971-2010**



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi cenderung menurun dari sekitar 4,07% pada periode 1971–1980 menjadi sekitar 1,48% pada periode 2020-2030, sehingga diproyeksikan pada akhir 2030 jumlah penduduk Jambi menjadi sekitar 4,63 juta orang atau bertambah sekitar 1,54 juta orang dibanding pada tahun 2010. Semua pertumbuhan mengindikasikan peningkatan demand terhadap infrastruktur dasar termasuk kegiatan produksi, pendidikan dan kesehatan. Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama tiga dekade yakni tahun 1990, 2000 dan 2010. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (10-14 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun)

**Gambar 2.8 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1990 dan Tahun 2000**



*Sumber : Analisis Tahun 2018*

Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida Penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap infrastruktur pendidikan dengan kualitas yang baik. Proyeksi penduduk pada tahun 2033 menunjukkan gejala bahwa kelompok usia produktif akan berjumlah cukup signifikan. Hal ini menyiratkan kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi kelompok angkatan kerja baru. Di sisi lain kelompok usia produktif 25 – 29 tahun masih menjadi kelompok angkatan kerja dominan dan belum memasuki usia pensiun atau dengan kata lain kelompok ini belum tergantikan.

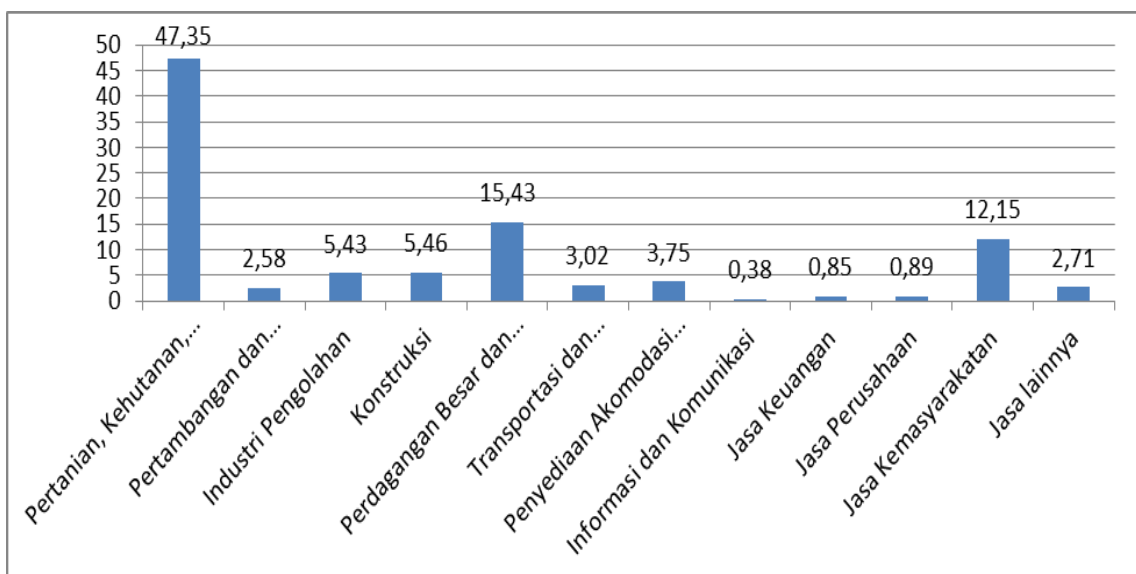
### **2.1.3.2 Tenaga Kerja**

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi keadaan Agustus tahun 2018 mencapai 1.721.362 orang yang terdiri dari 1.550.403 orang bekerja dan 66.445 orang pencari kerja/pengangguran. Pada keadaan Agustus 2018, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk di Jambi, yang menjadikan sektor ini menempati peringkat pertama dengan 47,35 %. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan berada pada peringkat kedua dan ketiga dengan besar masing-masing 15,43 % dan 12,15 %. Memang pertanian adalah lapangan pekerjaan yang mayoritas menjadi mata pencaharian penduduk Provinsi Jambi, namun demikian

proporsinya terus menurun. Penurunan distribusi tenaga kerja juga terjadi di sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, jasa kemasyarakatan dan jasa lainnya.

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang mengalami kenaikan dengan %tase tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja banyak yang masuk ke sektor ini, namun memang belum bisa dijelaskan apakah tenaga kerja ini masuk sebagai karyawan/pegawai atau sebagai yang berusaha di sektor perdagangan. Seperti diketahui sektor perdagangan merupakan sektor yang banyak dilakukan sebagai langkah awal untuk membuka usaha.

**Gambar 2.9 Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2018**



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2019

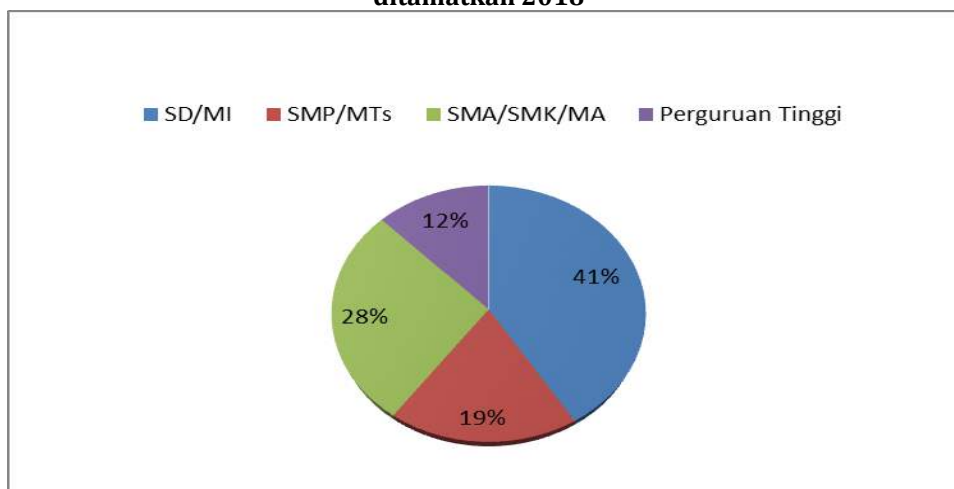
Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Selama periode 2013-2016 UMP Provinsi Jambi selalu meningkat hingga pada tahun 2016 sebesar 1,7 juta rupiah dan untuk Tahun 2020 telah ditetapkan UMP Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp. 2.631.162.-

**Tabel 2.10 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (AMS) Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	78.690	11.107	35.212	125.009
Merangin	102.100	21.685	62.405	186.190
Sarolangun	75.862	18.980	40.656	135.498
Batang Hari	59.643	21.207	41.571	122.421
Muaro Jambi	91.089	39.416	63.167	193.672
Tanjung Jabung Timur	78.431	7.430	28.552	114.413
Tanjung Jabung Barat	100.688	12.506	60.811	174.005
Tebo	119.261	16.560	38.919	174.740
Bungo	90.705	24.947	56.705	172.357
Kota Jambi	9.138	49.274	219.390	277.802
Kota Sungai Penuh	9.442	7.198	28.615	45.255
Provinsi Jambi	815.049	230.310	676.003	1.721.362

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Gambar 2.10 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan 2018**



Sumber : Data olahan

Jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar diatas, penduduk yang berumur diatas 15 tahun tamatan SD yang bekerja sebesar 41%. SMP/MTS sebesar 19%, SMA/SMK sebesar 28% dan Perguruan Tinggi atau sederajat sebesar 12%

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2018**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	706.906
SMP Umum + SMP Kejuruan	326.994
SMA Umum + SMA Kejuruan	476.339
Perguruan Tinggi	211.123
Jumlah	1.550.403

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Tabel 2.12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi Tahun 2018**

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah Total
	Pertanian	Industri	Jasa	
Pekerja bebas di Pertanian	191.158	29.571	143.716	364.445
Pekerja bebas di nonpertanian	184.029	9.101	67.137	260.267
Pekerja keluarga/tak dibayar	33.480	16.326	29.748	79.554
Berusaha sendiri	171.931	135.521	372.591	680.043
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	71.961	0	0	71.961
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	0	33.478	13.066	46.544
Buruh/Karyawan/Pegawai	162.490	6.313	49.745	218.548
<b>Jumlah</b>	<b>815.049</b>	<b>230.310</b>	<b>676.003</b>	<b>1.721.362</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Tabel 2.13 Luas Wilayah dan Proyeksi Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi 2010-2033**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kec.	Kepadatan			
				2010	(Jiwa/ Km <sup>2</sup> )	2033	(Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1	Kerinci	3.334,99	16	229.495	69	370.000	111
2	Merangin	7.508,23	24	333.206	44	400.000	53
3	Sarolangun	5.948,73	10	246.245	41	365.000	61
4	Bungo	4.573,16	8	303.135	66	455.000	99
5	Tebo	6.205,81	11	297.735	48	375.000	60
6	Batanghari	5.536,86	11	241.334	44	345.000	62
7	Muaro Jambi	5.321,67	13	342.952	64	705.000	132
8	Tanjung Jabung Barat	4.990,95	12	278.741	56	460.000	92
9	Tanjung Jabung Timur	4.943,36	17	205.272	42	285.000	58
10	Kota Sungai Penuh	353,76	11	82.293	233	125.000	353
11	Kota Jambi	172,26	8	531.857	3.088	615.000	3.570



No	Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kec.	Kepadatan			
				2010	(Jiwa/ Km <sup>2</sup> )	2033	(Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
	Jumlah	48.889,78	141,00	3.092.265,0 0	63,25	4.500.000,00	92,04

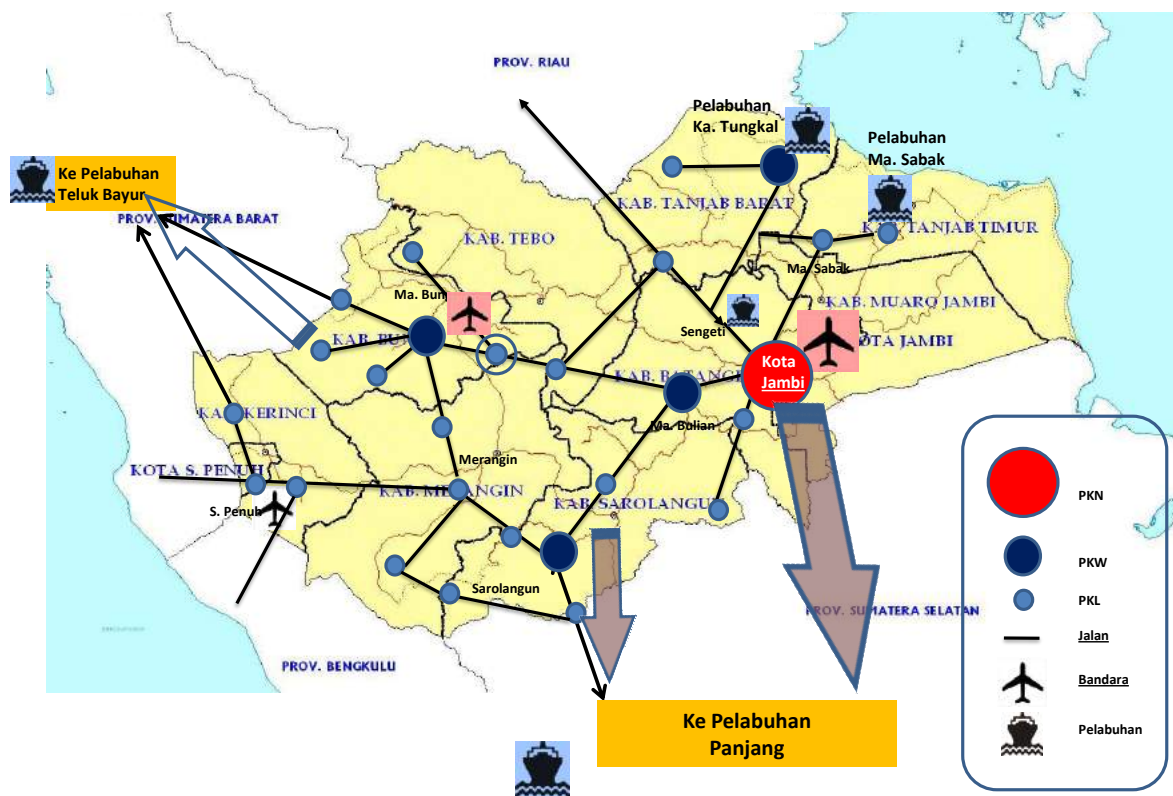
Sumber : Analisis Tahun 2017

## 2.1.4 Aspek Infrastruktur

### 2.1.4.1 Infrastruktur Transportasi

Transportasi yang ada di Provinsi Jambi terkait jalur transportasi perdagangan barang dan jasa hasil industri ke jalur-jalur outlet dan inlet yang ada di Provinsi Jambi seperti yang ada di gambar berikut :

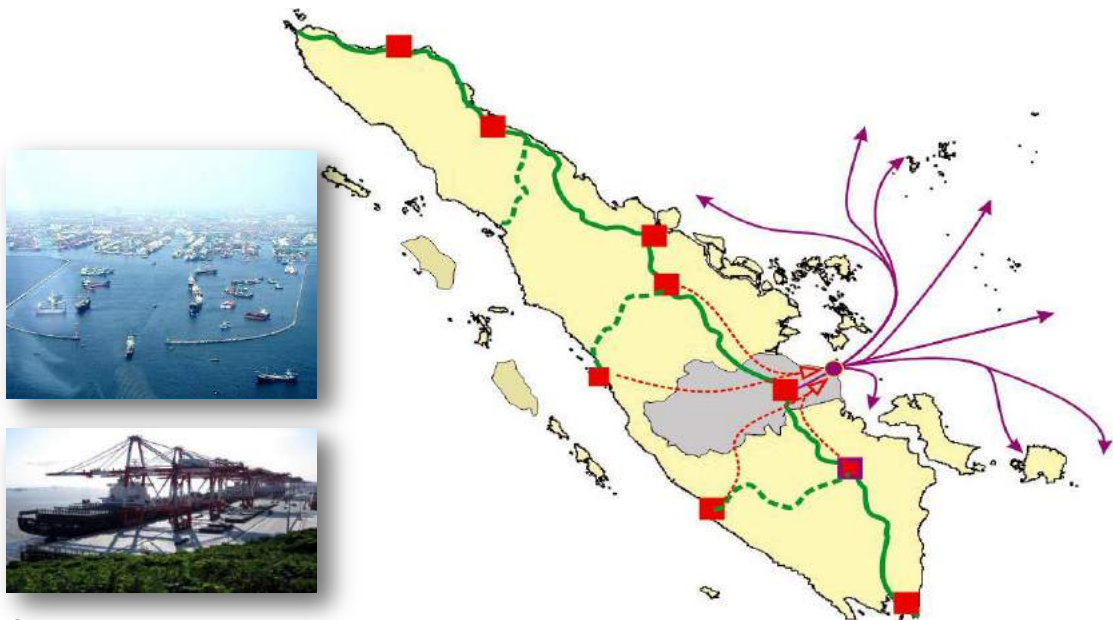
Gambar 2.11 Ilustrasi Pola Perdagangan Barang dan Jasa Eksisting di Provinsi Jambi



**Gambar 2.12 Proyeksi Pola Perdagangan Barang dan Jasa di Provinsi Jambi**



**Gambar 2.13 Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Sebagai Hub Konektivitas Jalur Perdagangan Regional di Provinsi Jambi**



Dari gambar tersebut jalur transportasi Multimoda di Provinsi Jambi untuk barang akan bermuara pada 3 buah pelabuhan utama di Provinsi Jambi yaitu pelabuhan Talang Duku

dan Pelabuhan Muara Sabak serta Pelabuhan Tungkal, dimana saat ini juga akan dikembangkan Pelabuhan Ujung Jabung yang merupakan bagian dari integrasi kawasan Ujung Jabung Industrial Estate yang diharapkan akan menjadi Hub Regional dan Internasional bagi Provinsi Jambi dan provinsi di sekitarnya. Disamping itu, salah satu layanan yang harus ada pada Kawasan Industri adalah Jaringan Jalan. Untuk itu diperlukan aksesibilitas jalan menuju suatu kawasan.

Disamping transportasi darat juga tersedia transportasi laut yaitu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua wilayah ini langsung berbatasan dengan laut yang lebih dekat hubungannya dengan Provinsi Kepulauan Seribu tepat Batam dan Singapura. Untuk pemenuhan ekspor impor barang dilakukan di Pelabuhan Talang Duku, sedangkan untuk penumpang diarahkan ke Pelabuhan Kuala Tungkal.

Untuk transportasi udara Provinsi Jambi memiliki satu Bandara yang bernama Sultan Thaha yang memiliki penerbangan 12 kali setiap harinya dengan maskapai penerbangan Garuda, Batik Air, Sriwijaya, Lion Air, Wings Air, City Link.

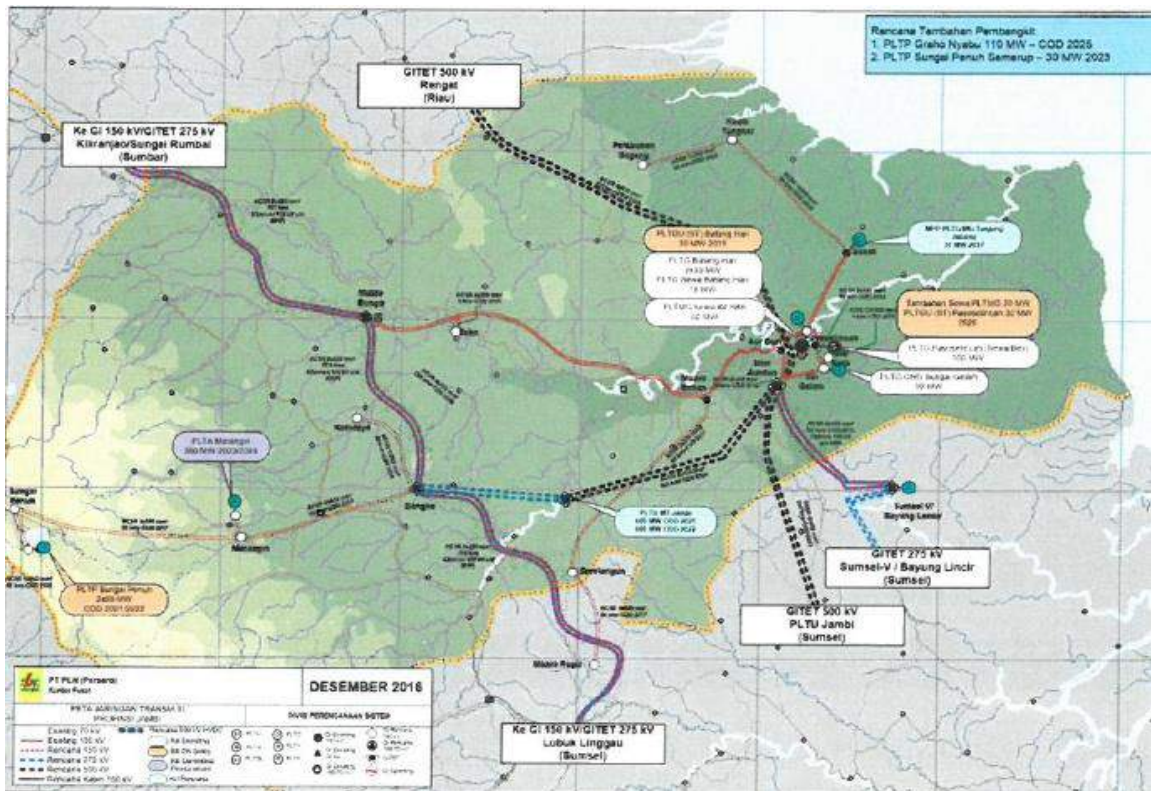
#### 2.1.4.2 Infrastruktur Energi Listrik

Provinsi Jambi saat ini dipasok dari Sistem Interkoneksi Sumbagselteng melalui saluran transmisi 150 kV dan sebagian sistem isolated. Kapasitas pembangkit eksisting di Provinsi Jambi ditunjukkan pada table berikut :

**Tabel 2.14 Kapasitas Pembangkit Eksisting**

No.	Pemilik	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Total Kapasitas (mW)	Daya Mampu Netto (mW)
1	PLN	PLTG	GAS	160,0	153,3
2	PLN	PLTMG	GAS	179,0	164,3
3	SEWA	PLTMG	GAS	95,0	92,0
4	SEWA	PLTD	HSD	20,0	20,0
Total				454,0	439,6

**Gambar 2.14** Peta Kelistrikan Provinsi Jambi



Sumber : RUPTL PLN 2017-2026

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi dengan memperhatikan potensi sumber energi primer setempat

### 2.1.4.3 Infrastruktur Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis provinsi sedangkan cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas provinsi.

Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Jambi meliputi:

1. Wilayah sungai lintas provinsi dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi, dimana berdasarkan RTRWN adalah Wilayah Sungai Batanghari (I-IV/A/1) merupakan lintas Provinsi Jambi Sumatera Barat dan Wilayah Sungai Teramang Muar yang merupakan Lintas Provinsi Jambi-Bengkulu (I-IV/A/1).
2. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 juga ditetapkan Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, Lintas Provinsi Jambi-Sumsel-

Bengkulu-Lampung; dan Wilayah Sungai Pengabuan-Lagan Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat-Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Jambi meliputi:**

- a. CAT Bangko-Sarolangun meliputi: Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun
- b. CAT Jambi-Dumai meliputi: Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. CAT Kayuaro-Padangaro di Kabupaten Kerinci
- d. CAT Muara Bungo meliputi: Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
- e. CAT Muara Tembesi berada di Kabupaten Batanghari
- f. CAT Sungai Penuh berada di Kota Sungai Penuh

**Jaringan Irigasi**

Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Nasional meliputi: DI Batang hari meliputi Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo serta DI Sei Siulak Deras dan DI Sei Batang Sangir di Kabupaten Kerinci.

Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi meliputi:

- a. DI Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci seluas 1,200 ha
- b. DI Batang Limun di Kabupaten Sarolangun seluas 2,500 ha
- c. DI Sei Batang Uleh di Kabupaten Bungo seluas 2.100 ha
- d. DI Sei Suban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1,200 ha
- e. DI Mendahara/Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Jaringan Air**

Pengembangan Jaringan Air di wilayah Provinsi Jambi diantaranya:

- a. pengembangan dan pengolahan sumber air, meliputi: Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan, Danau Kerinci dan Danau Pauh
- b. pengembangan dan pengolahan sumber mata air meliputi seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi

**Sistem Pengendalian Daya Rusak Air**

- a. pembangunan bendungan di Kabupaten Kerinci;
- b. pembangunan embung meliputi:
  - 1) embung Batang Asai dan embung Batang Tembesi berada di Kabupaten Sarolangun;
  - 2) embung Batang Bungo di Kabupaten Bungo;
  - 3) embung Pamenang di Kabupaten Merangin;
  - 4) embung Sumai di Kabupaten Tebo;
  - 5) embung Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan

- 6) embung Sadu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. pembangunan tanggul pada sungai-sungai di wilayah Provinsi Jambi;
- d. pengembangan kolam retensi di Kota Jambi;
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem pengendalian
- f. daya rusak air diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Isu Strategis Terkait Kondisi Penyediaan Air Baku dari WS Batanghari**

##### a. Degradasi DAS

Berdasarkan pengamatan muka air sungai Batanghari terlihat bahwa terjadi degradasi DAS di hulu, pada musim kemarau sungai tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai transportasi air karena muka air yang surut, sedimentasi tinggi pada muara dan dasar sungai, sehingga beberapa kapal berukuran besar tidak dapat masuk sungai dan merapat di pelabuhan. Hal tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi setempat.

##### b. Penurunan Pelayanan/Kinerja Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa

Dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir telah terjadi penurunan fungsi pelayanan/kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi dan rawa Jambi yang berdampak kepada menurunnya produktifitas areal irigasi dan rawa di provinsi Jambi, sehingga berdampak kepada penurunan produksi padi pada khususnya dan tanaman pangan pada umumnya

##### c. Meningkatnya Frekuensi Banjir

Dalam kurun waktu + 5 tahun terakhir frekuensi banjir pada WS Batanghari meningkat disertai dengan bertambahnya luas genangan banjir. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya perubahan tutupan lahan akibat alih fungsi lahan.

##### d. Semakin Menurunnya Kualitas Air Sungai

Sungai yang ada di WS Batanghari sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk berbagai kepentingan, namun kualitasnya semakin menurun akibat adanya buangan limbah rumah tangga, industri dan lainnya.

##### e. Limbah Pertambangan

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) pertambangan yang membuang limbah berbahaya mengandung unsur merkuri ke sungai, sehingga dapat mencemari air sungai maupun air tanah disekitar tepi sungai.

#### **Arahan Kebijakan Sumber Daya Air Provinsi**

- a. pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan

- supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
- b. upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
  - c. pola hubungan hulu–hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan;
  - d. Pembangunan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan;
  - e. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah diangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan
  - f. airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap dengan prioritas areal irigasi di wilayah lumbung padi;
  - g. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya;
  - h. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
  - i. pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan.

### **Debit Sungai**

Besarnya debit sungai yang tersedia pada DAS Batanghari Selanjutnya berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, pada DAS Batanghari hulu hanya terdapat 3 (tiga) buah stasiun pengamat/pengukur debit sungai. Jumlah debit Sungai Batanghari sebesar 35.953,18 m<sup>3</sup>/dt (8.3 milyar m<sup>3</sup>/tahun), sedangkan kebutuhan air hanya sebesar 4.668,96 m<sup>3</sup>/dt untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai sektor.

Meskipun demikian tetap perlu mewaspadai adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan akan air berbagai sektor seiring dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian daerah.

**Tabel 2.15 Debit Sungai Pada Berbagai Lokasi Pengambilan Air Sungai**

No	Lokasi	Sungai	CA	Q Mak	Q Min	Q Rerata
			(Km2)	(m3/dt)	(m3/dt)	(m3/dt)
1	Siulak Deras	Siulak Deras	187	15	4,69	8,25
2	Ds. Deboi	Merao Deboi	425	47	5,50	13,60
3	Tn. Kampung	Bt. Sangkir	50	30	1,96	7,25
4	D. Kerinci	Bt. Merangin	568	90	4,16	16,90
5	S. Manau	Bt. Mesumai	396	90	4,16	16,90
6	P. Rengas	Bt. Merangin	2.9 16	557	28,30	144,00
7	Ps. Bangko	Bt. Merangin	3.645	721	38,20	122,00
8	M. Jernih	Bt. Tabir	885	396	26,40	104,00
9	Rt. Panjang	Bt. Tabir	1.046	713	17,00	97,10
10	Rt. Tenang	Bt. Singkut	327	52	2,00	11,30
11	Ds. Benso	Bt. Asai	1.258	356	12,00	199,00
12	Ma. Inum	Bt. Tembesi	1.455	1.022	12,70	87,60
13	D. Pauh	Bt. Tembesi	10.76	1.358	64,16	248,70
14	Air Gemuruh	Bt. Tebo	1.83 1	742	20,60	150,00
15	Rt. Kelayang	Bt. Pelepat	412	220	13,60	41,10
16	Rt. Pandan	Bt. Bungo	410	177	6,54	28,80
17	M. Kilis	Batanghari	17.824	1.948	82,00	552,00
18	Ma. Tembesi	Batanghari	36.135	8.303	596,00	2.110,00
19	S. Duren	Batanghari	38.704	-	690,00	2.484,00
20	Pmt. Bidaro	Bt. Kumpeh	375	129	2,80	40,10
21	Ancol Kasang	Batanghari	4.3	11.343	696,00	3.114,00

**Tabel 2.16 Kebutuhan Air Untuk Ruma Tangga, Konsumsi dan Industri WS Batanghari s/d 2033**

No	DAS	2013	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta
1	DAS Sumai	16,319	0.0434	0.0057	0.0491	1.5275
2	DAS Air Hitam	9,282	0.0247	0.0032	0.0279	0.8688
3	DAS Batang Kumpeh	103,381	0.2752	0.0359	0.3111	9.6765
4	DAS Kaos	7,839	0.0209	0.0027	0.0236	0.7338
5	DAS Danau Bangko	7,167	0.0191	0.0025	0.0216	0.6708
6	DAS Singkatigedang	5,469	0.0146	0.0019	0.0165	0.5119



No	DAS	2013	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta
7	DAS Rengas	4,697	0.0125	0.0016	0.0141	0.4396
8	DAS Ketalo	3,216	0.0124	0.0032	0.0134	0.3475
9	DAS Kilis	4,676	0,0825	0.0056	0.0154	0.2654
10	DAS Cempengan	4,674.	0,0654	0.0076	0.0216	0.45365
11	DAS Batang Langsisip	3,812	0.0145	0.0056	0.0127	0.2776
12	DAS Mungoh	18,248	0.0486	0.0063	0.0549	1.7080
13	DAS Batang Jujuhan	47,526	0.1265	0.0165	0.1430	4.4484
14	DAS Batang Siat	67,937	0.1809	0.0236	0.2044	6.3589
15	DAS Batang Sipotan	5,235	0.1645	0.0176	0.1564	0.7549
16	DAS Batang Monjong	6,573	0.0175	0.0023	0.0198	0.6152
17	DAS Batang Pangean	47,806	0.1273	0.0166	0.1439	4.4746
18	DAS Batang Talantan	6,778	0.0180	0.0024	0.0204	0.6344
19	DAS Batang Sangir	128,585	0.3423	0.0446	0.3869	12.0356
20	DAS Batang Tabir	88,907	0.2367	0.0309	0.2675	8.3216
21	DAS Batang Tembesi	645,987	1.7196	0.2243	1.9439	60.4644
22	DAS Batang Tebo	353,093	0.9399	0.1226	1.0625	33.0495
23	DAS Batang Gumati	11,659	0.0310	0.0040	0.0351	1.0913
24	DAS Batang Bangko	32,395	0.0862	0.0112	0.0975	3.0322
25	DAS Batanghari	1,317,630	3.5076	0.4575	3.9651	123.3302
26	DAS Pangkal Duri Besar	8,141	0.0217	0.0028	0.0245	0.7620
27	DAS Bentano	47,193	0.1256	0.0164	0.1420	4.4173
28	DAS Mandahara	44,287	0.1179	0.0154	0.1333	4.1453
29	DAS Tungkal	203,117	0.5407	0.0705	0.6112	19.0118

No	DAS	2023	Kebutuhan Air Rumah Tangga	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/Th
1	DAS Sumai	17724.342	0.047182855	0.006154285	0.05333714	1.658998411
2	DAS Air Hitam	9745.94376	0.025944063	0.003384008	0.029328072	0.912220336
3	DAS Batang Kumpeh	111852.0814	0.297754383	0.038837528	0.336591912	10.46935482
4	DAS Kaos	8629.61616	0.022972358	0.002996395	0.025968752	0.807732073
5	DAS Danau Bangko	7211.39484	0.019197	0.002503957	0.021700957	0.674986557
6	DAS Singkatigedang	5502.848985	0.014648788	0.001910711	0.016559499	0.515066665
7	DAS Rengas	4726.237233	0.012581419	0.001641055	0.014222473	0.442375805
8	DAS Ketalo	3216.29383	0.01247858	0.00324564	0.01345422	0.34756401
9	DAS Kilis	4676.265277	0,0825431	0.00564367	0.0154673	0.26542315
10	DAS Cempengan	4674.546789	0,0654732	0.0076567	0.0216572	0.45365217
11	DAS Batang	3812.785834	0.0145673	0.0056432	0.0127341	0.27765823
12	DAS Mungoh	19533.03595	0.051997665	0.006782304	0.058779969	1.828292165
13	DAS Batang Jujuhan	51926.91734	0.138231377	0.01803018	0.156261557	4.860359463
14	DAS Batang Siat	68611.41436	0.182646126	0.023823408	0.206469534	6.422028384
15	DAS Batang	5235.908567	0.16453782	0.01765234	0.15643342	0.754987231
16	DAS Batang Monjong	6637.782686	0.017670023	0.002304786	0.019974809	0.621296459
17	DAS Batang Pangean	48478.2099	0.12905079	0.016832712	0.145883502	4.537560447
18	DAS Batang Talantan	6860.894568	0.018263955	0.002382255	0.020646211	0.642179732
19	DAS Batang Sangir	130407.4126	0.347149362	0.045280352	0.392429714	12.20613381

20	DAS Batang Tabir	89737.92496	0.23888568	0.031159002	0.270044682	8.399469776
21	DAS Batang Tembesi	672065.0634	1.78906209	0.233355925	2.022418015	62.90528993
22	DAS Batang Tebo	376498.0626	1.002251787	0.130728494	1.132980281	35.24021866
23	DAS Batang Gumati	11764.47975	0.031317481	0.004084889	0.03540237	1.101155304
24	DAS Batang Bangko	32791.48081	0.087292136	0.011385931	0.098678067	3.069282604
25	DAS Batanghari	1371427.934	3.650791954	0.476190255	4.126982208	128.3656546
26	DAS Pangkal Duri Besar	8250.020813	0.021961861	0.002864591	0.024826452	0.772201948
27	DAS Bentano	47823.93017	0.127309073	0.016605531	0.143914605	4.476319864
28	DAS Mandahara	46499.92704	0.123784528	0.016145808	0.139930336	4.352393171
29	DAS Tungkal	205831.4716	0.547931001	0.071469261	0.619400262	19.26582575

No	DAS	2033	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/th
1	DAS Sumai	20534.994	0.054664915	0.007130206	0.061795121	1.922075438
2	DAS Air Hitam	10673.39756	0.02841298	0.003706041	0.03211902	0.999030012
3	DAS Batang Kumpeh	128763.3038	0.342772684	0.04470948	0.387482164	12.05224524
4	DAS Kaos	10210.26996	0.027180117	0.003545233	0.030725349	0.955681268
5	DAS Danau Bangko	7276.075828	0.019369183	0.002526415	0.021895599	0.681040698
6	DAS Singkatgedang	5552.205555	0.014780177	0.001927849	0.016708026	0.51968644
7	DAS Rengas	4768.628158	0.012694265	0.001655774	0.014350038	0.446343596
8	DAS Ketalo	3216.29383	0.01247858	0.00324564	0.01345422	0.34756401
9	DAS Kilis	4676.265277	0.0825431	0.00564367	0.0154673	0.26542315
10	DAS Cempengan	4674.546789	0.0654732	0.0076567	0.0216572	0.45365217
11	DAS Batang	3812.785834	0.0145673	0.0056432	0.0127341	0.27765823
12	DAS Mungoh	22082.03895	0.058783206	0.007667375	0.06645058	2.066878846
13	DAS Batang Jujuhan	56412.29284	0.150171613	0.019587602	0.169759215	5.28019061
14	DAS Batang Siat	69591.1714	0.185254276	0.024163601	0.209417877	6.513733643
15	DAS Batang	5235.908567	0.16453782	0.01765234	0.15643342	0.754987231
16	DAS Batang Monjong	6732.568873	0.017922348	0.002337698	0.020260045	0.630168446
17	DAS Batang Pangean	49598.90724	0.132034128	0.017221843	0.149255971	4.642457718
18	DAS Batang Talantan	6981.453744	0.018584888	0.002424116	0.021009004	0.65346407
19	DAS Batang Sangir	133334.4122	0.354941144	0.046296671	0.401237815	12.48010098
20	DAS Batang Tabir	91208.07326	0.242799269	0.03166947	0.274468739	8.537075657
21	DAS Batang Tembesi	723473.7987	1.925914047	0.25120618	2.177120227	67.71714755
22	DAS Batang Tebo	423299.6717	1.126839404	0.146979053	1.273818457	39.62084927
23	DAS Batang Gumati	11917.52722	0.031724899	0.00413803	0.035862929	1.115480548
24	DAS Batang Bangko	33367.69049	0.088826028	0.011586004	0.100412032	3.12321583
25	DAS Batanghari	1477224.191	3.932425509	0.512925066	4.445350575	138.2681843
26	DAS Pangkal Duri Besar	8408.1081	0.022382695	0.002919482	0.025302177	0.786998918
27	DAS Bentano	48740.33458	0.129748576	0.016923727	0.146672303	4.562095316
28	DAS Mandahara	50925.00224	0.135564242	0.017682292	0.153246535	4.76658021
29	DAS Tungkal	209775.624	0.558430481	0.072838758	0.631269239	19.63499841

## Neraca Air 20 Tahun

Berdasarkan hasil analisis pembangkitan rangkaian data hujan aliran yang menggambarkan ketersediaan air 5, 10, 15, dan 20 tahun yang akan datang, beserta analisis kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya dengan asumsi kebutuhan 5, 10, 15 dan 20 tahun ke depan, maka disusun Tabel dan neraca air sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Kebutuhan Air Rumah Tangga, Industri, Irigasi Berdasarkan Neraca Air 20 Tahun**

URAIAN	2008	2013	2018	2023	2028
Ketersediaan (m <sup>3</sup> /det)	2080.301	2080.301	2080.301	2080.301	2080.301
Kebutuhan (m <sup>3</sup> /det)	381.5642	388.3542	395.7494	403.8081	412.5413

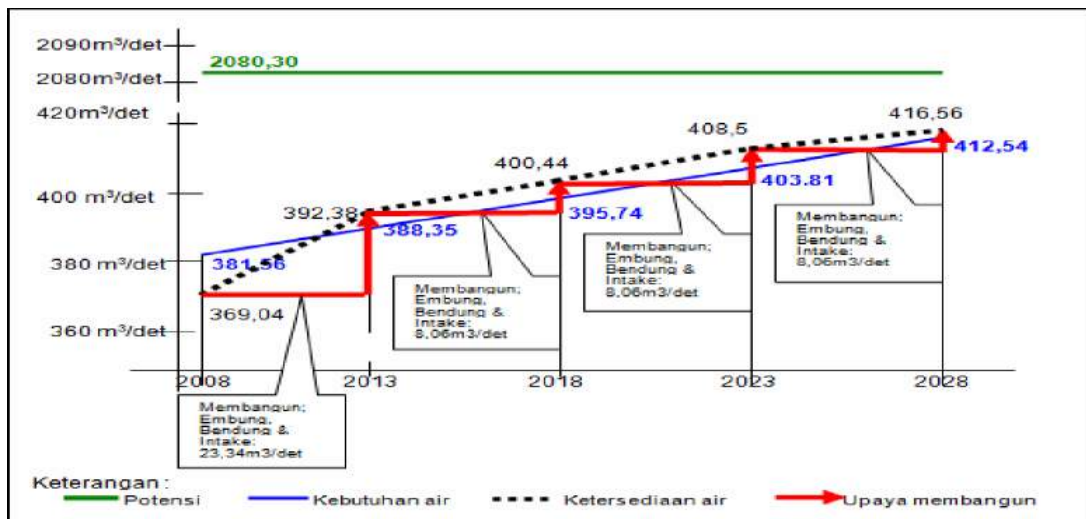
## Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi, misalnya, kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik. Dengan mengingat sulitnya melakukan asumsi terhadap kondisi perubahan iklim dan perubahan politik yang akan terjadi pada masa yang akan datang maka dilakukan pendekatan untuk menggunakan asumsi kondisi perekonomian.

Skenario kondisi WS Batanghari akan ditetapkan dengan menggunakan tinjauan terhadap kondisi perekonomian tinggi, sedang dan rendah dengan kriteria sebagai berikut:

- Skenario 1: pertumbuhan ekonomi rendah apabila pertumbuhan ekonomi < 4,5%
  - Skenario 2: pertumbuhan ekonomi sedang apabila pertumbuhan ekonomi 4,5% - 6,5%
  - Skenario 3: pertumbuhan ekonomi tinggi apabila pertumbuhan ekonomi > 6,5%
- Skenario yang dipilih sebagai dasar skenario pemenuhan Air untuk industri Provinsi Jambi adalah skenario pertumbuhan ekonomi sedang.

**Gambar 2.15 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Sedang Periode 2008-2013**



Pada Tahun 2008, air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang untuk RKI, Irigasi/Rawa dan lainnya adalah sebesar 369,04 m<sup>3</sup>/det, sedangkan kebutuhan air pada tahun 2008 mencapai 381,5 m<sup>3</sup>/det, sehingga terdapat defisit air sebesar 12,53 m<sup>3</sup>/det.

Dengan skenario pada kondisi ekonomi sedang, kemampuan untuk membangun prasarana sumber daya air cukup untuk memenuhi kebutuhan air sampai tahun 2013. Untuk itu disusun strategi antara lain dengan membangun embung (di Kab. Solok Selatan, Kab. Bungo), bendung (di Kab. Sarolangun) dan intake (di Kab. Dharmasraya, Kab. Bungo, Kota Jambi) kapasitas total 23,34 m<sup>3</sup>/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada tahun 2013 dapat mencapai 392,38 m<sup>3</sup>/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,03 m<sup>3</sup>/det.

**Periode 2013-2018**

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai tahun 2018 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya) dan intake (Kab. Solok Selatan, Kab . Kerinci, Kab . Tebo, Kab . Sarolangun, Kab . Tanjab Timur) dengan kapasitas total 8,06 m<sup>3</sup>/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada tahun 2018 dapat mencapai 400,44 m<sup>3</sup>/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,7 m<sup>3</sup>/det.

**Periode 2018-2023**

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai tahun 2023 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab. Dharmasraya, Kab. Bungo, Kab. Kerinci dan Kota Jambi) dan intake (di Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung/Sawahlunto, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab.

Sarolangun, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, Kota Kerinci) dengan kapasitas total 8.06 m<sup>3</sup>/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada tahun 2023 dapat mencapai 408,5 m<sup>3</sup>/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,69 m<sup>3</sup>/det.

### **Periode 2023-2028**

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai tahun 2028 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (Kab. Sijunjung/Sawahlunto, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun), dan intake (di Kab. Sijunjung/Sawahlunto, Kab. Merangin, Kab. Muaro Jambi) dengan kapasitas total 8.06 m<sup>3</sup>/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada tahun 2028 dapat mencapai 416,56 m<sup>3</sup>/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,03 m<sup>3</sup>/det.

## **2.1.5 Aspek Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri dan Ekspor Import**

### **2.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Industri**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian.

Secara kuantitas, untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan riil PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku/ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan/ADHK (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Indeks Perkembangan Tahun 2013 – 2018**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB ADHB (Miliar Rp)	129 976	144 814	155 066	171 199	189 868	208 379
Indeks Perkembangan (%)	143,4	159,8	171,1	188,9	209,5	230,0
Nilai PDRB ADHK (Miliar Rp)	111 766	119 991	125 037	130 501	136 557	142 995
Indeks Perkembangan (%)	123,3	132,4	138,0	144,0	150,7	157,8

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Prov. Jambi 2019

PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar 208.379 miliar rupiah sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 142.995 miliar rupiah. Berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 berkembang 2,3 kali lebih besar dibandingkan tahun 2010. Berdasarkan harga konstan PDRB Provinsi Jambi berkembang 1,57 kali lebih besar dibandingkan tahun 2010.

Dalam rangka memenuhi berbagai target dan tujuan pembangunan industri di Provinsi Jambi, maka berbagai upaya yang direncanakan dan akan dilakukan dalam rentang waktu rencana tentu dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi dalam kurun lima tahun terakhir.

**Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018**

	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,22	28,24	30,05	29,68	27,57
B	Pertambangan dan Penggalian	24,48	19,01	16,64	17,77	20,17
C	Industri Pengolahan	10,94	11,05	10,54	10,34	9,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	7,10	7,23	7,05	7,01	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,78	11,12	11,84	11,62	11,77
H	Transportasi dan Pergudangan	2,95	3,17	3,36	3,28	3,19

	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	1,10	1,15	1,19	1,21	1,19
J	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,47	3,65	3,74	3,79
K	Jasa Keuangan	2,45	2,43	2,53	2,46	2,32
L	Real Estat	1,45	1,56	1,59	1,56	1,55
M,N	Jasa Perusahaan	1,09	1,16	1,21	1,21	1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,88	4,72	4,51	4,60
P	Jasa Pendidikan	3,12	3,30	3,35	3,32	3,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,10	1,10	1,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,89	0,96	0,97	0,97	0,96
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS Prov. Jambi 2019

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,57 % (angka ini naik dari 26,22 % di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,17 % (turun dari 24,48 % di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,77 % (naik dari 9,78 % di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,97 % (turun dari 10,94 % di tahun 2014) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,07 %.

Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor cenderung meningkat, meskipun pada tahun terakhir sedikit menurun. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian juga mengalami fluktuasi tapi dengan

kecenderungan menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya juga sangat berfluktuasi. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

**Tabel 2.20 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi (Persen), 2014-2018**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	87,23	87,09	87,89	88,34	87,58
	a. Tanaman Pangan / <i>Food Crops</i>	9,49	8,93	8,74	7,76	8,05
	b. Tanaman Hortikultura	12,77	12,34	12,33	11,79	12,23
	c. Tanaman Perkebunan	59,22	60,14	61,48	63,60	61,72
	d. Peternakan	4,78	4,77	4,43	4,27	4,63
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,97	0,90	0,92	0,91	0,94
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,83	4,84	4,41	4,07	4,18
3	Perikanan	7,94	8,07	7,70	7,59	8,24
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Prov. Jambi 2019

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 57,45 triliun rupiah atau sebesar 27,57 %. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 70,48 %, disusul Tanaman Hortikultura sebesar 13,97 % dan Tanaman Pangan sebesar 9,19 % dari seluruh nilai tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi kedua subkategori yang lain terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing kurang dari 10 (sepuluh) %. Kontribusi subkategori Perikanan sebesar 4,73 triliun rupiah atau 8,24 % dan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu lebih rendah yaitu 2,40 triliun rupiah atau 4,18 %. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, khususnya Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura. Pada tahun 2018, kategori ini tumbuh sebesar 2,48 %. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yang



sebesar 5,43 %. Banjir dan pergeseran musim tanam menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Secara berturut turut yang tergolong pada sepuluh besar komoditas perkebunan berdasarkan luas tanam yang diusahakan di Provinsi Jambi adalah: Karet, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Cassiavera, Kopi Robusta, Pinang, Tebu, Teh, Kakao dan Nilam. Diantara sepuluh komoditas perkebunan yang memiliki areal tanam terluas tersebut, tercatat tanaman tebu mengalami pertumbuhan yang paling cepat yakni dengan rata rata laju pertumbuhan sebesar 16,72 % per tahun selama lima tahun terakhir, periode tahun 2008-2012. Menilik laju pertumbuhan areal tanam tebu yang tergolong pesat tersebut, komoditas ini layak dijadikan sebagai salah satu komoditas yang dapat diunggulkan sebagai bahan baku industry agro daerah. Sesuai dengan pohon industri komoditas Tebu, bahan pangan siap konsumsi yang dihasilkan pada kelompok industri kecil hingga menengah dari tanaman tebu adalah gula dan kecap. Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2013 menunjukkan bahwa usaha tani tebu umumnya diusahakan di Kabupaten Kerinci. Usaha perkebunan lainnya yang menunjukkan pertumbuhan luas areal yang cukup pesat di wilayah Provinsi Jambi adalah tanaman Kelapa Sawit. Areal tanaman Kelapa Sawit di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata rata sebesar 5,59 %. Komoditas perkebunan lainnya yang terlihat mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir adalah Kopi dan Karet yakni masing-masing sebesar 0,83 % dan 0,61 % per tahun

#### **2.1.5.2 Nilai Eksport Sektor Industri**

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan 19,98% dibanding Tahun 2017, yaitu dari US\$ 2,5 milyar menjadi US\$ 3,06 milyar. Penyebab utama naiknya ekspor Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah naiknya ekspor migas, disamping kenaikan ekspor yang terjadi pada Bahan-bahan Nabati, berbagai Barang Buatan Pabrik, Kayu/Barang dari Kayu, Kertas/Karton, Kopi/Teh/Rempah-rempah. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok bahan bakar mineral yaitu sebesar 62,01%, diikuti kelompok hasil industri sebesar 26,20%.

**Tabel 2.21 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Asal Barang dari Provinsi Jambi  
Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2017 dan 2018**

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME EKSPOR		NILAI FOB (US \$)	
		2017	2018	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ampas / Sisa Industri makanan		173.250		61.817
2	Bahan Bakar Mineral	5.961.983.724	7.613.497.809	1.202.693.566	1.899.907.220
3	Bahan-bahan Nabati	705.123.396	728.670.356	53.804.609	54.907.723
4	Barang Kiriman	1.556	2.291	74.896	79.489
5	Benda-benda dari Besi dan Baja	422.520	268.560	25.559	16.246
6	Berbagai Barang Buatan pabrik	34.166	37.000	8.694	25.441
7	Berbagai Produk Kimia	4.468.000	4.500.000	2.919.696	2.486.368
8	Biji-bijian berminyak	208.890	1.086.332	215.160	946.804
9	Binatang Hidup	4.310	8.040	21.550	40.200
10	Buah-buahan	114.986.756	122.538.141	141.036.362	142.630.544
11	Bubur Kertas / Pulp	264.868.924	123.441.038	144.929.727	79.955.200
12	Buku dan Barang Cetak	1		319	
13	Gandum-gandum	3		3	
14	Ikan dan Udang	2.083	2.315	24.984	24.342
15	Jerami / Bahan Anyaman		27		335
16	Kapal Terbang dan bagiannya	61		450	
17	Karet dan Barang dari karet	412.795.220	395.047.780	700.837.105	550.109.392
18	Kayu, Barang dari Kayu	31.550.015	52.154.492	27.568.544	41.979.115
19	Kertas / Karton	130.998.955	119.597.196	119.826.747	127.877.996
20	Kopi, Teh, Rempah-rempah	7.974.716	8.269.770	23.686.729	25.862.339
21	Lak, Getah dan Damar	26.096	32.000	112.645	15.775
22	Lemak & Minyak Hewan/nabati	130.858.949	207.394.358	135.341.996	136.650.560
23	Logam Dasar Lainnya	710		3.664	
24	Mesin-mesin / Pesawat mekanik	1.640	6.657	54.157	73.677
25	Minyak Atsiri, Kosmetik wangi2an	239.232	93.377	238.965	107.051
26	Nikel		1.024		243
27	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	1		30	
28	Perangkat Optik		3.750		1.369
29	Plastik dan Barang dari plastik		44.322		26.166
30	Sabun dan Preparat	15		189	

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME EKSPOR		NILAI FOB (US \$)	
		2017	2018	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	pembersih Sayuran	8.500		56.100	
Jumlah Total		7.766.558.438	9.376.869.885	2.553.482.446	3.063.785.413

Sumber : BPS Prov. Jambi 2019

## 2.2 Sumber Daya Industri

### Sumber Daya Tenaga Kerja Sektor Industri

Pembangunan sumber daya manusia industri merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. tanpa sumber daya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Kondisi tenaga kerja industri atau sumber daya manusia yang bekerja di bidang industri sebagai berikut:

### A. Industri Hulu Agro-Karet

Tabel 2.22 SDM Industri Hulu Agro-Karet

No.	Komoditas	Produk	Industri	Kapasitas Produksi (Ton/Hari)	SDM
1	Bokar	Crumb Rubber	Industri Hulu Pengolahan Karet (Modern)	1.607	846
a		SIR 20			
2	Bokar	Lateks Pekat	Industri Hulu Pengolahan Karet (Modern)	200	182
3	Sawn Timber	Dowel/Moulding	Industri Hulu Pengolahan Karet	52	87
4		Palet		50	83
Total					1.198

## B. Industri Hasil Hutan Proyeksi

Tabel 2.23 SDM Industri Hasil Hutan

No.	Komoditas	Hulu-Intermediate-Hilir Produk	Bahan Baku	Produk & Turunan Produk	Jenis Industri	Kapasitas Penyerapan (ton/Hari)	SDM
1	Kayu	Hulu	Kayu Gelondongan	Kayu Gergaji	Industri Pengolahan Kayu	75	379
		Intermediate	Kayu Gergajian	kayu Lapis		71	656
				Working Woods		13	59
			Kayu Gelondongan	Pulp		3.028	7.206
		Hilir	Kayu Gelondongan	Kayu Olahan Lainnya		183	837
		Hulu		Kayu Gelondongan		11.523	40.332
	Rotan dan Bambu	Hulu	Rotan	Barang Anyaman dari Rotan		75	340
				Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya			146
				Ytdl		32	
Total							49.955

## C. Industri Hasil Hulu Agro - Sawit

Tabel 2.24 SDM Industri Hulu Agro-Sawit

No.	Komoditas	Produk	Industri	Kapasitas Produksi (Ton/Hari)	SDM
1	Sawit	CPO	Industri Hulu Agro - Minyak Sawit	43.649	12.436
		PKO		4.850	
		<i>Turunan Ke 1 CPO</i>			
		Olein		2.533	724
		PFAD		2.638	754
		Stearin		1.979	565
		<i>Turunan Ke 2 CPO</i>			
		Minyak Goreng		2.612	746
Total					15.225

## D. Industri Hasil Hulu Agro - Kelapa Dalam

Tabel 2.25 SDM Industri Hulu Agro-Kelapa Dalam

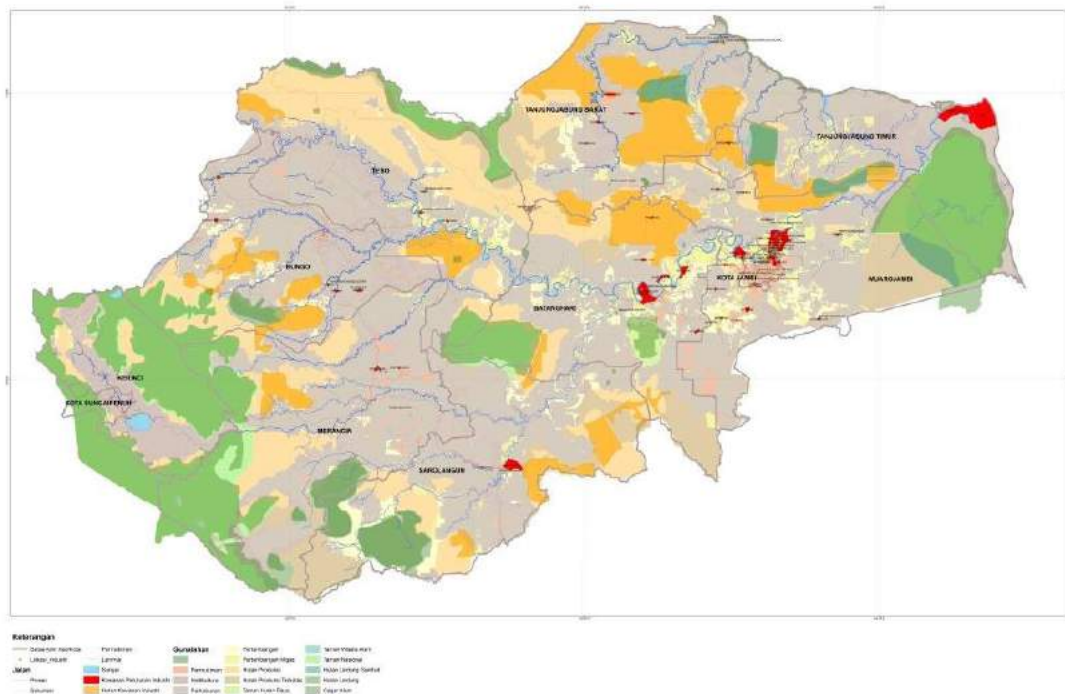
No.	Komoditas	Produk	Industri	Kapasitas (Ton/hari)	SDM
1	Kelapa	Nata de Coco	industri Nata de Coco	7,21	132
2		Coconut Water	Industri Coconut Water	7,21	44
3		Kopra	industri kopra	43,43	634
		Minyak Kelapa	industri minyak kelapa	21,72	793
		Sabut Kelapa	industri sabut kelapa	32,47	395
Kebutuhan Bahan Baku (Tahun)				86.777	
Sisa Bahan Baku				-	
		VCO	industri minyak kelapa	4,33	53
Kebutuhan Bahan Baku (Tahun)				8.658	
Sisa Bahan Baku				-	
					2.050

## 2.3 Sarana dan Prasarana

### 2.3.1 Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar diarahkan pengembangannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk daerah perkotaan industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan. Ditinjau dari lokasinya selain mempunyai akses yang baik ke pantai timur kawasan ini mempunyai wilayah belakang kawasan perkebunan yang potensial untuk mendukung kegiatan agro. Di luar zona diatas, kegiatan diarahkan pengembangannya pada wilayah Kota Jambi dalam bentuk peruntukan seperti diarahkan dalam rencana tata ruangnya, serta pengembangan sentra-sentra kecil dan pengelolaan hasil perkebunan di masing-masing perkebunan.

**Gambar 2.16 Peta Peruntukan Industri Provinsi Jambi 2017-2037**



Arahan pengembangan zona industri meliputi:

- Penataan ruang untuk kawasan industri besar dan zonasinya diarahkan di sekitar Kuala Tungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak.

- Penyediaan prasarana pendukung kawasan industri
- Pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan dan sentra-sentra kecil

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan industri menengah dan kawasan industri kecil.

- a. Perwujudan kawasan industri besar, meliputi:
  - pengembangan industri *bio diesel* terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - pengembangan industri pengolahan karet terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - pengembangan industri bubur kertas dan kertas terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Perwujudan kawasan industri menengah meliputi:
  - pengembangan industri CPO/minyak sawit terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.
  - pengembangan industri pengolahan karet terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.
- c. Perwujudan kawasan industri kecil meliputi:
  - pengembangan industri kerajinan di seluruh kabupaten/kota.
  - pengembangan industri pakan ternak di seluruh kabupaten.
  - pengembangan industri lainnya tersebar di seluruh kabupaten/kota sesuai potensi daerah masing-masing.

Pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan dan sentra-sentra kecil. Dikarenakan industri unggulan Provinsi Jambi hasil dari analisa bersumber dari hasil perkebunan, perikanan dan pertambangan maka perlu juga di bahas terkait analisa kawasan peruntukan perolehan bahan baku dari industri unggulan tersebut

#### 1. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh.

##### ➤ Kawasan Peruntukan Perkebunan

Areal tanaman tahunan merupakan areal pertanian dengan tanaman tahunan sebagai tanaman utama yang dikelola dengan penggunaan teknologi sederhana sampai tinggi dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air. Pada

tanaman areal tahunan ini diutamakan tanaman buah-buahan, perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Kegiatan perkebunan yang berkembang tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai jenis komoditi, dimana komoditi utama adalah kelapa sawit, teh, karet, kopi, dan kelapa. Sebagian besar lahan perkebunan tersebut berada di wilayah tengah dan timur meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci.

## 2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang terdapat di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan minapolitan, pengolahan perikanan dan prasarana perikanan.

### ➤ Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap sungai berada di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tebo.
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap laut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

### ➤ Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:

- peruntukan perikanan budidaya laut meliputi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- peruntukan perikanan budidaya sungai berada di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tebo.
- peruntukan perikanan budidaya danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

## 3. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Provinsi Jambi memiliki potensi yang besar di sektor pertambangan. Beberapa pertambangan yang skala besar dan sudah dieksploitasi adalah pertambangan minyak

dan gas, sedangkan potensi pertambangan lainnya yang mempunyai skala besar tetapi dieksploitasi antara lain pertambangan batu bara dan semen.

Potensi pertambangan tersebut jika dikelompokkan atas wilayah usaha pertambangan maka potensi pertambangan di Provinsi Jambi terdiri dari :

➤ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- pertambangan mineral di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Tabel 2.26 Luasan Kawasan Peruntukan Industri**

NO	KABUPATEN	LUAS KAWASAN (Ha)
1	BATANGHARI	4928,93
2	BUNGO	784,39
3	KOTA JAMBI	1451,82
4	MERANGIN	313,82
5	MUAROJAMBI	7225,31
6	SAROLANGUN	2057,51
7	TANJUNG JABUNG BARAT	961,47
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	12816,11
9	TEBO	294,22
10	SUNGAI PENUH	289,13
11	KERINCI	421,11
	TOTAL	24820,77

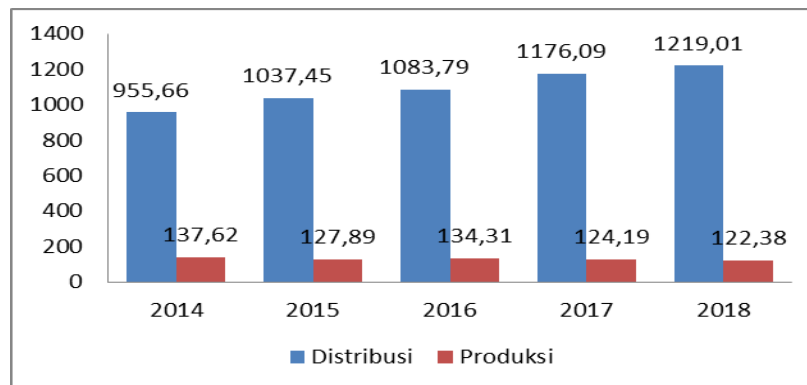
### 2.3.2 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Secara umum sektor pertambangan dan energi di Provinsi Jambi sudah mulai membaik dalam 3 tahun terakhir jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi bahan tambang dan produksi serta distribusi listrik. Produksi bahan tambang, terutama minyak bumi di Provinsi Jambi pada tahun 2017 berkisar 7 juta barel per tahun. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Distribusi listrik di Provinsi Jambi pada tahun 2018



meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.179,09 juta kwh menjadi 1.219,01 juta kwh. Dilihat dari besarnya jumlah listrik yang didistribusikan, tampaknya jumlah listrik yang diproduksi setiap tahunnya tidak seimbang dengan yang didistribusikan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pasokan listrik Provinsi Jambi masih sangat tergantung pada wilayah lain atau produksi listrik wilayah lain.

**Gambar 2.17 Perbandingan Produksi dan Distribusi Listrik Provinsi Jambi Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS RI 2019 Diolah

**Tabel 2.27 Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang Tahun 2011 - 2018**

Tahun	Jenis Barang			
	Minyak Bumi (barell)	Gas Bumi (BoE)	Batubara (ton)	Bijih Besi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	6.403.411	16.001.213	7.760.173	527.096
2012	6.245.962	17.044.213	7.118.038	116.401
2013	5.705.833	16.731.991	7.737.549	148.657
2014	5.318.080	16.806.643	7.797.961	30.003
2015	7.622.069	15.265.669	6.091.553	-
2016	7.509.763	15.137.999	5.661.663	-
2017	7.297.778	15.128.398	8.388.514	-
2018	8.198.255	0	11.199.896	

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2019

**Tabel 2.28 Penjualan Tenaga Listrik dan Air Minum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2014**

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kerinci	97,27	0,22	2,51	100
Merangin	88,75	8,63	2,63	100
Sarolangun	92,84	2,55	4,61	100

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Batang Hari	95,12	2,95	1,93	100
Muaro Jambi	95,8	1,94	2,25	100
Tanjung Jabung Timur	89,99	7,42	2,59	100
Tanjung Jabung Barat	77,26	15,93	6,81	100
Tebo	94,97	1,55	3,48	100
Bungo	97,29	0,25	2,46	100
Kota Jambi	99,8	0,2	0	100
Kota Sungai Penuh	99,62	0,38	0	100
<b>Jambi</b>	<b>93,56</b>	<b>3,76</b>	<b>2,65</b>	<b>100</b>

Sumber :BPS Prov. Jambi 2019

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi primer yang terdiri batubara sekitar 2.547,31 juta ton, potensi panas bumi diperkirakan sekitar 1.032 mwe tersebar di 8 lokasi dan tenaga air 373,9 mw yang terdapat di G. Kapur Kerinci, G. Kaca Kerinci, Sungai Betung, Semurup, Lempur, Air Dikit, Graho Nyabu dan Sungai Tenang. Potensi tenaga air yang belum terukur pada 2 lokasi yaitu Merangin-2 dan Merangin-5.

#### **Pembangunan Pembangkit**

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2026 diperlukan pembangunan pusat pernbangkit di Provinsi Jambi dengan rincian seperti pada

**Tabel 2.29 Rencana Pembangunan Pembangkit**

NO	NAMA PROYEK	JENIS	ASUMSI PENGEMBANG	KAPASITAS WW1	COD	STATUS
1	Karang Anver	PLTBg	IPP	1,0	2017	Konstruksi
2	Tj. Jabung Timur (MPP)	PLTMG	PLN	30	2017	Rencana
3	Batanghan Ekspansi	PLTGU	PLN	30	2019	Konstruksi
4	Payosehncah (ST)	PLTGU	PLN	30	2020	Rencana
5	Sungai Penuh Small	PLTP	Unallocated	5	2020	Rencana
6	Sungai Penuh {FTP2}	PLTP	PLN	110	2021/2022	Rencana
7	Jambi	PLTU MT	IPP	600 600	2021 2022	Rencana
8	Sungai Penuh Semurup	PLTP	Unallocated	30	2023	Rencana
9	Merangin-2	PLTA	1PP	350	2023/2024	Rencana
10	Graho Nvabu (FLIP tersebar Jambi)	PLTP	IPP	110	2025	Rencana
11	PLTBg (Potensi	PLTBg	IPP	2,6	2017-2026	Rencana
12	PLTBm (Patens]	PLTBm	1PP	3,0	2017-2026	Rencana
13	PLTM (Potensi	PLTM	IPP	5,0	2017-2026	Rencana
	Jumlah			1.907		

## Pembangunan Gardu Induk

Rencana Pembangunan GI 150 kV dan 275 kV sampai tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.30 Rencana Pembangunan GI 150 kV**

No	Gardu Induk	Tegangan	New/ Ekatension	Kapasitas MVA/LB	COD	Status
1	Sungai Penuh	150/20 kV	Ext	30	2017	Committed
2	Sungai Penuh	150/20 kV	New	30	2017	Konstruksi
3	Bangko	150 kV	Ext	2 LB	2017	Konstruksi
4	Merangin	150/20 kV	New	4 LB	2017	Konstruksi
5	Sarolangun	150/20 kV	New	30	2017	Konstruksi
6	Muara Bulian	150 kV	Ext	2 LB	2017	Konstruksi
7	New Aurduri	150 kV	Uprate	2 LB	2017	Committed
8	Sei Gelam	150/20 kV	Ext	60	2017	Rencana
9	New Aurduri	150/20 kV	New	60	2018	Konstruksi
10	Muara Sabak	150/20 kV	Ext	60	2018	Rencana
11	Muaro Bungo	150/20 kV	Uprate	60	2018	Rencana
12	Muara Bulian	150/20 kV	Ext	60	2018	Rencana
13	Aur Dun	150/20 kV	Uprate	60	2018	Committed
14	Tebo	150/20 kV	New	60	2019	Committed
15	GI/GIS Kota Jambi	150/20 kV	New	60	2019	Rencana
16	Payoselincah (line Bay	150 kV	Ext	2 LB	2019	Rencana
17	Sei Gelam	150 kV	Ext	2 LB	2019	Rencana
18	Kuala Tungkal	150/20 kV	New	30	2019	Rencana
19	Muara Sabak	150 kV	Ext	2 LB	2019	Rencana
20	Sarolangun	150 kV	Ext	2 LB	2019	Rencana
21	Sungai Penuh	150/20 kV	Ext	60	2020	Rencana
22	Pelabuhan Dagang	150/20 kV	New	30	2020	Rencana
23	Kuala Tungkal	150 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
24	Muaro Bungo	150/20 kV	Uprate	60	2020	Rencana
25	Sarolangun	150/20 kV	Ext	60	2021	Rencana
26	Merangin	150/20 kV	Ext	60	2022	Rencana
27	New Aurduri	150/20 kV	Ext	60	2022	Rencana
28	Kuala Tungkal	150/20 kV	Ext	60	2022	Rencana
29	Kotoroyo	150/20 kV	New	60	2024	Rencana
30	Tebo	150 kV	Ext	2 LB	2024	Rencana
31	Muara Rupit	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
32	Muara Bulian	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
33	PLTP Sungai Penuh	150/20 kV	New	30	2025	Rencana
34	Sungai Penuh	150 kV	Ext	2 LB	2025	Rencana
35	Aur Dun	150/20 kV	Uprate	60	2025	Rencana
36	Sei Gelam	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
37	Sungai Penuh	150/20 kV	Uprate	60	2026	Rencana
38	Pelabuhan Dagang	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
39	GIS Kota Jambi	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
TOTAL				1.500		

Sumber : RUPTL PLN 2017-2026

**Tabel 2.31 Rencana Pembangunan GI 275 kV dan 500 kV**

No	Gardu Induk	Tegangan	New/ Ekstension	Kapasitas MVA/LB	COD	Status
1	Muaro Bungo	275/150 kV	New	250	2017	Konstruksi
2	Muaro Bungo	275/150 kV	Ext	250	2018	Committed
3	Bangko	275/150 kV	New	250	2017	Konstruksi
4	Bangko	275 kV	Ext	Reac	2017	Konstruksi
5	Bangko	275/150 kV	Ext	250	2018	Committed
6	New Aurduri	275/150 kV	New	250	2018	Rencana
7	New Aurduri	275/150 kV	Ext	250	2018	Rencana
8	New Aurduri	275/150 kV	Ext	TB	2019	Rencana
9	New Aurdun	275/150 kV	Ext	1000	2021	Rencana
10	New Aurdun/Jambi 2	500 kV	Ext	2 LB	2023	Rencana
11	New Aurdun/Jambi 2	500 kV	Ext	2 LB	2021	Committed
12	PLTU Jambi	500 kV	Ext	2 LB	2022	Committed
13	PLTU Jambi	500/275 kV	New	2 LB	2021	Rencana
14	PLTU Jambi	500/275 kV	Ext	500	2026	Rencana
15	PLTU Jambi	275 kV	New	2 LB	2026	Rencana
16	Muaro Bungo	275/150 kV	Ext	2 LB	2022	Rencana
17	New Aurduri/Jamb 2	500/275 kV	New	500	2019	Rencana
18	New Aurdun/Jambi 2	500/275 kV	Ext	500	2023	Rencana
19	Muara Enim	500 kV	Ext	2 LB	2023	Committed
TOTAL				4.000		

Sumber : RUPTL PLN 2017-2026

### Pembangunan Transmisi

Rencana Pembangunan transmisi sampai dengan tahun 2026 untuk sistem 150 kV, 275 kV dan 500 kV ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.32 Rencana Pembangunan Transmisi 150 kV**

No	Dari	Ke	Tegangan	Konduktor	Kms	COD	Status
1	Bangko	PLTA Merangin	150 kV	2 cct, 2 Zebra	136	2017	Konstruksi
2	PLTA Merangin	Sungai Penuh	150 kV	2 cct, 2 Hawk	110	2017	Konstruksi
3	New Aur Duh	2 pi incomer (Aur Duri-Sei Gelang)	150 kV	2 cct, 2 Zebra	30	2018	Konstruksi
4	Muara Bulian	Sarolangun	150 kV	2 cct, 1 Hawk	130	2017	Konstruksi
5	Tebo	Inc. 2 Pi (Muara Bungo-Muara Bulian)	150 kV	2 cct, ACSR 2x340 mm <sup>2</sup>	1	2019	Rencana
6	01/015 Kota Jambi	Inc. 2 Pi (Payoselincah- Sei Gelam)	150 kV	2 cct, XLPE CU 1x800 mm <sup>2</sup>	2	2019	Rencana
7	Pavo Selincah	Sei Gelam	150 kV	2 cct, XLPE CU 1x800	20	2019	Rencana
8	Muara Sabak	Kuala Tungkal	150 kV	2 cct, 1 Hawk	108.8	2019	Rencana
9	Kuala Tungkal	Pelabuhan Dagang	150 kV	2 ect, 1 Hawk	70	2020	Rencana
10	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150 kV	2 cct, 1 Hawk	84	2025	Rencana
11	Tebo/Bangko	Kotorayo	150 kV	2 cct, 1 Hawk	80	2024	Rencana
TOTAL					771.8		

**Tabel 2.33 Rencana Pembangunan Transmisi 275 kV dan 500 kV**

No	Dari	Ke	Tegangan	Konduktor	Kms	COD	Status
1	New	Peranap/Riau 1	500 kV	2 cct, 4	420	2019	Pengadaan
2	Bangko	PLTU Jambi	275 kV	2 cct, 4	180	2022	Rencana
3	PLTU Jambi	New Aur Dun/ Jambi 2	500 kV	2 cct, 4 Zebra	180	2021	Rencana
TOTAL					780		

### 2.3.3 Pengelolaan Lingkungan dan Sanitasi

Jaringan pembuangan limbah cair disini maksudnya adalah jaringan pembuangan yang mengandung kotoran baik rumah tangga, hewan, tumbuh-tumbuhan dan termasuk buangan industri dan buangan kimia. Sistem pembuangan limbah cair berbeda dengan sistem pembuangan air hujan yang biasa disebut drainase, dimana idealnya sistem ini harus dipisahkan.

Di Provinsi Jambi khususnya untuk kawasan perkotaan belum mempunyai sistem pelayanan limbah manusia secara kolektif (*riolering*). Pengelolaan limbah penduduk umumnya dilakukan dengan cara individual oleh masyarakat baik itu berupa cubluk maupun dengan sistem pemakaian *septic tank*. Sistem pengolahan air limbah domestik pada umumnya masih tercampur dengan sistem drainase. Air limbah dari sisa aktivitas manusia dialirkan ke saluran sebelah rumah yang juga adalah saluran untuk drainase. Permasalahan yang timbul di Provinsi Jambi dari segi penanganan sistem pembuangan air limbah ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap sanitasi, yang disebabkan kurangnya sarana dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi tersebut.

Namun dalam RPIP ini yang di kaji adalah Aktivitas Industri dimana saat ini trendnya adalah aktivitas industri untuk Jenis Industri dengan tingkat pembuangan limbah minimal dan cenderung pada konsep *Green Industrial Process*. Saat ini di Provinsi Jambi belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah terutama Limbah B3 yang terintegrasi dengan industri penghasil limbah. Untuk itu perlu merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah dan sampah yang mampu menekan dampak pembuangan limbah industri langsung ke alam. Bentuk prasarana nya adalah :

1. IPAL B3 dan Non B3
2. TPS 3R
3. TPA Sanitary Landfill

Kegiatan penanganan sampah di Provinsi Jambi sampai tahun 2040 meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional meliputi:

- a. Kabupaten Kerinci;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kabupaten Sarolangun;
- d. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- e. Kabupaten Bungo.

Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah meliputi:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;

#### **2.3.4 Jaringan Transportasi**

Jaringan jalan yang membentuk rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jambi merupakan Jaringan Jalan Arteri sebagai jalur utama lintas regional yang menghubungkan Ibukota provinsi ke-setiap Ibukota Kabupaten dan ke wilayah Provinsi lain. Jaringan jalan ini meliputi 3 (tiga) jalur utama yakni:

- a. Jalan Arteri
  - 1) Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
    - Batas Provinsi Riau/Jambi – Merlung;
    - Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi;
    - Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi Simpang Tuan;
    - Simpang Tuan- Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi;
    - Lingkar Barat V Jambi;
    - Batas Kota Jambi KM 15,9 – Mendalo Darat (Simpang Tiga) Simpang Mendalo Darat – Batas Kota Jambi/Muaro Jambi(Simpang Rimbo);
    - Batas Kota Jambi/Muaro Jambi (Simpang Rimbo) – Simpang Kenali Atas Jambi- Batas Kota Jambi/Muaro Jambi - Simpang Pall Sepuluh
    - Batas Kota Jambi/Muaro Jambi – Tempino; dan

- Tempino – Batas Sumatera Selatan/Jambi.
- 2) Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
- Batas Provinsi Sumbar/Jambi – Batas Kabupaten Bungo;
  - Jalan Lintas Sumatera II (Muaro Bungo);
  - Jalan Lintas Sumatera I (Muaro Bungo);
  - Batas Kota Muaro Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin;
  - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin – Batas Kota Bangko;
  - Jalan Lintas Sumatera I (Bangko);
  - Jalan Lintas Sumatera II (Bangko);
  - Batas Kota Bangko - Batas Kab. Sarolangun/ Kab. Merangin- Batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin – Sarolangun; dan
  - Sarolangun - Batas Provinsi Sumatera Selatan/Jambi.
- 3) Jalan Penghubung (Feeder Road) I Jambi - Bungo yang terdiri dari ruas jalan:
- Jalan Arah ke Muara Tebo / Pattimura (Muara Bungo);
  - Batas Kota Muaro Bungo – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo;
  - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo;
  - Muara Tebo – Sungai Bengkal;
  - Sungai Bengkal – Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tebo;
  - Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi;
  - Muara Tembesi – Batas Kota Muara Bulian;
  - Jalan Muara Tembesi (Muara Bulian);
  - Jalan Gadjahmada (Muara Bulian);
  - Batas Kota Muara Bulian – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batanghari; dan
  - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batanghari Simpang Mendalo Darat.
- 4) Jalan Lingkar Kota Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
- Lingkar Timur I - Lingkar Timur II - Sijenjang; dan
  - Simpang Pall Sepuluh - Simpang Pall Merah - Lingkar Timur I.
- 5) Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
- Jalan Soekarno Hatta;
  - Jalan Jend. Sudirman;
  - Jalan Jend. Gatot Subroto;
  - Jalan M. Husni Thamrin;
  - Jalan Pangeran Hidayat;
  - Jalan Mayor Marzuki;

- Jalan Surya Dharma;
  - Jalan M. Yamin;
  - Jalan Sultan Agung;
  - Jalan Sultan Thaha;
  - Jalan Raden Pamuk; dan
  - Jalan Yos Sudarso.
- 6) Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan:
- Jalan Baru Akses Bandara Sultan Thaha Jambi;
  - Jalan Akses Bandara Bungo; dan
  - Jalan akses Bandara Depati Parbo Kerinci.
- b. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan:
- 1) Jalan akses pelabuhan Ujung Jabung yang meliputi ruas jalan:
- Simpang Pudak - Suak Kandis - Batas Kabupaten MuaroJambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Ujung Jabung.
- 2) Jalan akses Pelabuhan Kuala Tungkal yang meliputi ruas jalan:
- Simpang Tuan – Batas Kabupaten Muaro Jambi/TanjungJabung Barat;
  - Batas Kabupaten Muaro Jambi – Pematang Lumut;
  - Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal;
  - Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal;
  - Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal;
  - Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan
  - Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
- 3) Jalan akses pelabuhan Muara Sabak yang meliputi ruas jalan:
- Jln. Batanghari II – Simpang Pelabi/ Zona V; dan
  - Simpang Pelabi/ Zona V - Muara Sabak – Simpang Muara Sabak.
- 4) Jalan akses Pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi - Talang Duku. Jalan Akses Candi Muaro Jambi yang meliputi ruas jalan:
- Simpang Berembang - Simpang Jambi Kecil;
  - Simpang Jambi Kecil - Simpang Candi Muaro Jambi/ Desa Baru; dan
  - Simpang Candi Muaro Jambi/ Desa Baru - Candi Muaro Jambi.
- c. Jaringan Jalan Kolektor, yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kota pusat pelayanan (ibukota kabupaten) dan sarana pemasaran(pelabuhan).
- 1) Jaringan jalan kolektor (K1) di Provinsi Jambi meliputi :



- a) Jalan Penghubung (*Feeder Road*) II Muara Tembesi –Sarolangun yang meliputi ruas jalan:
- Muara Tembesi – Batas Kabupaten Batang Hari/KabupatenSarolangun;
  - Batas Kabupaten Batanghari/Sarolangun – Pauh; danPauh Sarolangun.
- b) Jalan Penghubung (*Feeder Road*) III Bangko – Sungai Penuh –Batas Sumbar yang meliputi ruas jalan:
- Jalan Makalam Bangko;
  - Jalan M. Yamin Bangko;
  - Bangko – Sungai Manau;
  - Sungai Manau – Batas Kerinci;
  - Batas Kerinci – Sanggaran Agung;
  - Sanggaran Agung – Sungai Penuh;
  - Jalan RE. Martadinata Sungai Penuh;
  - Jalan Kapten Muradi Sungai Penuh;
  - Jalan Imam Bonjol Sungai Penuh;
  - Jalan Pangeran Diponegoro Sungai Penuh;
  - Jalan Jend. Ahmad Yani Sungai Penuh;
  - Jalan Soekarno Hatta Sungai Penuh;
  - Sungai Penuh – Batas Sumbar /Jambi (Tapan);
  - Sungai Penuh – Siulak Deras; dan
  - Siulak Deras – Batas Sumbar/Jambi (Letter W).
- c) Jalan Penghubung Antar Pusat Kegiatan yang meliputi ruas jalan:
- Simpang Tempino - Batas Muaro Jambi/Batang Hari;
  - Batas Muaro Jambi/Batang Hari – Simpang Panerokan;
  - Simpang Panerokan – Batas Kota Muara Bulian;
  - Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian;
  - Jalan Lingkar Bungo;
  - Simpang Niam - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten TanjungJabung Barat;
  - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Lubuk Kambing – Merlung; dan
  - Talang Duku – Manis Mato - Desa Sogo/Suak Kandis.
- 2) Jaringan Jalan Kolektor (K2) di Provinsi Jambi meliputi:
- a) Jalan Penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:

- Muara Sabak – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kuala Tungkal;
- Sanggaran Agung – Jujun;
- Jujun - Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh;
- Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh - Sungai Penuh;
- Sungai Saren - Teluk Nilau – Senyerang;
- Senyerang - Mekarjati/Batas Riau;
- Sengkati Gedang - Batas Kabupaten Batanghari/KabupatenTanjung Jabung Barat;
- Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat– Merlung;
- Senyerang - Tebing Tinggi - Simpang Kuala Dasal;
- Simpang Sawmill - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
- Batas Kabupaten Bungo/KabupatenTebo-Simpang Logpon;
- Simpang Ahok- Simpang Pasar- Bumi Perkemahan;
- Simpang Jelatang-Batas Kabupaten Merangin/KabupatenSarolangun;
- Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun-Mentawak Baru-Simpang Pematang Kabau;
- Simpang Kuamang - Batas Kabupaten Merangin/KabupatenBungo;
- Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
- Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo-Simpang BetungBedarah;
- Simpang Penerokan Batas Kabupaten MuaroJambi/Kabupaten Batang Hari;
- Batas Muaro Jambi/Batanghari-Sungai Bahar-Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
- Batas Muaro Jambi/Batanghari-Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Sarolangun;
- Durian Luncuk Batas Kabupaten Batanghari/Sarolangun-Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Sarolangun;
- Batas Batanghari/Sarolangun-Simpang Durian Luncuk;
- Simpang Pelawan-Batas Kabupaten Sarolangun/KabupatenMerangin;
- Jangkat-Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun;
- Simpang Pulau Rengas-Jangkat;
- Simpang Sungai Duren-Batas Kabupaten MuaroJambi/Kabupaten Batang Hari;
- Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari-Sungai Buluh;

- Simpang Lagan-Simpang Pelabi/Zona V;
- Pandan Jaya-Muara Sabak;
- Desa Simpang-Simpang Muara Sabak;
- Jujun-Lempur;
- Muara Tebo-Simpang Logpon;
- Simpang Logpon- Tanjung;
- Muara Bungo-Peninjau;
- Peninjau- Tuo Limbur;
- Tuo Limbur- TKA (Batas Sumbar/Jambi);
- Peninjau-Junction;
- Pauh- Lubuk Napal-Sepintun-Batas Sumsel/Jambi;
- Pauh-Simpang Pematang Kabau;
- Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun-Simpang Pematang Kabau;
- Simpang Margoyoso-Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun; dan
- Simpang Merkeh- Air Batu (Akses Geopark Merangin).

d. Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol),

- 1) Jaringan jalan tol di wilayah Provinsi Jambi meliputi ruas jalan Batas
- 2) Jambi/Sumatera Selatan-Tempino-Muara Jambi-Tanjung Jabung
- 3) Barat-Batas Riau yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan
- 4) Ruas Indralaya (Sumatera Selatan)-Betung-Tempino-Jambi-Rengat (Riau).

e. Jalan Khusus,

Jaringan jalan khusus di Provinsi Jambi meliputi ruas jalan:

- 1) Kabupaten Sarolangun-Kabupaten Batanghari-Kabupaten Muara Jambi-Ujung Jabung; dan
- 2) Kabupaten Tebo-Kabupaten Batanghari-Taman Raja/PelabuhanDagang (Tanjung Jabung Barat).

#### **2.3.4.1 Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)**

Untuk pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) berupa pelabuhan sungai yang dikembangkan di Provinsi Jambi, meliputi:

- a. pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari;
- b. pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
- c. pelabuhan Muara Bungo di Kabupaten Bungo pelabuhan Pauh, pelabuhan Mandiangin dan pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
- d. pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

- e. pelabuhan Tungkal Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menunjang operasional pengembangan pelabuhan sebagaimana disebut diatas dikembangkan Alur transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan sebagai berikut:

- a. Alur Sarolangun – Pauh – Mandiangin - Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang; dan
- b. Alur Muaro Bungo – Muara Tebo – Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang.

#### **2.3.4.2 Sistem Jaringan Perkeretaapian**

Rencana pembangunan jaringanangkutan Kereta Api Provinsi Jambi merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Sumatera Railway*) yang menghubungkan:

- a) Batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi –Muara Bulian - Jambi;
- b) Lubuk Linggau – Sarolangun – Bangko – Muaro Jambi;
- c) Batas Sumatera Selatan – Tempino - Jambi – Sengeti – Merlung – Batas Riau;
- d) Muara Tembesi –Pauh - Sarolangun;
- e) Muara Tebo – Merlung – Kuala Tungkal; dan
- f) Jambi – Muara Sabak – Sungai Lokan.

Prasarana perkeretaapian meliputi:

- a) Stasiun Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
- b) Stasiun Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
- c) Stasiun Merlung dan Stasiun Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d) Stasiun Muara Sabak dan Stasiun Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e) Stasiun Sengeti dan Stasiun Tempino di Kabupaten Muaro Jambi;
- f) Stasiun Kota Jambi di Kota Jambi;
- g) Stasiun Muara Bulian dan Stasiun Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
- h) Stasiun Pauh dan Stasiun Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; dan
- i) Stasiun Bangko di Kabupaten Merangin.

#### **2.3.4.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi laut di wilayah pantai timur Provinsi Jambi diprioritaskan pada pengembangan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi sebagai pelabuhan utama.

Pengembangan pelabuhan laut di Provinsi Jambi meliputi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang dikembangkan, meliputi:

- a. Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pelabuhan Pengumpul terdiri dari Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Pelabuhan pengumpan terdiri dari Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 2.3.4.4 Sistem Jaringan Transportasi Udara

Bandara Sultan Thaha yang akan datang dapat dilakukan pengembangan sehingga memiliki jalur penerbangan alternatif yang menghubungkan Jambi dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera khususnya ibukota Provinsi serta daerah lainnya di Indonesia dan menghubungkan pula Provinsi Jambi dengan wilayah yang tergabung dengan IMT/GT (Indonesia–Malaysia–Thailand/GrowthTriangle).

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi dan keselamatan penerbangan; dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan industri di Provinsi Jambi dibagi menjadi 2 kelompok industri berdasarkan skala industri yaitu Industri Besar dan Industri Kecil dan Menengah. Pembangunan Industri Menengah dan Besar bisa kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.34 Data Industri Menengah dan Besar Provinsi Jambi**

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kap	Satuan	
<b>INDUSTRI MENENGAH</b>						
1	PT. TIRTA UTAMA "AGUEN"	Kec. Kumpeuh Ulu Kab. Muara Jambi	2001	80.000	ton/th	AMDK
2	PT. Cinta Saudara	Kec. Jambi selatan Kota Jambi	2011	400	Dus	AMDK

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kap	Satuan	
<b>INDUSTRI MENENGAH</b>						
3	CV. GEMILANG SEGAR PRIMA ("168")	Kec. Kumpeuh Ulu Kab. Muara Jambi		7.200	Galon/th	AMDK
4	OEGAR	Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci	2006	5.000	liter/th	AMDK
5	PT. TALANG LINDUNG SAKTI	Talang Lindung Kota Sungai Penuh	2010	700.000	gelas	AMDK
6	PT. AFRESH INDONESIA (VIR DAN WIGO)	Ds. Kota Karang Kab. Muara Jambi	2009	15.000	m3/th	AMDK
7	PT. LINGGA HARAPAN	Kp. Sejinjang RT 04 Kota Jambi		14.000.000	liter/th	AMDK
8	PT. SUMBER TIRTA LESTARI (AQ8)	Ke. Sei Gelam Kab. Muara Jambi		28.800	Galon/th	AMDK
9	ARBES GUNTUNG PERKASA	Kabupaten Bungo				AMDK
10	PT. INTI TIMUR RAYA	Dusun karya Lestari 1 Kab. Tanjab Barat				AMDK
11	PT. TIRTA UTAMA JAYA	Jln. Lintas Jambi km 8 kab bungo				AMDK
12	CV. TIRTA GAJAH CEMERLANG (ARNURES)	Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat				AMDK
13	PT. MAROSI KARYA UTM	Kec. Pelawan Kab. Sarolangun	2022	42	bh/th	Bak truk
14	PT. BUNGO PERMAI LESTARI	Kel Dusun Manggir Kab. Bungo		13.000	unit/th	Bigland
15	PT. BUDI SARI BUMI	Ds. Talang Duku Kab. Muara Jambi	2009	200	ton/th	Bihun Jagung
16	PT. Buana Era Sentosa Timbers	Kec. Pamayung Kab. Batang Hari	2002			Moulding (Finger Joint), Scanting /Laminting
17	CV. KARYA ABADI	Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	2002	8.000	m3/th	Moulding (Finger Joint), Scanting /Laminting
18	PT. SUMINDO DAKSINA PERMAI	Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi		6.500	m3/th	
19	PT. MAKMUR UTAMA	Gurun Mudo Mandiangin Kab. Sarolangun	2001	1.500	m3/th	Moulding
20	PT. BELATO JAYA	Kec. Pauh Kab. Sarolangun	2000	2.300	m3/th	Moulding

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kap	Satuan	
<b>INDUSTRI MENENGAH</b>						
21	TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA	Jl.berdikari no 2 Kota Jambi				Moulding
22	PT. TEGAR NUSANTARA INDAH	Kec. Kumpeh Kab. Sarolangun	22-Mar-11	500	m3/th	Moulding
23	CV. WANA JAYA	Kec. Ma. Bulian Kab. Batanghari		3.000	m3/th	Sawmill
24	CV. BUANA GUNA	Kec. Ma. Tembesi Kab. Batanghari		3.000	m3/th	Sawmill
25	CV. ALAM KUSUMA	Kec. Batihn XXIV Kab. Batanghari		1.500	m3/th	Sawmill
26	CV. H. ROZALI BERSAUDARA	Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi		6.000	m3/th	Sawmill
27	BINTANG KARTIKA	Desa Sekenan Kab. Muaro Jambi		900	m3/th	Sawmill
28	CV. BAIJURI H. HAMIM	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		3.000	m3/th	Sawmill
29	PT. LINGGA KHARISMA JAYA	Desa Sekenan Kab. Muaro Jambi		2.500	m3/th	Sawmill
30	CV. SABDA KREASI	Kec. Ma. Bulian Kab. Batanghari		2.100	m3/th	Sawmill
31	HENDI SAWMILL	Kec. Ma. Tembesi Kab. Batanghari		1.500	m3/th	Sawmill
32	CV. SRI UNTUNG SAWMILL	Kec. Ma Bulian Kab. Batanghari		1.500	m3/th	Sawmill
33	RIMBA HARAPAN SAWMILL	Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat		6.000	m3/th	Sawmill
34	CV. NEFO AAA	Kec. Jelutung Kota Jambi	1991	1.000	ton/th	KOPI BUBUK
35	PD KOPI BUBUK CAP AYAM	Jl.raden wijaya rt 35 kota Jambi				KOPI BUBUK
36	KOPI PAMAN	Jl.berdikari Kota Jambi				KOPI BUBUK
37	PD SUMBER MAS	Jl.orang kayo pinai kel.payo selincah kota jambi				KECAP
38	DAYA CIPTA SERVICE	Jl. Mayor A Marzuki Kota Jambi	2000	6.000	unit/th	Las/Bubut

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kap	Satuan	
<b>INDUSTRI MENENGAH</b>						
39	PT. PRIMA SARI JADI	Kec. Mendahara Kab. Tanjabtim	1988	15.000	ton/th	Minyak Kelapa&Bungkil Kelapa
40	PT. PRIMA MAKMUR ABADI	Tungkal Harapan Kab. Tanjabbar	2001	10.000	ton/th	Minyak Kelapa&Bungkil Kelapa
41	PT. SUMBER WARAS KARYA PRATAMA	Kec. Tungkal Kab. Tanjab Barat	2012	12.000	ton/th	Minyak Kelapa&Bungkil Kelapa
42	SUMBER HARAPAN SENTOSA	Jl. Harapan Kab. Tanjab Barat	2012	72	ton/th	Minyak Kelapa&Bungkil Kelapa
43	JAMBI OKSIGEN	Jl. Lingkar Selatan Kota Jambi		2.500	m2/th	Pengisian Oksigen
44	PT. BINTANG BATANGHARI	Jl. Semeru Kota Jambi		432.000	m2/th	Pengisian Oksigen
45	PT. DEMANG KARYA MANDIRI	Kel. Orang Kota Jambi				Percetakan
46	PT. JAMBI MEDIA GRAFIK	Kel Pal Merah Lama Kota Jambi				Percetakan
47	PT. WAHANA SEMESTA BUTE	Kel. Tambak Sari Kota Jambi		6.000.000	m2/th	Percetakan
48	PT. WAHANA SEMESTA SAMI SARKAWI	Jl. Kapten Patimura Kota Jambi		3.600	m2/th	Percetakan
49	CV. GIANTIRA	Kel. Sei Putri Kota Jambi		12.000	m2/th	Percetakan
50	PT. DAHLIA 2	Jl. Prof. M. Yamin Kab. Bungo	2002	1.000.000	lbr/th	Cetak Photo
51	BALI PHOTO	Jl. DR. Wahidin Kota Jambi		9.000	rol/th	Cetak Photo
52	CV. JAYA ABADI	Kec. Tabir Kab. Merangin		2.400	m3/th	Split (Batu Pecah)
53	PT. MERANGIN KARYA	Kec. Pamenang Kab. Merangin		3.600	m3/th	Split (Batu Pecah)
54	BRIAN ONGTAVIUS	Kec. Bangko Kab. Merangin		1.800	m3/th	Split (Batu Pecah)
55	KOP. PRIMKOPAD	Kec. Bathin Kab. Sarolangun		23.000	m3/th	Split (Batu Pecah)
56	PT. SINAR BAHRI CERIA	Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun		21.000	m3/th	Split (Batu Pecah)



No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kap	Satuan	
<b>INDUSTRI MENENGAH</b>						
57	HARAPAN JAYA	Kec. Siulak Kab. Kerinci	1999/2002	10	ton/th	Steak Kayu Manis
58	SEMOGA JAYA	Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci	2004	43.200	kg/th	Steak Kayu Manis

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
1	PT. IGASAR	Jl. Lingkar Selatan Kota Jambi	2009	96.000	m2/th	Barang dari semen
2	PT. KUMALA BAHARI DOKYARD	Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi	2001	2.400	wwt/th	Repair Kapal
3	PT. NAGA CIPTA SENTRAL	Galangan Perkantoran Kab. Muaro Jambi		3.000	wwt/th	Repair Kapal
4	PT. SABANG RAYA INDAH	Galangan Kapal Kuningan Kab. Muaro Jambi		3.000	wwt/th	Repair Kapal
5	PT. PRABINA AULIA SARANA	Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi		1.500	DWT	Repair Kapal
6	PT. Sabak Indah	Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur	1982	50.000	ton/th	UreA Fmd 60.000 ton/th& Phenol Formaldehid 12.000/th
7	PT. PUTRA SUMBER KIMINDO	Ds. Sarag Burung Kab. Ma. Jambi	2000			Lem
8	PT. ANEKA BUMI PRATAMA	Ds. Kubu Kandang Kab. Batanghari	2006	72.000	ton/th	Crumb Ruber
9	CV.MUARO JAMBI SEJATI	Jln talang PT kerinci kab.M.Jambi				Crumb Rubber
10	PT KIRANA SEKERNAN	Jl.lintas timur km 54 kab.Ma.Jambi				Crumb Rubber
11	PT.STAR RUBBER JAMBI	Jl.Trans sumatra km 54 kab.Bungo				Crumb Rubber
12	PT. MEGASAWINDO PERKASA	Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo	2004/2005	48.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
13	PT. JAMBI WARAS JUJUHAN	Jl. Lintas Sumatera Kab. Bungo	1992/1998	80.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
14	PT. ANUGERAH BUNGO LESTARI	Kec. Pelepet Kab. Bungo	2004	45.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
15	PT. ANGKASA RAYA JAMBI	Jl.KH.A. Tom Kota Jambi	1962/1963	24.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
16	PT. HOKTONG	Kamp. Sejinjang Kota Jambi	1969/1973	28.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
17	PT. BATANGHARI TEMBESI	Kec. Jambi Timur Kota Jambi		30.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
18	PT. REMCO JAMBI	Kamp. Tanjung Johor Kota Jambi		36.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
19	PT. JAMBI WARAS	Kel. Tanjung Johor Kota Jambi		60.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
20	PT. GOLDEN ENERGI	Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun	2006	80.000	ton/th	Crumb Ruber(SIR 20)
21	PT. GEMA NUSA LESTARI	Kec. Ma. Tembesi Kab. Batanghari	2008	90.000	m3/th	Kayu Lapis
22	PT. PUTRA SUMBER UTAMA	Desa Sarang burung Kab. Muaro Jambi	1980	514.000	m3/th	Kayu Lapis
23	PT. SUMATERA MAS PLYWOOD	Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi		25.000	m3/th	Kayu Lapis
24	PT. DUREN MANDIRI FORTUNA	Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi		10.000	m3/th	Kayu Lapis
25	PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER IND	Jl.Ir Juanda Kab. Tanjab Barat	1992/1994			Pulp dan Kertas
26	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	Kec. Kota Baru Kota Jambi				Mie instan
27	PT. AIP	Kec. Tabir Kab. Merangin		138.000	ton/tahun	Minyak goreng
28	PT. Budi Nabati Perkasa	Jl. Raya Pelabuhan Talang Duku Kab. MA Jambi	2003	160	ton/hari	M. goreng & sabun barangan kompas
29	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Desa Talang Duku Kab. Ma Jambi		72	ton/jam	Minyak goreng
30	PT. PELITA	Desa Talang Duku Kab. Ma Jambi				Minyak goreng
31	PT. BINTANG BATANGHARI	Kel. Payo Selincah Kota Jambi		432.000	m2/th	Pengisian Oksigen
32	PT. WAHANA SEMESTA SARKO	Kel. Tambak Sari Kota Jambi		6.000.000	m2/th	Percetakan

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapabilitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
33	PT. JAMBI PRESS INTERMEDIA	Jl. Kapten Patimura Kota Jambi		3.600.000	m <sup>2</sup> /th	Percetakan
34	PT. ASIATIC PERSSADA	Kec. Mersam Kab. Batanghari	2011	45	ton/jam	CPO dan Kernel
35	PT. DELIMA MUDA PERKASA	Kec. Mersam Kab. Batanghari	2009/2010	80	ton/jam	CPO
						Kernel
36	PT. HUMASINDO MAKMUR SEJATI	Ds. Ampelu Mudo Kab. Batanghari	2009/2010	15	ton/jam	CPO
						Kernel
37	PT INTI INDOSAWIT SUBUR	Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat		60	ton/jam	Kernel
38	PT. KEDATON MULIA PRIMAS	Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari	2011	45	ton/jam	CPO
						Kernel
39	PTPN VI AUR GADING	Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari		30	ton/jam	CPO dan Kernel
40	PT. BINA MITRA MAKMUR	Kec. Bathin II Kab. Bungo		45	ton/jam	CPO dan Kernel
41	PT. JAMIKA RAYA	Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo		60	ton/jam	CPO dan Kernel
42	PT MEGASAWINDO PERKASA	Kec. Pelepat Kab. Bungo	2006/2007	80	ton/jam	CPO dan Kernel
43	PT. SARI ADITYA LOKA 2&3	Kec. Pelepat Kab. Bungo	1996/1997	60	ton/jam	CPO dan Kernel
44	PT. GRAHA CIPTA BANGKO JAYA	Ds. Karang Anyar Kab. Merangin	2005	90	ton/jam	CPO
						Kernel
45	PT. KRESNA DUTA AGROINDO	Jl. Lintas Sumatera Km.25 Kab. Merangin	1993/1994	30	ton/jam	CPO
						Kernel
46	PT. KRESNA DUTA AGROINDO PKS-LANGLING	Ds. Langling Merangin Kab. Merangin	2006	60	ton/jam	CPO dan Kernel
47	PT. SARI ADITYA LOKA 1	Kec. Tabir Kab. Merangin	1995	60	ton/jam	CPO dan Kernel
48	PT. AGRINDO INDAH PERSADA	Kec. Tabir Kab. Merangin	2006	4.000	ton/jam	CPO dan Kernel
49	PT. ANGSO DUO SAWIT	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		45	ton/jam	CPO dan Kernel
50	PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA	Kec. Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi		40	ton/jam	CPO dan Kernel
51	PT. BAHARI GEMBIRA RIA	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		30	ton/jam	CPO dan Kernel

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapabilitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
52	PT. BICON AGRO MAKMUR	Desa Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi		60	ton/hari	CPO dan Kernel
53	PT. BRAHMA BIMA BAKTI	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		60	ton/hari	CPO dan Kernel
54	PT. BUKIT BINTANG SAWIT	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		20	ton/hari	CPO dan Kernel
55	PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		40	ton/hari	CPO dan Kernel
56	PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA	Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi		45	ton/jam	CPO dan Kernel
57	PT. KIRANA SEKERMEN	Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi		60	ton/hari	CPO dan Kernel
58	PTPN VI TANJUNG LEBAR	Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi		60	ton/jam	CPO dan Kernel
59	PTPN VI BUNUT	Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi		60	ton/hari	CPO dan Kernel
60	PTPN VI PINANG TINGGI	Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi	1981	60	ton/jam	CPO dan Kernel
61	PT. PETALING MANDRA GUNA	Ma. Jambi		30	ton/jam	CPO dan Kernel
62	PT. RICKY KURNIAWAN	Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi	2011	45	ton/hari	CPO dan Kernel
63	PT. SUMBERTAMA NUSAPERTIWI	Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi		30	ton/hari	CPO dan Kernel
64	PT TRI MITRA LESTARI	Desa purwodadi Tanjab barat				CPO dan Kernel
65	PT SUMBER GUNA NABATI	Dusun IV kab.Merangin				CPO dan Kernel
66	PT SAWIT JUJUAN ABADI	Lintas Sumatra KM 11 kab.Bungo				CPO dan Kernel
67	PT.ASIA SAWIT PT.MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA	Batanghari jambiriau desa pelabuhan dagang				CPO dan Kernel
68	PT INTI GUNA NABATI	Desa lubuk sayak kab.Sarolangun				CPO dan Kernel
69	PT.CITRA SAWIT HARUM	Dusun Sungai Beringin Kab.Bungo				CPO dan Kernel
70 71	PT.AGRO INDAH PERDASA	Jl.lintas sumatrakab merangin				CPO dan kernel

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
72	PT BAHANA KARYA SEMESTA	Kel Pauh,Kab. Sarolangun				CPO dan Kernel
73	PT.BERKAT SAWIT UTAMA	Desa bangku bajubang BT.Hari				CPO dan Kernel
74	PT.BRAHMA BINA BAKTI	Desa suko awin jaya kab.Ma.Jambi				CPO dan Kernel
75	PT.PELITA SARI PRIMA JADI	Kec.Mendahara, Kab Tanjab Timr				CPO dan Kernel
76	PT. ERA MITRA AGRO LESTARI	Kec. Air Kab. Sarolangun	2006	60	ton/hari	CPO dan Kernel
77	PT. KRESNA DUTA AGROINDO	Ds. Sei Palakar Kab. Sarolangun		61	ton/jam	CPO dan Kernel
78	PT. BAHANA KARYA SEMESTA	Ds. Pauh Kab. Sarolangun		60	ton/jam	CPO dan Kernel
79	PT PRODUK SAWITINDO JAMBI	Pelabuhan Dagang Kab. Tanjung Jabung Barat		45	ton/jam	CPO dan Kernel
80	PT. ANEKAPURA MULTIKERTA	Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat		30	ton/jam	CPO dan Kernel
81	PT. RUDI AGUNG LEKSANA	Jl. Lintas Timur Km. 3 Dusun Kab. Tanjung Jabung Barat	2009	45	ton/jam	CPO dan Kernel
82	PT. PALMA ABADI	Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat		45	ton/jam	CPO dan Kernel
83	PT. INTI INDOSAWIT SUBUR	Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat		60	ton/jam	CPO dan Kernel
84	PT. TRIMITRA LESTARI	Kec. Tungkai Ulu Kab. Tanjab Barat	2001/2002	60	ton/jam	CPO dan Kernel
85	PPT. AGRO MITRA MADANI	Kec. Tungal Kab. Tanjung Jabung Barat		60	ton/jam	CPO dan Kernel
86	PT. ITRA KOPERASINDO TANI	Dusun Rantai Badak Kab. Tanjung Jabung Barat		80	ton/jam	CPO dan Kernel
87	PT. DASA ANUGERAH ABADI	Kec. Bukit Asam Kab. Tanjung Jabung Barat		45	ton/jam	CPO dan Kernel
88	PT. MITRA SAWIT JAMBI	Jl. Lintas Timur Km 101 Kab. Tanjung Jabung Barat		45	ton/jam	CPO dan Kernel
89	PT. RUGINAS AGRI UTAMA	Kec. Sumay Kab. Tebo	2006/2007	30	ton/jam	CPO Kernel

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Berdiri	Kapabilitas Produksi		Jenis Produksi
				Kapasitas	Satuan	
<b>INDUSTRI BESAR</b>						
90	PT. NUSANTARA VI RIMBU	Ds. Pematang Sapat Kab. Tebo		30	ton/jam	CPO dan Kernel
91	PT. TEBO PLASMA INTI LESTARI	Ds. Pelayang Kab. Tebo		40	ton/jam	CPO dan Kernel
92	PT. SATYA KISMA USAHA	Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo	2005	30	ton/jam	CPO Kernel
93	PT. SALSABILA RIZQY PRATAMA	Kec. Kerinci Kab. Kerinci	1997			AA Stick
94	UD. NABILA CASIA	Kec. Siluang Kab. Kerinci	2009/2012	60	ton/tahun	Steak Kayu Manis
95	PTP. NUSANTARA VI KAYU ARO	Ds. Bedeng VII Kayu Aro Kab. Kerinci	1925 - 1928	19.000	kg teh jadi	Pucuk teh Basah

Sumber : Data Olahan

Disamping industri besar dan menengah tersebut ada juga yang dikategorikan ke dalam Industri Kecil dan Menengah yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sektor industri pengolahan yang berbasis pada keberadaan bahan baku lokal dan kemampuan dari SDM lokal di Provinsi Jambi. Jumlah usaha sektor IKM yang sangat banyak dan beragam menjadikan sektor IKM adalah sektor yang tangguh dan tidak mudah di tempa krisis ekonomi. Untuk sektor IKM di Provinsi Jambi bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.35 Rekap Data Industri Kecil Menengah Provinsi Jambi 2019**

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Kerinci	3.665	7.349	87.132.442
2	Kota Sei Penuh	2.363	11.006	1.145.535.576
3	Bungo	3.454	11.320	455.424.660
4	Sarolangun	1.404	5.464	620.914.247
5	Tebo	2.145	6.693	316.161.257
6	Merangin	4.404	14.926	1.352.639.146
7	Batanghari	2.277	8.104	8.351.641.589
8	Muaro Jambi	1.054	12.290	896.861
9	Tanjab Barat	766	2.734	52.358.588
10	Tanjab Timur	1.301	4.151	312.037.722
11	Kota Jambi	6.190	30.087	1.420.038.397
Total		29.023	114.124	14.114.780.485

**a. Arah dan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) antara lain;**

- Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM agar: (1) berdaya saing; (2) berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; (3) berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan (4) menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor;
- Untuk mewujudkan IKM tersebut dilakukan (1) perumusan kebijakan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pemberian fasilitas.
- Dalam rangka merumuskan kebijakan, Menteri menetapkan prioritas pengembangan IKM dengan mengacu pada (1) sumber daya Industri daerah; (2) penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan (3) perkembangan ekonomi nasional dan global.
- Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui: (1) peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan (2) kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan.
- Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:
  - peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
  - bantuan dan bimbingan teknis;
  - bantuan bahan baku dan bahan penolong;
  - bantuan mesin atau peralatan;
  - pengembangan produk;
  - bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (menuju industri hijau);
  - bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
  - akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
  - penyediaan KI untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
  - pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM, IK dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas kepada IKM.

#### **b. Industri Hijau**

- Untuk mewujudkan Industri Hijau, Pemerintah (Menteri) melakukan penyusunan dan penetapan Standar Industri Hijau yang memuat: (1) bahan baku, bahan penolong, dan energi; (2) proses produksi; (3) produk; (4) manajemen perusahaan; dan (5) pengelolaan limbah.
- Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.
- Penerapan Industri Hijau secara bertahap oleh Menteri dapat diberlakukan secara wajib.
- Perusahaan Industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau diberikan Sertifikat Industri Hijau.
- Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib dikenai sanksi administratif: peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan dan atau pencabutan IUI.

#### **c. Industri Strategis**

- Industri Strategis dikuasai oleh negara.
- Industri Strategis terdiri atas industri yang: (1) memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; (2) meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan atau (3) mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- Penguasaan Industri Strategis oleh negara dilakukan melalui (1) pengaturan kepemilikan; (2) penetapan kebijakan; (3) pengaturan perizinan; (4) pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan (4) pengawasan.
- Pengaturan kepemilikan Industri Strategis dilakukan melalui: (1) penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah; (2) pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau (3) pembatasan kepemilikan oleh PMA
- Penetapan kebijakan Industri Strategis paling sedikit meliputi: (1) penetapan jenis Industri strategis; (2) pemberian fasilitas; dan (3) pemberian kompensasi kerugian.
- Izin usaha Industri Strategis diberikan oleh Menteri.
- Pengaturan produksi, distribusi dan harga dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi dan harga produk.



- Pengawasan meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.

**d. Penguasaan oleh Negara/Kepemilikan oleh WNI dilakukan melalui:**

- penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
- pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta;
- pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing;
- Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI.

**e. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri**

- `Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.
- `Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk: (1) pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional; (2) pembukaan akses pada sumber daya Industri; (3) pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan (4) peningkatan investasi.

**1) Perizinan Perindustrian:**

- Setiap usaha Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
- IUI meliputi IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar .
- Industri Kecil (IK) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Industri Menengah (IM) dan Industri Besar (IB) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- Besaran jumlah tenaga kerja dan investasi untuk IK, IM, dan IB ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan SDA yang diwajibkan memiliki Amdal wajib memiliki Izin Perluasan.
- Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, ditetapkan oleh Presiden.
- Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia, ditetapkan oleh Presiden.
- Setiap usaha KI wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

- l. Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.
- m. Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri
- n. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di KI.
- o. Kewajiban berlokasi di KI dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: (1) belum memiliki KI; (2) telah memiliki KI, tetapi seluruh kaveling industri di dalam KI yang bersangkutan telah habis.
- p. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di KI juga berlaku bagi: (1) IKM yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau (2) Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, yang ditetapkan oleh Menteri.
- q. Perusahaan Industri yang dikecualikan berlokasi di KI dan Perusahaan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, wajib berlokasi di KPI.

## **2) Penanaman Modal Bidang Industri:**

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- b. Untuk mendorong penanaman modal di bidang industri, Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai: (1) strategi penanaman modal; (2) prioritas penanaman modal; (3) lokasi penanaman modal; (4) kemudahan penanaman modal; dan (5) pemberian fasilitas.

## **3) Peran Serta Masyarakat:**

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- b. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: (1) pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau (2) penyampaian informasi dan/atau laporan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.
- d. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.
- e. Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Pengawasan dan Pengendalian:**

- a. Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- c. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri paling sedikit meliputi: (1) sumber daya manusia Industri; (2) pemanfaatan sumber daya alam; (3) manajemen energi; (4) manajemen air; (5) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; (6) Data Industri dan Data Kawasan Industri; (7) Standar Industri Hijau; (8) Standar Kawasan Industri; (9) Perizinan Industri dan perizinan KI; dan (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB III**

# **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

### **3.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi**

#### **3.1.1 Visi Pembangunan Industri**

Berbagai isu nasional dan global di wilayah Jambi seperti melimpahnya potensi sumber daya alam alami maupun budidaya seperti potensi karet dan sawit. Provinsi Jambi termasuk produksi karet dan sawit terbesar di Indonesia, juga potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang melimpah, isu lainnya adalah melimpah dan luasnya lahan produksi perkebunan sawit, karet dan kelapa di wilayah Jambi seharusnya mampu memicu aktivitas industri pengolahan yang cukup besar dan berdampak secara regional maupun secara nasional. Isu lainnya adalah dekatnya wilayah Jambi dengan sumber bahan baku tambang yang mempunyai nilai tambah sangat tinggi yaitu batubara dengan kualitas tinggi dimana sumber bahan tambang bisa di peroleh dari bebarapa kabupaten di Provinsi Jambi dimana hal tersebut bisa memicu aktivitas industri yang memerlukan keterdukungan sumber bahan baku energi yang berkelanjutan.

Melihat dari isu dan potensi yang dimiliki tersebut, maka Pembangunan sektor industri di Provinsi Jambi mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 yaitu **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”** serta Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu ***Jambi TUNTAS 2021***. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jambi dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jambi Tahun 2020–2040 adalah:

***“Menjadikan Industri di Provinsi Jambi yang Mandiri, Berdaya Saing, Berdampak Perekonomian Nasional, Ramah Lingkungan, Berkelanjutan serta Mampu Mensejahterakan Masyarakat”***

Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya alam yang diolah

Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Kesejahteraan diartikan bahwa pembangunan industri dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **3.1.2 Misi Pembangunan Industri**

Untuk dapat mencapai Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki sebagai bahan baku industri;
2. Mengembangkan inovasi dan teknologi sehingga berperan sebagai rantai pasok produk nasional;
3. Berperan sebagai pendorong utama industri nasional;
4. Berkomitmen mendukung industri hijau (*Green Industri*) ramah lingkungan dan berkelanjutan;
5. Menciptakan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Jambi**

### **3.2.1 Tujuan Pembangunan Industri**

Berdasarkan Visi dan Misi maka Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jambi adalah

1. Meningkatkan peran sektor industri sehingga dapat menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Dapat tercipta kemampuan daya saing yang tinggi melalui penguasaan teknologi dan manajemen dalam akses pasar global maupun pasar dalam negeri serta kemampuan memanfaatkan peluang bisnis yang ada;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, serta praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab;
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan;
5. Meningkatkan daya saing industri dan daya saing investasi.

### 3.2.2 Sasaran Pembangunan Industri

Dalam rangka memenuhi berbagai target dan tujuan pembangunan industri di Provinsi Jambi, berbagai upaya yang direncanakan dan akan dilakukan dalam rentang waktu rencana tentu dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi dalam kurun lima tahun terakhir.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga konstan 2018, mencapai 142,99 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 136,55 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,64 %.

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan jembatan. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Pada sektor industri, penyumbang terbesar di tahun 2018 adalah Industri Makanan dan Minuman mencapai 8,03 triliun rupiah atau sebesar 38,67 %. Berikutnya Industri Batubara dan Pengilangan Migas sebesar 32,04 %, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya sebesar 11,34 %; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 7,67 %; dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 5,71 %. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima %.

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 19,63 triliyun rupiah menjadi 20,78 triliyun rupiah. Namun pertumbuhannya berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 3,55 % di tahun 2018 meningkat dari 3,02 di tahun 2017. Pada tahun 2018, hanya tiga lapangan usaha yang tumbuh lebih dari 4 %, yaitu Industri Batubara dan Pengilangan Migas (4,89 %); Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (4,33 %); dan Industri Makanan dan Minuman (4,29 %). Selain itu, pertumbuhannya kurang dari 4 %.

Dalam memenuhi target pembangunan sektor industri, maka Provinsi Jambi menetapkan **sasaran pembangunan sektor industri** Jambi yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
2. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industry hijau dan ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Memberikan kemudahan dalam memperoleh lokasi pembangunan industri, bagi investor melalui kerjasama dengan penyedia permodalan dan jaminan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang yang ada;
5. Mewujudkan iklim industri daerah dan daya saing investasi yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

**Tabel 3.1 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Jambi (Persen) 2014-2018**

Lapangan Usaha/Industri		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	31,83	31,68	30,78	31,09	32,04
2	Industri Makanan dan Minuman	36,09	36,01	38,78	39,04	38,67
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	10,92	12,01	11,40	11,28	11,34
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6,88	6,72	5,82	5,79	5,71
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	9,60	8,79	8,44	8,17	7,67
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,73	1,80	1,81	1,71	1,66
11	Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

14	Industri Alat Angkutan	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36
15	Industri Furnitur	2,05	2,14	2,11	2,06	2,07
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan peralatan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan/Manufacturing</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : BPS Prov. Jambi 2019

Dalam Rencana Pembangunan Industri Prioritas di Provinsi Jambi, ada tiga sektor industri yang harus diprioritaskan mendatang. Pertama, industri yang berbasis Perkebunan, Pertanian dan Perikanan (agro), kedua, Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Energi, Mineral dan Batubara, ketiga, Industri Olahan Barang Jadi atau Setengah Jadi dari Produk Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi.

Adapun industri prioritas Pengolahan Hulu Agro-berbasis kelapa sawit, Industri Hulu Agro/Aneka Industri-berbasis Karet Alam, Industri Pengolahan Kelapa Dalam serta Industri Pengolahan Hasil Hutan di Provinsi Jambi dalam pengembangannya bisa dilakukan dengan beberapa upaya. Diantaranya pengembangan rekayasa teknologi, baik Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Dalam serta Industri Pengolahan Ikan, maupun industri pengolahan kayu. Secara umum, arah kebijakan dalam memenuhi misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri di Provinsi Jambi terlihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi Jambi**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Peran sektor industri yang dapat menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.	Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah.	a. Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan komoditi unggulan.
		b. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dari sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi
2. Dapat tercipta kemampuan daya saing yang tinggi melalui penguasaan teknologi dan manajemen dalam akses pasar global maupun dalam negeri, serta kemampuan memanfaatkan peluang bisnis yang ada.	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru	a. Tersedianya teknologi proses dan teknologi industry pengolahan yang berperan sebagai rantai pasok produksi nasional.
		b. Terbangunnya institusi penyedia teknologi yang dapat dipergunakan oleh dunia industri.



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, serta praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri hijau dan ramah lingkungan dan berkelanjutan	a. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan IKM, yang ramah lingkungan
		b. Peningkatan Pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan, praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab.
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan	Memberikan kemudahan dalam memperoleh lokasi pembangunan industri, bagi investor melalui kerjasama dengan penyedia permodalan dan Jaminan Kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang yang ada.	a. Tersediaanya lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan industri secara refresentatif.
		b. Peningkatan kontribusi investasi dalam dan laur negeri dalam
		c. Tersediaanya skim kredit bagi IKM
5. Meningkatkan daya saing industri dan daya saing investasi	Mewujudkan iklim industri daerah dan daya saing investasi yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.	a. Tersediaanya sumberdaya manusia yang kompeten, produktifitas tinggi, dan mampu bersaing secara global, sebagai penggerak industri Provinsi Jambi
		b. Tersediaanya sarana untuk transfer knowledge , pengembangan inovasi dan kreatifitas, serta <i>link and match</i> antara Perguruan Tinggi dengan dunia industr

Sumber : Rencana 2017

Selain sasaran kualitatif seperti terlihat pada tabel diatas, maka sasaran kuantitatif pembangunan industri di Provinsi Jambi yang berdampak lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dalam semua sektor dan sub sektornya dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri di Provinsi Jambi**

No	Sasaran	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun			
				2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
1	Pertumbuhan sektor industri	%	4,77	7,1	8,6	10,1	11,6
2	Kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB	%	10,28	11,12	13,53	16,46	18,36
3	Nilai ekspor produk industri	US \$ Juta	1,99	2,46	2,89	3,05	2,72
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	116.960	135.089	148.457	163.457	165.766
Nilai investasi sektor industri							
5	Penanaman modal asing	US \$ Juta	2,80	2,64	2,90	3,19	3,51
6	Penanaman modal dalam negeri	Rp. Triliun	5,9	8,24	10,77	13,43	16,75

• **Pertumbuhan Sektor Industri Non Migas**

Laju pertumbuhan Sektor Industri Non Migas Provinsi Jambi menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 0,3-0,4 %. Pada tahun 2019, diperkirakan Industri Jambi akan tumbuh sebesar 4,75-5,15 %. Maka dengan mempertimbangkan berbagai asumsi yang ada, ditargetkan pertumbuhan industri Provinsi Jambi tahun 2040 mampu mencapai 11,6 %.

• **Kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB**

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi kurun lima tahun terakhir menunjukkan terjadi pertumbuhan yang sangat berfluktuatif pada kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB. Dalam dua tahun terakhir, ada kecenderungan terjadi penurunan share sektor industri. Hal ini diakibatkan berbagai kondisi ekonomi secara nasional dan regional yang turut mempengaruhi kinerja sektor industri. Berdasarkan asumsi yang berkembang tersebut, maka direncanakan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB Jambi 24,36 % hingga tahun 2040 mendatang.

• **Kontribusi Ekspor Produk Industri Terhadap Total Ekspor.**

Nilai total ekspor Provinsi Jambi selama tahun 2018 sebesar U\$ 93 juta, dari total tersebut sebesar U\$ 1,99 berasal dari produk industri seperti, minyak nabati, karet dan olahannya,

kayu lapis dan olahannya, arang, pulp dan kertas serta lainnya. Berdasarkan asumsi dan dengan mempertimbangkan kondisi hasil produk industri dari kelima komoditi dimaksud, kontribusi produk industri terhadap total ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2040 ditargetkan sebesar 3,72 %.

- **Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri**

Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jambi tumbuh cukup signifikan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, pertumbuhan jumlah tenaga kerja mencapai 5 %, dari sebanyak 105.999 orang menjadi 116.960 orang. Maka dengan mengasumsikan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja tersebut, diharapkan melalui penerapan rencana pembangunan industri yang terfokus, mampu meningkatkan laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 10 % setiap lima tahun. Sehingga ditargetkan, terjadi peningkatan tenaga kerja sektor industri sebesar 40 % dibandingkan tahun dasar 2018 di Provinsi Jambi.

- **Penanaman Modal Asing**

Investasi yang berkenaan dengan modal asing sangat dipengaruhi kondisi internal dan eksternal di dalam dan di luar negeri. Baik berskala nasional maupun lokal. Hal penting lain adalah kebijakan daerah atau regulasi pemerintah daerah yang dapat mempermudah akses bagi asing untuk berinvestasi, serta adanya insentif atau disinsentif yang dikenakan bagi investasi modal asing. Berdasarkan asumsi dan dengan mempertimbangkan kondisi investasi PMA selama 5 tahun terakhir, maka ditargetkan PMA di Provinsi Jambi tahun 2039 mencapai US \$ 3,51 juta

- **Penanaman Modal Dalam Negeri**

Laju Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jambi dalam 10 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2010-2011 mencapai 50,16 %. Laju pertumbuhan ini terus menurun hingga rata-rata sejak 4 tahun terakhir (2014-2018) menjadi 12,30 %. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, serta dengan perencanaan yang komprehensif pada pembangunan sektor industri yang berbasis PMDN dan PMA, maka diharapkan pertumbuhan penanaman modal dalam negeri hingga tahun 2040 tumbuh rata-rata 12,50 %. Sehingga ditargetkan nilai investasi PMDN tahun 2040 sebesar Rp 26,75 triliun atau meningkat 40 % dibandingkan tahun dasar 2018.

### **3.2.3 Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Pembangunan Industri Provinsi Jambi**

Dampak pertama dari penerapan strategi pembangunan industri pada wilayah Provinsi Jambi adalah dampak penyerapan tenaga kerja yang terlibat secara langsung terkait pembangunan Industri di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.4 Kebutuhan Tenaga Kerja Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi**

Tahun	Kebutuhan TK Produksi (Orang)	Kebutuhan TK Non Produksi (Orang)	Total Kebutuhan TK (Orang)
2020	68.428	48.532	116.960
2024	76.316	58.773	135.089
2029	90.109	58.348	148.457
2034	105.594	57.863	163.457
2040	124.239	55.664	165.766

**3.2.4 Sasaran Penyerapan Investasi Pembangunan Industri di Provinsi Jambi**

Dampak kedua dari penerapan strategi pembangunan industri pada wilayah Provinsi Jambi adalah dampak penyerapan investasi yang terkait pembangunan industri di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.5 Kebutuhan Investasi Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi**

Tahun	Proyeksi Penyerapan Investasi	
	PMDN (Rp. milyar)	PMA (US \$ juta)
2020	5.950	2,80
2024	8.244	2,64
2029	10.776	2,90
2034	13.435	3,19
2040	16.753	3,51

**3.2.5 Sasaran Nilai Output Pembangunan Industri Provinsi Jambi**

Dampak berikutnya pembangunan Industri di Provinsi Jambi akibat dari penerapan strategi pembangunan industri di Provinsi Jambi adalah nilai output industri prioritas Provinsi Jambi. Besaran nilai tersebut bisa di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Nilai Output Pembangunan Industri Prioritas Provinsi Jambi**

Tahun	Total Nilai Output
2020	72.440.907.886.695
2024	114.784.176.959.507
2029	181.934.885.378.408
2034	220.683.612.330.731
2040	266.812.182.676.248

### 3.2.6 Sasaran Pembangunan Industri di Provinsi Jambi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

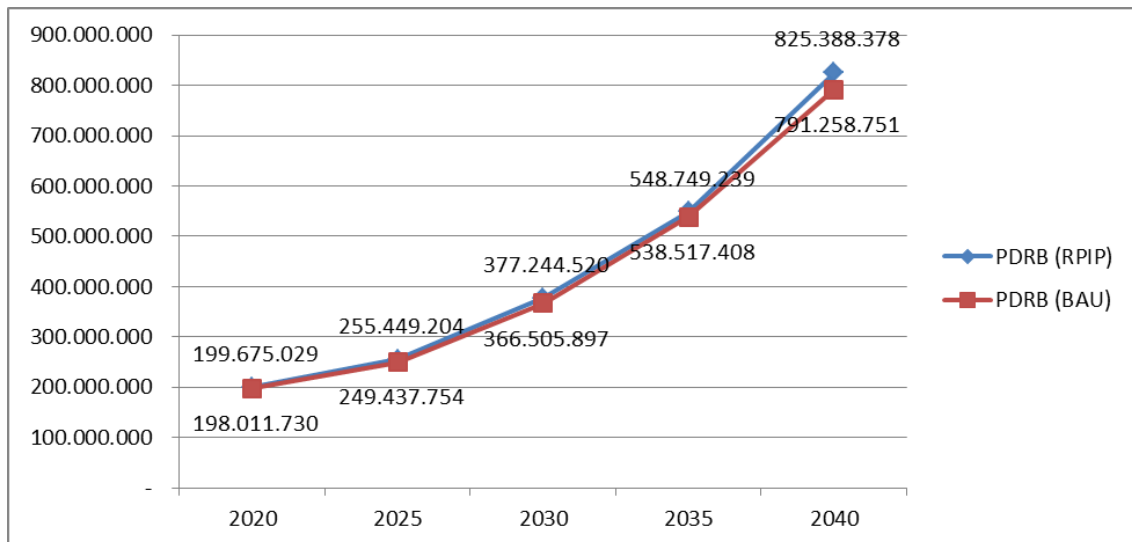
Dampak terakhir dari penerapan strategi pembangunan industri di Provinsi Jambi adalah dampak pertumbuhan industri terhadap tingkat dan nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.7 Nilai Perubahan PDRB Provinsi Jambi akibat Penerapan Strategi Pembangunan Industri di Provinsi Jambi**

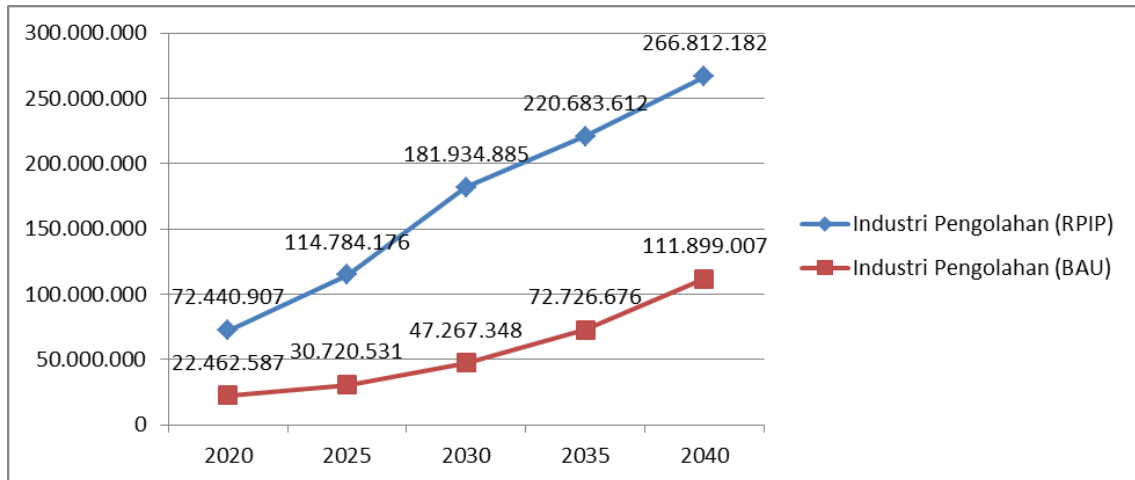
Tahun	PDRB	industri	pdrb setelah konsep RPIP	kontribusi industri setelah RPIP	pdrb nasional	industri pengolahan nasional
2020	198.011.730	22.462.587	199.675.029	22.203.863	807.137.356.385	205.320.955.885
2025	249.437.754	30.720.531	255.449.204	34.562.277	968.979.422.732	246.483.535.460
2030	366.505.897	47.267.348	377.244.520	62.094.448	1.313.956.453.062	334.230.165.034
2035	538.517.408	72.726.676	548.749.239	100.750.360	1.781.690.886.907	453.214.057.523
2040	791.258.751	111.899.007	825.388.378	171.460.679	2.138.884.724.460	544.074.046.102

Ket : Satuan Juta Rp

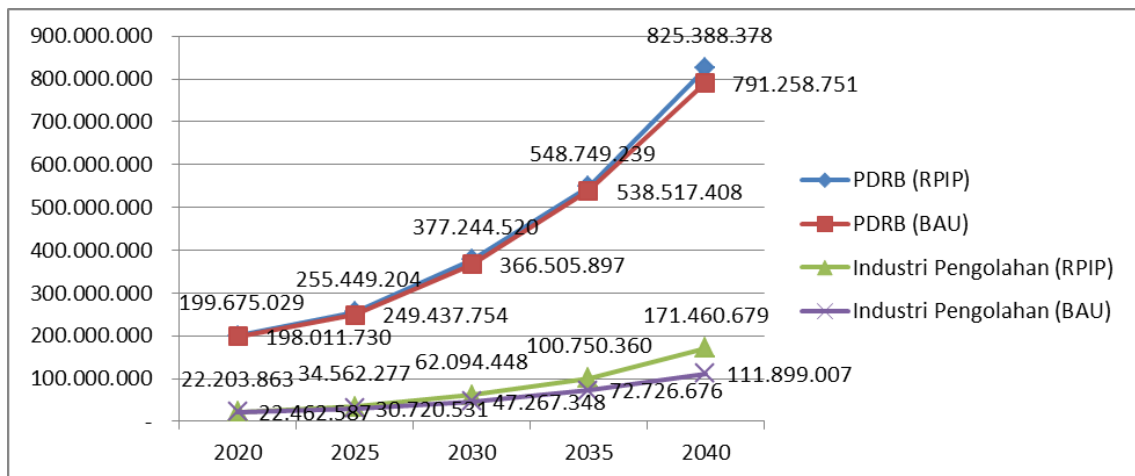
**Gambar 3.1 Ilustrasi Perubahan Nilai PDRB Provinsi Jambi setelah Konsep Pembangunan Industri RPIP Jambi 2020-2040 (Satuan Juta Rp)**



**Gambar 3.2 Ilustrasi Perubahan Nilai Industri Pengolahan setelah Penerapan Strategy Pengembangan Industri RPIP Jambi 2020 - 2040 (Satuan Juta Rp)**



**Gambar 3.3 Ilustrasi Perbandingan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Pada Kondisi BAU Dan RPIP (Satuan Juta Rp)**



## **BAB IV**

# **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI**

### **4.1 Strategi Pembangunan Industri**

Strategi Pembangunan Industri Provinsi Jambi merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki sebagai bahan baku industri antara lain:
  - a. Mengembangkan industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam.
  - b. Pengembangan industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai upaya untuk menjaga industri berbasis rakyat.
  - c. Pengembangan agro industri yang berbasis pada sumber daya lokal
  - d. Menyiapkan kawasan industri melalui penataan kluster industri
2. Mengembangkan inovasi dan teknologi sehingga berperan sebagai rantai pasok produk nasional antara lain:
  - a. Mengembangkan komoditi unggulan/andalan yang spesifik khususnya pemanfaatan “Komoditas Sawit, Karet, Kelapa dalam Hasil Hutan serta Kopi” yang memiliki keunggulan banding (*comparative advantage*) sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Memiliki pusat-pusat promosi komoditi dan layanan informasi yang memudahkan pihak *buyers* maupun investor yang membutuhkan
  - c. Penguasaan Iptek/Inovasi dengan penyediaan infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing and quality, MSTQ*)
  - d. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi
3. Berperan sebagai pendorong utama ekonomi provinsi regional dan perekonomian nasional antara lain:
  - a. Pemberdayaan industri galangan kapal sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi daerah.
  - b. Meningkatkan struktur komposisi komoditif ekspor daerah dan memperluas pasar tujuan ekspor dengan mengembangkan orientasi bisnis Nasional
  - c. Menjalinkan kerjasama antar daerah negara dan lembaga lainnya.
  - d. Melakukan penelitian kerjasama antara balai industri litbang dan lembaga riset, transfer teknologi dan pembangunan pusat inovasi

4. Berkomitmen mendukung Industri Hijau (*Green Industri*) ramah lingkungan dan berkelanjutan antara lain:
  - a. Mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau
  - b. Membangun industri baru dengan menerapkan prinsip industri hijau
  - c. Melakukan pembinaan kepada Industri Kecil Menengah dalam pemenuhan industri hijau serta fasilitasi untuk industri hijau
5. Menciptakan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat antara lain:
  - a. Pembangunan sumber daya manusia industri yang mempunyai visi outward looking
  - b. Mendorong terwujudnya perdagangan yang kompetitif dan sehat serta menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat dengan sistem yang efisien
  - c. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat tentang pengelolaan usaha industri dan perdagangan yang terkait dengan teknologi tepat guna dan manajemen akses pemasaran produk.
  - d. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi dan mutasi

## **Strategi Pembangunan Komoditas Industri Pengolahan di Provinsi Jambi**

### **1. Sawit, Karet dan Kelapa Dalam**

Saat ini hampir semua pemerintah daerah kabupaten mengembangkan perkebunan sawit ini terutama di wilayah Muaro Jambi dan wilayah Batanghari. Selain model pembangunan kawasan dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi juga telah mengembangkan perkebunan sawit dengan menggunakan pendekatan perwilayah komoditas.

Pembangunan areal perkebunan ini merupakan hal yang positif dalam peningkatan peran rakyat dalam pembangunan pertanian. Di pihak lain, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi harus mempersiapkan rencana strategis pembangunan industri hilir sawit, agar pemberian nilai tambah dilakukan di daerah Provinsi Jambi.

Namun selain sawit, maka komoditas lainnya yang mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan adalah komoditas karet dan komoditas kelapa dalam. Hasil produksi yang besar dan belum berkembangnya industri pengolahan sampai pada hilir produknya yang memiliki nilai tambah paling tinggi memerlukan strategi pembangunan produk dan produksi yang tepat sehingga target pencapaian bisa dicapai pada masa perencanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2020-2040 ini.

Beberapa Pembangunan Industri yang dilakukan sebagai tahapan strategi pembangunan industri di Provinsi Jambi pada komoditas sawit, karet dan kelapa dalam adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Sawit sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Sawit**

Komoditas	Produk
Sawit	CPO
	PKO
	<i>Turunan Ke 1 CPO</i>
	Olein
	PFAD
	Stearin
	<i>Turunan Ke 2 CPO</i>
	Minyak Goreng
	Methylester
	Sabun Cuci
	Sabun Mandi
	Margarin
	Kosmetik
	<i>Turunan Produk PKO</i>
	Fatty Acid
	<i>Turunan Ke 3 CPO</i>
	surfaktan
	Fatty Alcohol

**Tabel 4.2. Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Karet sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Karet**

Komoditas	Produk
Bokar	Crumb Rubber
	SIR 10 & 20
Bokar	Lateks Pekat
Sawn Timber	Dowel/Moulding
	Palet
Crumb Rubber	Industri Ban
	Ban Vulkanisir
	Pabrik Ban
	Sparepart Kendaraan Bermotor Basis Karet
	Alat Rumah Tangga
Lateks Pekat	Perlengkapan Olahraga
	Sarung Tangan Karet
Lateks Pekat	Benang Karet
	Sisa
	Flooring

**Tabel 4.3 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Kelapa sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Kelapa**

Komoditas	Produk
Kelapa	Nata de Coco
	Coconut Water
	Kopra
	Minyak Kelapa
	Sabut Kelapa
	VCO

Strategi yang dilakukan untuk pembangunan industri pengolahan sawit, karet dan kelapa dalam adalah sebagai berikut:

### 1) Tingkat Petani

- a. Melakukan peremajaan terhadap tanaman yang sudah tua dan tidak produktif;
- b. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian;
- c. Peningkatan kualitas SDM petani;
- d. Peningkatan intensifikasi pertanian;
- e. Peningkatan produktivitas;
- f. Pengamanan produksi;
- g. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan;
- h. Pembangunan infrastruktur;
- i. Stabilisasi harga komoditi.

### 2) Tingkat Industri Pengolahan

- a. Membangun pabrik pengolahan modern Provinsi Jambi dengan Konsep *Green Industri*;
- b. Jaminan ketersediaan bahan baku sesuai standar internasional;
- c. Ketersediaan alat dan teknologi produksi yang modern;
- d. Ketersediaan SDM yang terampil.

Melihat strategi pembangunan komoditas unggulan daerah ini seperti Sawit, Karet dan Kelapa diperlukan upaya sebagai sasaran kualitatif yang akan dicapai untuk meningkatkan kapasitas produksi dari hilirisasi komoditas unggulan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2040 sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Sawit dan Kebutuhan Lahan**

No.	Komoditas	Kapasitas produksi/ton/hari	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	Jenis Industri
1.	Sawit	CPO	50.196	62.746	78.432	98.040	Industri Hulu Agro – Minyak Sawit
		PKO	5.577	6.972	8.715	10.893	
		Olein	2.913	3.641	4.551	5.689	
		PFAD	3.034	3.793	4.741	5.926	
		Stearin	2.276	2.845	3.556	4.445	
		Minyak Goreng	3.004	3.755	4.693	5.867	
		Methylester	-	948	1.185	1.482	
		Sabun Cuci	-	127	159	199	
		Sabun Mandi	-	127	159	199	
		Margarin	-	1.849	2.311	2.889	
		Kosmetik	-	64	80	100	
		Fatty Acid	837	1.046	1.307	1.634	
		surfaktan	-	142	178	222	
Fatty Alcohol	-	19	24	30			
Jumlah			67.835	88.074	110.091	137.615	
Kebutuhan Lahan (Ha)			216	349	436	545	

**Tabel 4.5 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Karet dan Kebutuhan Lahan**

No.	Komoditas	Kapasitas produksi/ton/hari	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	Jenis Industri		
1.	Karet	Bokar/Crumb Rubber/Latek Pekat:					Industri Hulu Pengolahan Karet Modern		
		SIR 10 dan 20	1.928	2.314	2.777	3.332			
		Latek Pekat	240	288	346	415			
		Industri Ban							
		Ban Vulkanisir	193	231	278	333	Industri Hilir Pengolahan karet.		
		Pabrik Ban	171	926	1.111	1.333			
		Sparepart Kendaraan Bermotor Berbasis Karet	96	116	139	167			
		Alat Rumah Tangga	48	58	69	83			
		Perlengkapan OR	48	58	69	83			
		Sarung Tangan	12	14	17	21			
		Benang Karet	14	14	17	21			
		Jumlah			2.750	4.009		4.823	5.788
		Kebutuhan Lahan (Ha)			115	139		167	200

**Tabel 4.6 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Kelapa dan Kebutuhan Lahan**

No.	Komoditas	Kapasitas produksi/ton/hari	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	Jenis Industri
1	Kelapa	Nata de coco	8,34	10.93	14,36	18.76	- Nata de coco -Coconut Wtr -Kopra -Minyak Klapa -Sabut Kelapa Minyak Klapa
		Coconut Water	8,34	10.93	14.36	18.76	
		Kopra	55,58	72.88	95.74	125.04	
		Minyak Kelapa	27,79	36.44	47.87	62.52	
		Sabut Kelapa	37,52	49.19	64.62	84.40	
		VCO	5.00	6.56	8.62	11.25	
Jumlah			142,57	186.93	245.57	321.73	
Kebutuhan Lahan (Ha)			11.00	12.50	13.50	16.50	
Kebutuhan Bahan Baku			10.004	13.118	172.232	22.507	

Berdasarkan tabel diatas sasaran kuantitatif yang ingin dicapai sesuai dengan proyeksi yang dilakukan terhadap komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa memberikan harapan yang cukup menggembirakan dan sangat menjanjikan dalam pengembangan tiga komoditas dimaksud dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Untuk jenis kelapa sawit, yang diawal perencanaan lima tahun pertama (2020-2024) produksinya baru sekitar 67,835/ton/hari dengan kebutuhan lahan untuk pengembangannya 216 hektar, maka pada akhir perencanaan periode (2035-2040) menjadi 137.615/ton/hari dengan kebutuhan lahan seluas 545 hektar. Begitu juga dengan Karet pada periode 2020-2024 dengan kapasitas produksi sebesar 2.750/ton/hari menjadi 5.788/ton/hari pada tahun 2035-2040. Sementara itu, untuk komoditas kelapa juga diproyeksikan meningkat dari 142,57/ton/hari pada periode 2020-2024 meningkat menjadi 321.73 ton/hari periode 2035-2040.

## 2. Hasil Hutan (kayu gelondongan , kayu lapis, pulp, kertas)

Industri pengolahan hasil hutan sampai saat ini masih didukung oleh cadangan produksi hasil hutan yang ada di Provinsi Jambi, namun pada akhirnya akan mulai kesulitan memperoleh bahan baku, sehingga perlu mulai menuju industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi bukan hanya sebagai penyuplai bahan baku atau industri *intermediate* saja.

**Tabel 4.7 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Hasil Hutan sebagai Strategi Pembangunan Produk industri Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jambi**

Komoditas	Hulu-Intermediate-Hilir Produk	Bahan Baku	Produk & Turunan Produk
Kayu	Hulu	Kayu Gelondongan	Kayu Gergaji
	Intermediate	Kayu Gergajian	kayu Lapis
			Working Woods
		Kayu Gelondongan	Pulp
	Hilir	Kayu Gelondongan	Kayu Olahan Lainnya
	Hulu		Kayu Gelondongan
Rotan dan Bambu	Hulu	Rotan	Barang Anyaman dari Rotan, Barang dari Kayu, Rotan, Gabus dan lainnya.

## 3. Hasil Laut

Industri pengolahan ikan dan udang sampai sejauh ini masih belum optimal, perlu upaya yang strategis untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui berbagai upaya terutama yang terkait dengan perikanan tangkap dan udang, yang hilirisasinya baru sebatas

pengolahan ikan dan udang beku serta ikan kaleng, diharapkan kedepannya akan ada investor yang mau mendirikan industri pengolahan ikan dan udang.

**Tabel 4.8 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Hasil Laut sebagai Strategi Pembangunan Produk industri Pengolahan Hasil laut Provinsi Jambi**

<b>Perikanan Tangkap dan Udang</b>	<b>Produk dan Turunan Produk</b>	<b>Industri yang akan Dikembangkan</b>
Ikan dan Udang	Ikan dan Udang Beku	Industri Ikan Beku Ekspor
Ikan	Tepung Ikan	Industri Tepung Ikan
Ikan	Ikan Kaleng	Industri Pengalengan Ikan.

#### 4. Batubara

Industri pengolahan batubara baru sebatas pembuatan briket, molding sand, hiasan atau souvenir sebagai komponen farmasi dan pelarut, selebihnya pemanfaatan batubara untuk diekspor ke luar negeri. Adapun produk turunan pengolahan batubara sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Batubara sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Batubara**

<b>Komoditas</b>	<b>Produk</b>
Batubara	Briket
	Molding Sand (cetakan pasir)
	Hiasan dan souvenir
	Pupuk, Amoniak
	Komponen farmasi
	Komponen pelarut

#### 5. Kopi

Komoditi kopi yang merupakan tanaman yang memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri, karena di Jambi terdapat tiga varian jenis kopi yaitu: Arabica, Robusta dan Liberika, yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia bahkan di negara lain. Hal ini disebabkan tanaman kopi di Jambi ditanam diatas 1000 meter dari permukaan laut (Arabica dan Robusta) sedangkan Liberika tumbuh di lahan gambut.

**Tabel 4.10 Jenis Produk dan Produk Turunan Komoditas Kopi sebagai Strategi Pembangunan Produk Industri Pengolahan pada Komoditas Kopi**

<b>Komoditas</b>	<b>Produk</b>
Kopi	Kopi bubuk Kopi instan Kopi mix Spesialty kopi

Komoditas	Produk
	Pewangi Sabun Hiasan Ssouvenir

Strategi pengembangan komoditas hasil hutan, hasil laut, batubara dan kopi yang merupakan komoditas unggulan daerah ini, diperlukan upaya sebagai sasaran kualitatif yang akan dicapai untuk meningkatkan kapasitas produksi dari hilirisasi komoditas unggulan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2040 sebagai berikut;

**Tabel 4.11 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Hasil Hutan dan Kebutuhan Lahan 2020-2040**

No.	Komoditas	Kapasitas Produksi/ton/hari	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	Jenis Industri
1.	Hasil Hutan	Kayu Gergaji	86	108	135	168	Industri Pengolahan Kayu
		Kayu Lapis	82	102	128	160	
		Working Woods	15	19	23	29	
		Pulp	3.482	4.353	5.441	6.801	
		Kayu Olahan Lainnya	210	263	329	411	
		Kayu Gelondongan	12.215	13.436	14.780	16.258	
		Anyaman Dari Rotan	86	108	135	168	
		Barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya	37	46	58	72	
Jumlah			16.213	18.426	21.029	24.067	
Kebutuhan Lahan (Ha)			90.18	112.73	140.91	176.14	

**Tabel 4.12 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Hasil Laut 2020-2040**

No.	Komoditas	Kapasitas Produksi/ton/hari	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	Jenis Industri
2.	Hasil Laut	Ikan dan Udang Beku	31.426	42.760	49.532	57.890	- Industri Pengolahan Tepung Ikan dan Udang. - Ikan Beku ekspor. - Industri Pengalengan Ikan
		Tepung Ikan	15.760	25.187	28.650	32.780	
		Ikan Kaleng	21.350	26.150	28.970	33.340	
Jumlah			68.536	94.097	107.152	124.010	

**Tabel 4.13 Proyeksi Kapasitas Produksi Komoditas Unggulan Kopi dan Batubara 2020-2040**

No.	Komoditas	Kapasitas Produksi/ton/tahun/ha				Jenis Industri
		2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	
1.	Batubara	4.604.967,15	5.240.150,75	6.650.346,50	7.425.532,80	- Industri Briket
2.	Kopi	22.230	24.710	26.750	27.105	Batubara. - Industri Pengolahan Kopi.

Berdasarkan tabel 4.11, Tabel 4.12 dan tabel 4.13 diatas sasaran kuantitatif yang ingin dicapai sesuai dengan proyeksi yang dilakukan terhadap komoditas Hasil Hutan, Hasil Laut, Batubara dan Kopi menggambarkan pengembangan komoditas unggulan dimaksud dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Untuk jenis hasil hutan, yang diawal periode lima tahun pertama (2020–2024), produksinya baru sekitar 16.213/ton/hari, diharapkan pada periode akhir perencanaan periode (2035–2040) menjadi 24,062/ton/hari. Begitu juga dengan Komoditi Hasil Laut pada periode 2020–2024 dengan kapasitas produksi sebesar 68.536/ton/hari menjadi 124.010/ton/hari pada tahun 2035–2040. Sementara itu untuk komoditas Batubara juga diproyeksikan meningkat dari 4,60/ton/tahun pada periode 2020–2024 meningkat menjadi 7,43ton/tahun periode 2035–2040. Hal ini dikarenakan akan beroperasionalnya areal tambang Batubara yang belum digarap. Begitu juga dengan Kopi dari 22,23ton/semester. Pada awal periode 2020-2024 di proyeksi meningkat menjadi 27.11 ton/semester pada periode 2034-2040

Strategi Pembangunan Industri Pengolahan akan dilakukan pada 3 bagian proses kegiatan pengolahan yaitu:

**1) Peningkatan Produktivitas di Sisi Penyediaan Bahan Baku**

- a. Bahan baku yang dipergunakan ke depannya harus merupakan hasil hutan produksi yang merupakan hasil budidaya dari industri yang memanfaatkan kayu tersebut;
- b. Kerjasama dengan kementerian lain termasuk dengan kementerian kehutanan dan kementerian pertanian terkait varietas hasil hutan produksi yang mempunyai nilai jual tinggi jika sudah mengalami pengolahan.
- c. Perbaiki kualitas bahan baku melalui perbaikan kualitas pasca panen hasil hutan yang sesuai standar industri.

- d. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang strategis termasuk didalamnya penyusunan *masterplan*, penataan tata ruang wilayah (RTRW) yang ditunjang oleh daya dukung lingkungan.
- e. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam penentuan zonasi budidaya hasil hutan yang sesuai dengan ekosistem dan metode budidaya.
- f. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk kemudahan investasi bagi pihak investor.
- g. Penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.
- h. Peningkatan kualitas SDM.

## **2) Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Produksi.**

- a. Pemerintah memperkuat kemitraan antara industri pengolahan dengan pembudidaya di sentra produksi untuk menjamin kontinuitas bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi.
- b. Pemerintah melarang kegiatan ekspor bahan mentah hasil hutan, lebih mengarahkan industri untuk mengekspor produk jadi yang mempunyai nilai tambah tinggi
- c. Pemerintah menjalin kerja sama dengan investor asing untuk alih teknologi industri pengolahan hasil hutan melalui *Training of Trainers (ToT)* agar mampu menjadi industri yang berstandar internasional.
- d. Pemerintah membuat kemudahan regulasi dan perizinan untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi pengolahan hasil hutan di sentra produksi.

## **3) Strategi Penyediaan Infrastruktur**

Didalam memenuhi target pembangunan industri yang telah diproyeksikan sampai 2040, maka diperlukan strategi pemenuhan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pencapaian target tersebut.

- a. Strategi kebutuhan lahan yang di rencanakan hanya sebatas pada kebutuhan lahan untuk aktivitas industri pengolahannya, dimana jika mengacu pada luasan total Provinsi Jambi yang diperuntukan untuk kegiatan industri masih sangat mencukupi memenuhi kebutuhan utama industrinya.
- b. Strategi pemenuhan energi untuk aktivitas industri pengolahan Rumput Laut bisa diperoleh dari pembangunan energi mandiri di masing-masing kawasan industri maupun memperolehnya dari listrik grid Sumatera yang masuk wilayah Provinsi Jambi yang dikelola oleh PLN.
- c. Strategi merencanakan kebutuhan air untuk aktivitas industri harus mempertimbangkan ketersediaan air permukaan dan jauh dekatnya dengan sumber



air. Hal ini mengacu pada Undang-undang SDA yang melarang penggunaan air dalam untuk aktivitas industri. Perencanaan pemenuhan air baku harus didasarkan pada kondisi wilayah sungai yang akan dimanfaatkan airnya.

- d. Strategi pemenuhan ketercukupan sumber daya manusia baik jumlah ataupun kualitas serta kompetensinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan tinggi keteknikan maupun Sekolah Vokasional dalam hal penentuan kompetensi keahlian yang diharapkan oleh industri dan jumlah yang butuhkan. Selain itu juga perlu dilakukan Internship ke industri-industri yang telah maju di dalam pengembangan SDM nya pada calon calon peserta magang yang diharapkan adalah pemuda-pemudi lokal daerah dimana industri atau kawasan pengolahan hasil hutan akan dikembangkan.

## **4.2 Program Pembangunan Industri**

### **4.2.1 Penetapan dan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi**

Dalam penentuan industri unggulan ini dibuat sebuah struktur hirarki dengan tujuan utama (*goal*) untuk memilih dan menentukan mana yang akan dijadikan unggulan. Tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Kriteria-kriteria yang dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan bahan baku industri
2. Besaran nilai tambah dan dampak ekonomi
3. Besaran investasi
4. Penyerapan tenaga kerja
5. Hilirisasi industri
6. Keberadaan industri hilir
7. Penerapan teknologi
8. Ketersediaan bahan baku pendukung produksi

Dari uraian sebelumnya ditentukan Industri Unggulan Provinsi Jambi dengan pengelompokan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 sebagai berikut :

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi

5. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
6. Industri Hulu Agro
7. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selanjutnya dapat ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14 Jenis Industri dan Tahapan Industri Unggulan Provinsi Jambi**

No	INDUSTRI UNGGULAN	PERIODE				WILAYAH POTENSI
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	
1.	INDUSTRI PANGAN	INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN				Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		Olahan Ikan Beku	Olahan Ikan Beku	Olahan Ikan Beku	Olahan Ikan Beku	
		Olahan Tepung Ikan	Olahan Tepung Ikan	Olahan Tepung Ikan	Olahan Tepung Ikan	
		Ikan Kaleng	Ikan Kaleng	Ikan Kaleng	Ikan Kaleng	
		Minyak Ikan	Minyak Ikan	Minyak Ikan	Minyak Ikan	
		Udang Beku	Udang Beku	Udang Beku	Udang Beku	
		Kerupuk Udang	Kerupuk Udang	Kerupuk Udang	Kerupuk Udang	
		Udang Kaleng	Udang Kaleng	Udang Kaleng	Udang Kaleng	
	Keripik Ikan	Keripik Ikan	Keripik Ikan	Keripik Ikan		
	INDUSTRI BAHAN PENYEGAR					
		Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kopi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin
	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK NABATI					
		Minyak Goreng (Kelapa Dalam)	Minyak Goreng (Kelapa Dalam)	Minyak Goreng (Kelapa Dalam)	Minyak Goreng (Kelapa Dalam)	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi,
		Virgin Coconut Oil (VCO)	Virgin Coconut Oil (VCO)	Virgin Coconut Oil (VCO)	Virgin Coconut Oil (VCO)	
		Minyak Goreng Kelapa Sawit	Minyak Goreng Kelapa Sawit	Minyak Goreng Kelapa Sawit	Minyak Goreng Kelapa Sawit	

No	INDUSTRI UNGGULAN	PERIODE				WILAYAH POTENSI
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	
						Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
		<b>INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA</b>				
		Nata de Coco	Nata de Coco	Nata de Coco	Nata de Coco	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
<b>2.</b>	<b>INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN</b>	<b>INDUSTRI FARMASI DAN KOSMETIK</b>				
		Sabun dari Kopi	Sabun dari Kopi	Sabun dari Kopi	Sabun dari Kopi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin
		Parfum dari Kopi	Parfum dari Kopi	Parfum dari Kopi	Parfum dari Kopi	
<b>3.</b>	<b>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA</b>	<b>INDUSTRI TEKSTIL</b>				
		Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi
		<b>INDUSTRI PENGOLAHAN KARET DAN BARANG DARI KARET</b>				

No	INDUSTRI UNGGULAN	PERIODE				WILAYAH POTENSI
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	
		Karet untuk Keperluan Umum	Karet untuk Keperluan Umum	Karet untuk Keperluan Umum	Karet untuk Keperluan Umum	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
		Industri Remiling Karet	Industri Remiling Karet	Industri Remiling Karet	Industri Remiling Karet	
		Karet untuk Keperluan Khusus	Karet untuk Keperluan Khusus	Karet untuk Keperluan Khusus	Karet untuk Keperluan Khusus	
		Crumb Rubber	Crumb Rubber	Crumb Rubber	Crumb Rubber	
4.	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR				
		Komponen Otomotif	Komponen Otomotif	Komponen Otomotif	Komponen Otomotif	Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun
5.	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG DAN JASA INDUSTRI	INDUSTRI KOMPONEN				
		Ban Vulkanisir	Ban Vulkanisir	Ban Vulkanisir	Ban Vulkanisir	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo
6.	INDUSTRI HULU AGRO	INDUSTRI OLEOFOOD				

No	INDUSTRI UNGGULAN	PERIODE				WILAYAH POTENSI
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	
			Margarin	Margarin	Margarin	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
		<b>INDUSTRI OLEOKIMIA</b>				
		Minyak Atsiri	Minyak Atsiri	Minyak Atsiri	Minyak Atsiri	Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun
		<b>INDUSTRI KEMURGI</b>				
			Biodisel	Biodisel	Biodisel	Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo
		<b>INDUSTRI BARANG DARI KAYU</b>				
		Kayu Gergaji	Kayu Gergaji	Kayu Gergaji	Kayu Gergaji	Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro
		Kayu Lapis	Kayu Lapis	Kayu Lapis	Kayu Lapis	
		Working Woods	Working woods	Working Woods	Working Woods	
		Kayu Olahan lainnya	Kayu Olahan lainnya	Kayu Olahan lainnya	Kayu Olahan lainnya	

No	INDUSTRI UNGGULAN	PERIODE				WILAYAH POTENSI
		2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040	
						Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
		<b>INDUSTRI PULP DAN KERTAS</b>				
		Pulp dan Aneka Barang dari Kertas Diproduksi Secara Ramah Lingkungan	Pulp dan Aneka Barang dari Kertas Diproduksi Secara Ramah Lingkungan	Pulp dan Aneka Barang dari Kertas Diproduksi Secara Ramah Lingkungan	Pulp dan Aneka Barang dari Kertas Diproduksi Secara Ramah Lingkungan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7.	INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<b>INDUSTRI KARET ALAM DAN SINTETIK</b>				
		Engineering Natural Rubber Compound	Engineering Natural Rubber Compound	Engineering Natural Rubber Compound	Engineering Natural Rubber Compound	Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten. Muaro Jambi, Kabupaten. Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjab Barat
		Lateks Pekat	Lateks Pekat	Lateks Pekat	Lateks Pekat	
		<b>INDUSTRI BRIKET BATUBARA</b>				
		Industri Briket Batubara	Industri Briket Batubara	Industri Briket Batubara	Industri Briket Batubara	Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo

#### 4.2.2 Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Sasaran pembangunan industri di Provinsi Jambi diarahkan pada pembangunan industri unggulan daerah yang dirumuskan dalam program pengembangan industri unggulan,

yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, swasta serta pihak lainnya. Adapun program pengembangan industri unggulan Provinsi Jambi, disusun berdasarkan periode 2020–2024, periode 2025–2029, periode 2030–2034 dan periode 2035–2040, sebagai berikut;

**Tabel 4.15 Program Pengembangan Industri Pangan**

<b>Periode</b>			
<b>2020-2024</b>	<b>2025-2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2040</b>
Mengembangkan industri hulu dan hilir industri pangan sebagai buffer stock ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinuitas.	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung gerbang perekonomian Provinsi Jambi.	Pengembangan sistem rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri pangan yang berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG), untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.	Meningkatkan daya saing produksi industri pangan.	Pengembangan industri pangan dan sejenisnya.	Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan dan sejenisnya
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang industri pangan sebagai bahan industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan	Menjadikan daerah tujuan investasi industri pangan yang berbasis lingkungan.	Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan	Peningkatan SDM yang terkait dengan pemanfaatan industri pangan.
Pengembangan penguasaan teknologi melalui penelitian yang terintegrasi dalam industri pangan sebagai bahan pangan.	Mengoptimal penyediaan infrastuktur pendukung industri pangan.	Pembangunan pabrik/rumah produksi untuk industri pangan.	Peningkatan infrastruktur pendukung industri pangan.
Pengembangan produksi dan promosi hasil industri pangan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Perluasan pangsa pasar dalam dan luar negeri.	Pengembangan produksi dan promosi hasil industri pangan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan produksi dan promosi hasil industri pangan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri
	Pengembangan produksi dan promosi hasil industri pangan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri		

**Tabel 4.16 Program Pengembangan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
Mengembangkan industri hulu dan hilir berbasis Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan sebagai buffer stock ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinuitas.	Pengembangan Agro industri yang berbasis kelapa kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Fasilitasi dan advokasi industri kelapa sawit, Kelapa dan Kopi ke dalam Green Industry.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan sistem Resi Gudang (SRG), untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.	Pengembangan sistim Rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Pengembangan sarana dan prasaran pendukung sistem rantai pasok	Mengendalikan dan mendorong pengembangan iklim investasi yang berwawasan lingkungan.
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang pengelolaan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Pendirian pendidikan kejuruan dan vokasi bidang kelapa sawit, Kelapa dan Kopi.	Efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi hilirisasi produk kelapa sawit, Kelapa dan Kopi
Pengembangan dan penguasaan teknologi yang terintegrasi dengan hilirisasi Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Peningkatan dan pengembangan penelitian, melalui invasi teknologi, yang implementasinya dalam skala besar dan luas.	Rehabilitasi dan replanting tanaman kelapa sawit, Kelapa dan Kopi.	Pengembangan agro industri yang berbasis pada sumberdaya lokal.
Fasilitasi Pembangunan pabrik pengolahan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.	Pengembangan kawasan yang didukung infrastruktur yang memadai.	Intensifikasi kawasan tanaman kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Penciptaan iklim investasi yang mendukung industri kelapa sawit.
Koordinasi pengembangan sistem informasi pasar produk Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Memperkuat jaringan pemasaran industri kelapa sawit, Kelapa dan Kopi.	Pengembangan Kerangka Kebijakan pemasaran produk kelapa sawit, Kelapa dan Kopi.	Menjamin dan mengendalikan pemasaran produk kelapa sawit, Kelapa dan Kopi.
Fasilitasi kerjasama antar pelaku usaha di dalam maupun di luar negeri.	Mendorong Pembuatan MOU antar pelaku usaha bidang kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Penerapan standar produk kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Kemampuan dalam mengakses pasar global
Pengembangan basis data potensi pengelolaan hilirisasi Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Pemutakhiran data industri kelapa sawit, Kelapa dan Kopi	Pengawasan intensif melalui sistem SIINAS	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri



Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	

**Tabel 4.17. Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka untuk pemenuhan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinuitas.	Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Pengembangan sistem Rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan Industri hulu dan hilir yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka melalui inovasi dan teknologi	Pengembangan hilirisasi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka melalui mesin dan peralatan.	Pengembangan basis data yang dapat diakses pelaku usaha	Pemanfaatan energi dan penyediaan infrastruktur.
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang pengelolaan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka melalui pendidikan dan pelatihan	Pembangunan rumah produksi dan promosi dalam rangka peningkatan pemasaran.	Memperkuat sistem informasi pasar antar pelaku usaha.	Pemanfaatan SDM akademisi dalam penelitian Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka untuk hilirisasi.
Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka yang ramah lingkungan	Penyediaan peralatan dan mesin pengolah Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka untuk hilirisasi	Membangun jaringan pemasaran industri hilir	Penguatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas mutu produk.
Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka .	Fasilitasi pemanfaatan karet untuk aspal karet.	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	Kerjasama pemantapan simpul dan jaringan pemasaran hilirisasi produk Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.
Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar di bidang hilirisasi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Pengembangan Postur ekspor karet alam.	Kerjasama antar pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan pelaku usaha	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka dalam rangka perluasan pasar

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
			dalam dan luar negeri
Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	

**Tabel.4.18 Program Pengembangan Industri Alat Transportasi**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Industri Alat Transportasi untuk pemenuhan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinuitas.	Penyediaan peralatan dan mesin pengolah Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri untuk hilirasasi	Pengembangan sistim Rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan Industri hulu dan hilir yang berbasis Alat Transportasi melalui inovasi dan teknologi	Fasilitasi pemanfaatan Industri Alat Transportasi.	Pengembangan basis data yang dapat diakses pelaku usaha	Pemanfaatan energi dan penyediaan infrastruktur.
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang pengelolaan Alat Transportasi melalui pendidikan dan pelatihan	Pengembangan Postur Ekspor	Memperkuat sistem informasi pasar antar pelaku usaha.	Penguatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas mutu produk.
Pengembangan Industri hijau, yang ramah lingkungan	Fasilitasi pemanfaatan Industri Alat Transportasi.	Membangun jaringan pemasaran industri hilir	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Alat Transportasi dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri
Penguatan kelembagaan Alat Transportasi	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Alat Transportasi dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Kerjasama antar pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan pelaku usaha	
Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Alat Transportasi dalam rangka perluasan pasar		Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Alat Transportasi dalam	

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
dalam dan luar negeri		rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	

**Tabel.4.19 Program Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri untuk pemenuhan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinuitas.	Pembangunan rumah produksi dan promosi dalam rangka peningkatan pemasaran.	Pengembangan sistim Rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan Industri hulu dan hilir yang berbasis Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri melalui inovasi dan teknologi	Penyediaan peralatan dan mesin pengolah Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri untuk hilirasasi	Pengembangan basis data yang dapat diakses pelaku usaha	Pemanfaatan energi dan penyediaan infrastruktur.
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang pengelolaan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri melalui pendidikan dan pelatihan	Fasilitasi pemanfaatan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri.	Memperkuat sistem informasi pasar antar pelaku usaha.	Pemanfaatan SDM akademisi dalam penelitian
Pengembangan Industri hijau, yang ramah lingkungan	Pengembangan Postur ekspor	Membangun jaringan pemasaran industri hilir	Penguatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas mutu produk.
Penguatan kelembagaan di bidang hilirisasi Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Kerjasama antar pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan pelaku usaha	Kerjasama pemantapan simpul dan jaringan pemasaran hilirisasi
Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan		Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan	Pengembangan produksi dan promosi hasil Industri Barang Modal, Komponen,

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
Jasa Industri dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri		Jasa Industri dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri	Bahan Penolong, dan Jasa Industri dalam rangka perluasan pasar dalam dan luar negeri

**Tabel 4.20 Program Pengembangan Industri Hulu Agro**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku	Penyusunan regulasi terkait pemanfaatan	Menjamin ketersediaan bahan baku melalui sistem rantai pasok	Menjamin ketersediaan bahan baku melalui sistem rantai pasok
Penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dalam pengolahan hasil	Peningkatan SDM terkait dengan lingkungan hidup.	Fasilitasi pemanfaatan industri hasil	Peningkatan aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan optimasi sistem produksi hasil
Pengembangan inovasi dan teknologi dalam pengeolahan hasil	Pengembangan barang produk hasil olahan	Pengembangan kerangka kebijakan untuk memperluas pemasaran produk hasil	Pembangunan pendidikan kejuruan dan Vokasi dibidang Industri Hulu Agro.
Pemantapan zonasi kawasan	Peningkatan kerjasama pengelolaan kawasan	Pengembangan kawasan yang terintegrasi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengolahan industri hasil	Fasilitasi pembangunan industri pengolahan hasil	Fasilitasi advokasi untuk memasuki industri pengolahan kedalam Green Indutry.	Peningkatan pengawasan hasil
Pengembangan nilai tambah limbah industri olahan hasil	Penguatan kelembagaan	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan hasil	Promosi dan perluasan pasar produksi industri
Promosi dan perluasan pasar produksi industri	Promosi dan perluasan pasar produksi industri	Promosi dan perluasan pasar produksi industri	

**Tabel.4.21 Program Pengembangan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara**

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan industri Batubara yang berkualitas dan	Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan ilir batubara	Pengembangan sistim rantai pasok yang efisien dalam ketersediaan bahan baku.	Peningkatan Nilai tambah limbah industri berbasis inovasi dan teknologi.

Periode			
2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035- 2040
kontinuitas.			
Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG), untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.	Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung industri pengolahan.	Pengembangan kawasan industri batubara yang terintegrasi dengan infrastruktur yang memadai	Fasilitasi pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik.
Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang hilirisasi Batubara melalui pendidikan dan pelatihan	Menyiapkan SDM Lokal yang berkompeten dan ahli dalam hilirisasi batubara.	Fasilitasi advokasi hilirisasi batubara yang ramah lingkungan.	Peningkatan rekayasa produks industri batubara melalui kegiatan penelitian.
Peningkatan efisiensi proses pengelolaan batubara melalui pengembangan inovasi dan teknologi.	Mendorong kerjasama dalam hilirisasi Batubara dalam pemanfaatan teknologi	Meningkatkan daya sain hilirasasi Batubara.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri batubara.
Fasilitasi kerjasama teknologi dalam pengembangan bahan baku alternatif.	Promosi dan perluasan pasar produk hilirisasi batubara.	Promosi dan perluasan pasar produk hilirisasi batubara.	Promosi dan perluasan pasar produk hilirisasi batubara.
Promosi dan perluasan pasar produk hilirisasi batubara.			

#### 4.2.3 Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi

Pembangunan Industri di Provinsi Jambi akan diarahkan agar terjadi keterkaitan antara satu wilayah kota dan kabupaten lain (Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci serta Kabupaten Sarolangun) serta kabupaten yang ada disekitar rencana pusat-pusat pertumbuhan industri Provinsi Jambi dalam suatu sistem yang utuh terintegrasi mulai dari:

- a. Subsystem bisnis hulu yang mencakup: penelitian, pengembangan, sarana perikanan, permodalan dan lain-lain
- b. Subsystem usaha Sawit, Karet, Kelapa, Perikanan yang mencakup usaha, pembenihan, pembesaran, penangkapan, penyediaan sarana penangkapan ikan serta penanganan hasil.
- c. Subsystem bisnis hilir yang meliputi industri pengolahan dan pemasarannya termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor
- d. Subsystem penunjang seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

- e. Keterkaitan antar Kawasan Industri di Provinsi Jambi dengan WPPI yang ada di provinsi lain seperti Riau dan WPPI di Provinsi Sumatera Selatan dan WPPI di Sumatera Utara dan kawasan pendukung dan pengembangan serta kawasan keterkaitan bersifat saling timbal balik serta saling membutuhkan.

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan perwilayahah industri, yang terkait dengan pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan industri maka pengembangannya dilakukan melalui berbagai program. Berikut ini diantara program-program prioritas pembangunan perwilayahan industri di Jambi yang paling tidak harus dimunculkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Jambi.

**Tabel 4.22 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri**

No	Program	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
<b>A</b>	<b>Pengembangan KPI</b>				
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√ (Min 1 kali/tahun)	√ (Min 1 kali/tahun)	√ (Min 1 kali/tahun)	√ (Min 1 kali/tahun)
<b>B</b>	<b>Pembangunan KI</b>				
1	Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Provinsi Jambi(khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan, seperti KI Kemingking-Muarojambi)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)	√ (Min 1 paket)
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya	√ (100%)	-	-	-
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√ (50%)	√ (100%)	-	-
4	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energy listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√ (25%)	√ (50%)	√ (100%)	-
5	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√	√	√

#### 4.2.3.1 Pembentukan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pembangunan industri baik itu sentra maupun kawasan industri (KI) diarahkan pada KPI yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jambi, yang mana KPI tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Lokasi, Luas dan Rekomendasi Pembangunan Industri KPI Provinsi Jambi**

NO	KABUPATEN	LUAS KAWASAN (Ha)	JENIS INDUSTRI
1	BATANGHARI	4928,93	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
2	BUNGO	784,39	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
3	KOTA JAMBI	1451,82	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
4	MERANGIN	313,82	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
5	MUAROJAMBI	7225,31	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
6	SAROLANGUN	2057,51	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
7	TANJUNG JABUNG BARAT	961,47	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	12816,11	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Hulu Agro
9	TEBO	294,22	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan

NO	KABUPATEN	LUAS KAWASAN (Ha)	JENIS INDUSTRI
			Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
10	SUNGAI PENUH	289,13	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
11	KERINCI	421,11	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
	TOTAL	24.820,77	

#### 4.2.3.2 Kawasan Industri

Untuk di Provinsi Jambi pengembangan kawasan industri mutlak diperlukan untuk menyokong pengembangan bisnis di Sumatera dan di Jambi khususnya. Penambahan infrastruktur di Sumatera seperti Jalan Tol, Pelabuhan, utilitas bisnis dan Kawasan Industri dapat mempercepat pengembangan bisnis di Sumatera. Kawasan Industri yang direncanakan dikembangkan di Provinsi Jambi adalah Kawasan Industri Kemingking.

Saat ini izin lokasi Pembangunan Kawasan Industri Kemingking yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi masih terhambat oleh permasalahan tata ruang, untuk itu diperlukan revisi RTRW. Percepatan proses revisi RTRW ini sendiri telah difasilitasi oleh Kemenperin dan BPKM Pusat bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Revisi RTRW sendiri diperkirakan akan selesai di bulan Desember 2020. Dukungan infrastruktur seperti jalan akses alternatif, Interchange TOL Trans Sumatera dan pelebaran jalan akses eksisting juga masih diperlukan oleh Kawasan Industri Kemingking. Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Kemingking dapat dilihat pada tabel berikut ini:

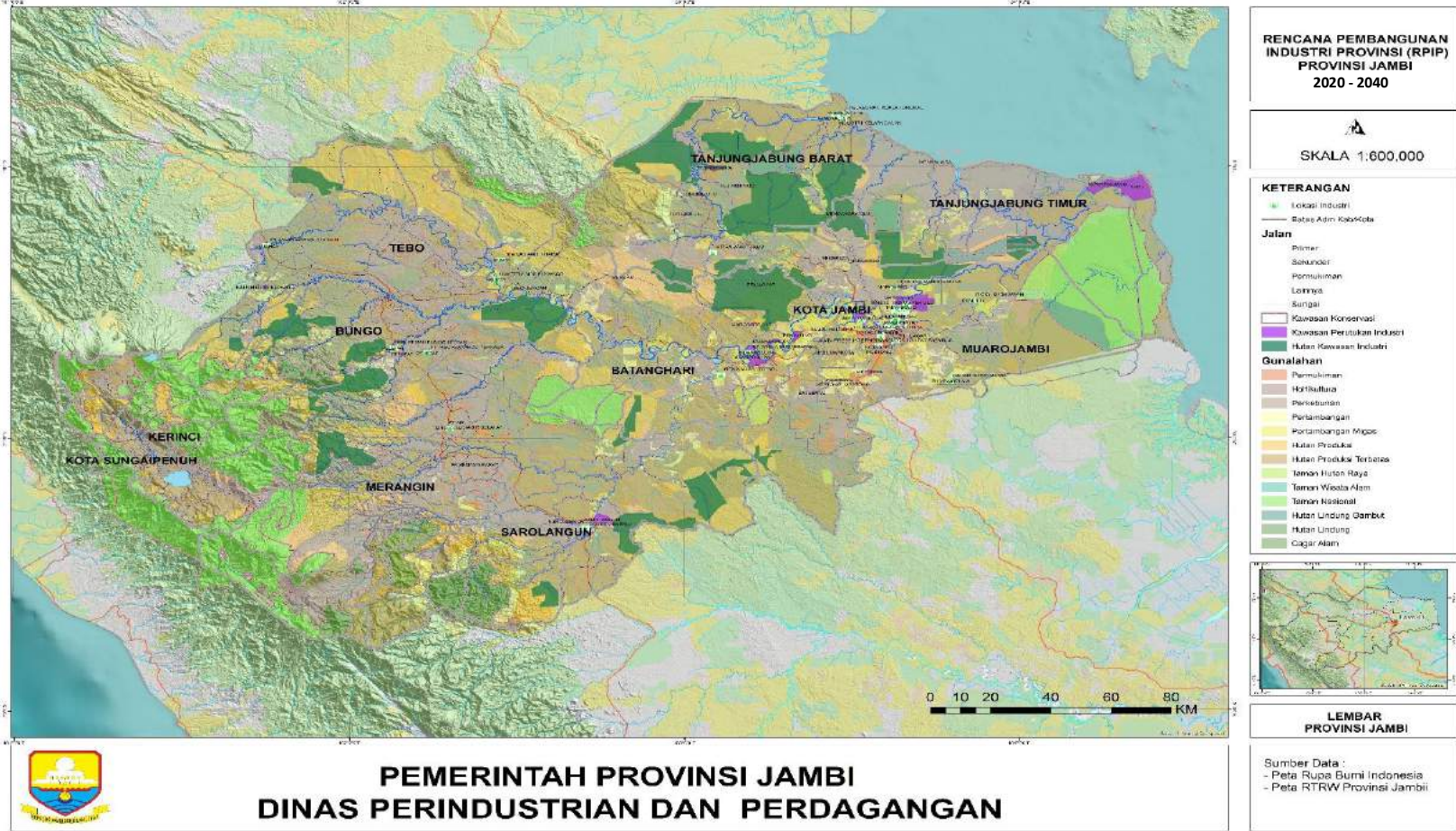
**Tabel 4.24 Roadmap Kawasan Industri Kemingking Provinsi Jambi**

2017 - 2019	2020 - 2022	2023 - 2025	2026 - 2028
Perizinan Land Clearing 1.700 ha, Promosi Kawasan Industri	Ground Breaking Infrastruktur Dasar Energy Center WTP dan WWTP Industry Tahap 1, Warehouse Tahap 1, Public Housing	Industry Tahap 2, Warehouse Tahap 2, Medium Housing, Technopark, Commercial Tahap 1	Industry Tahap 3, Medium Housing, Commercial Tahap 2

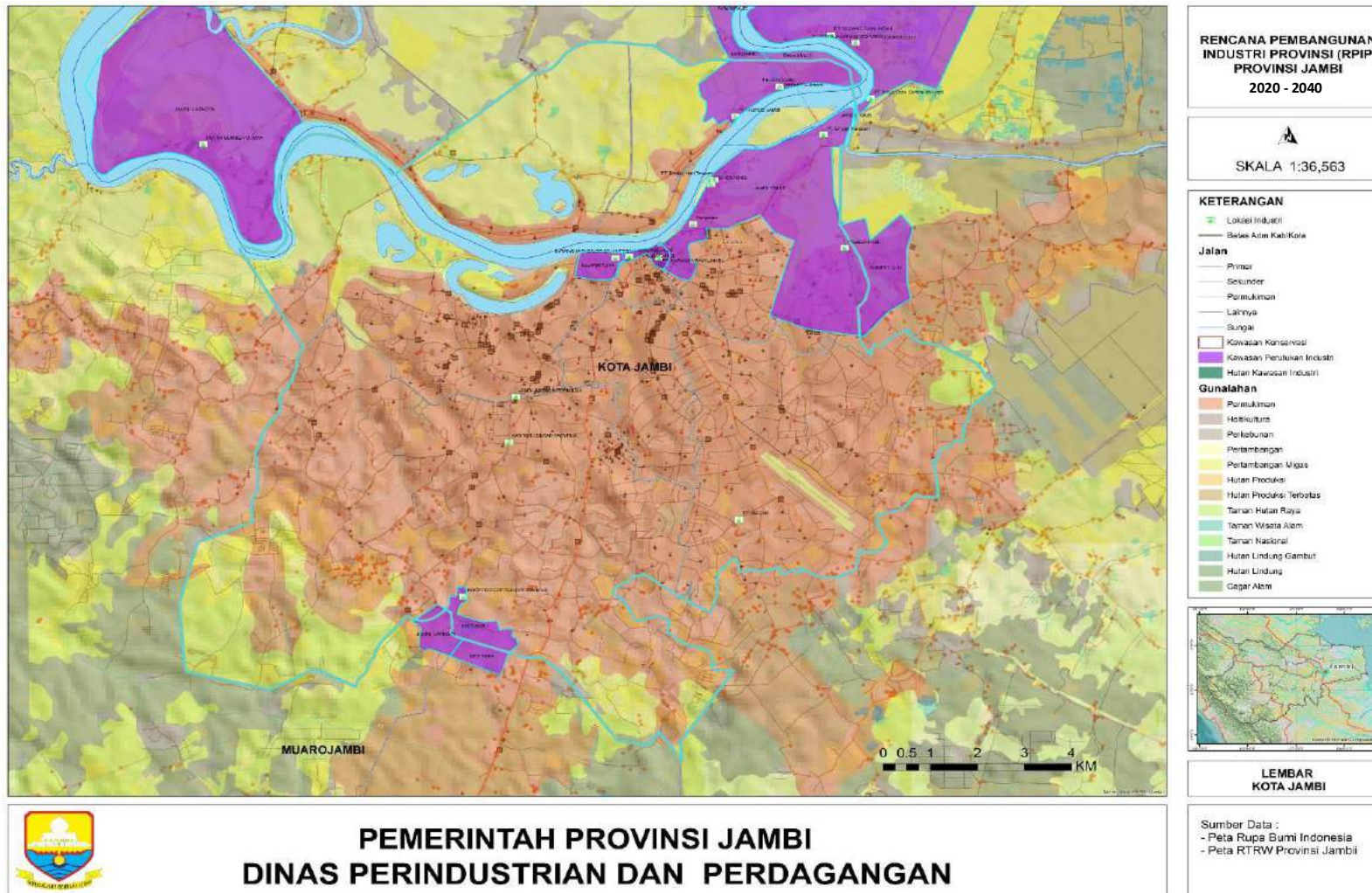




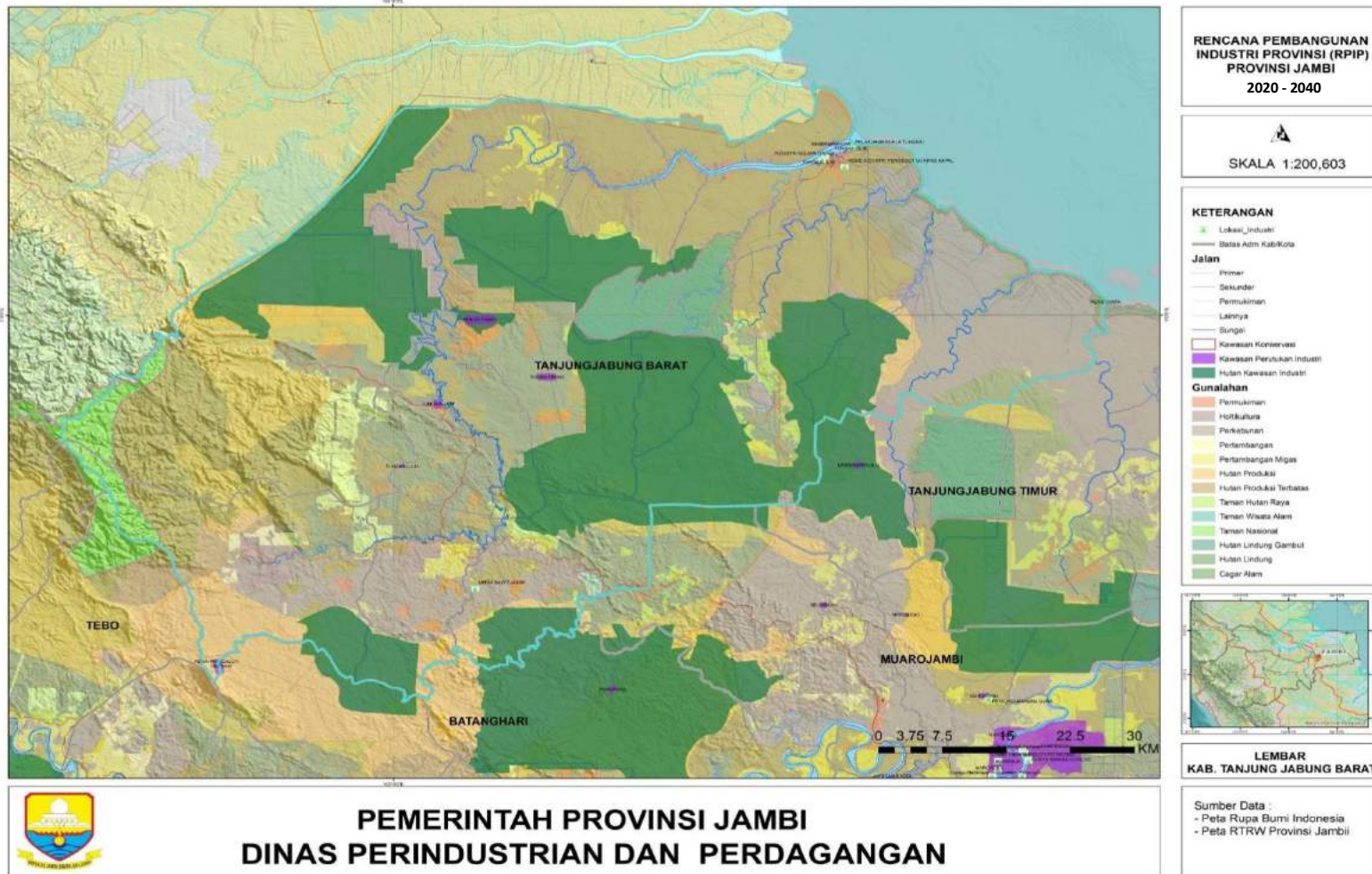
Gambar 4.3 Peta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Jambi 2020-2040



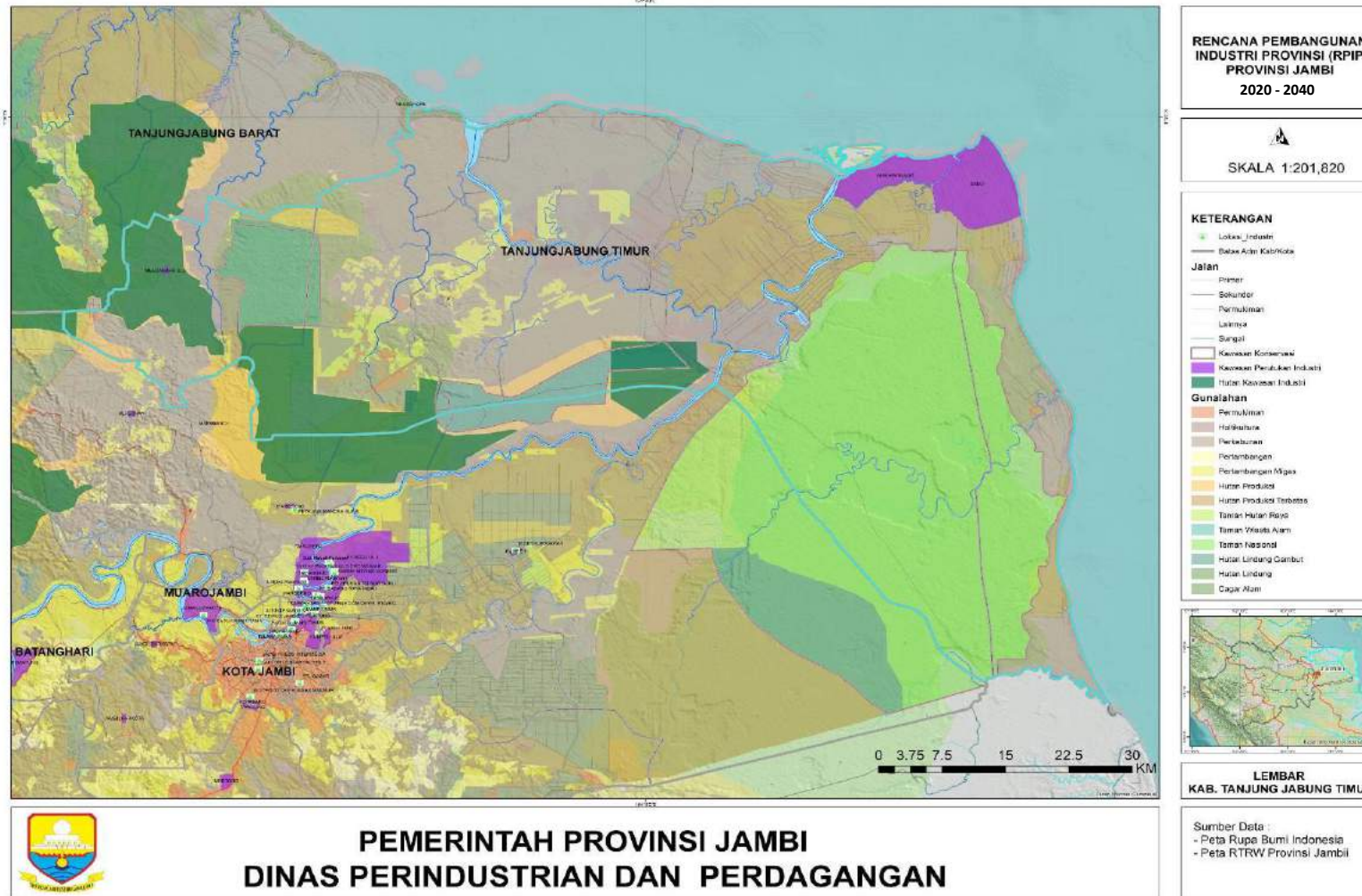
Gambar 4.4 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Jambi



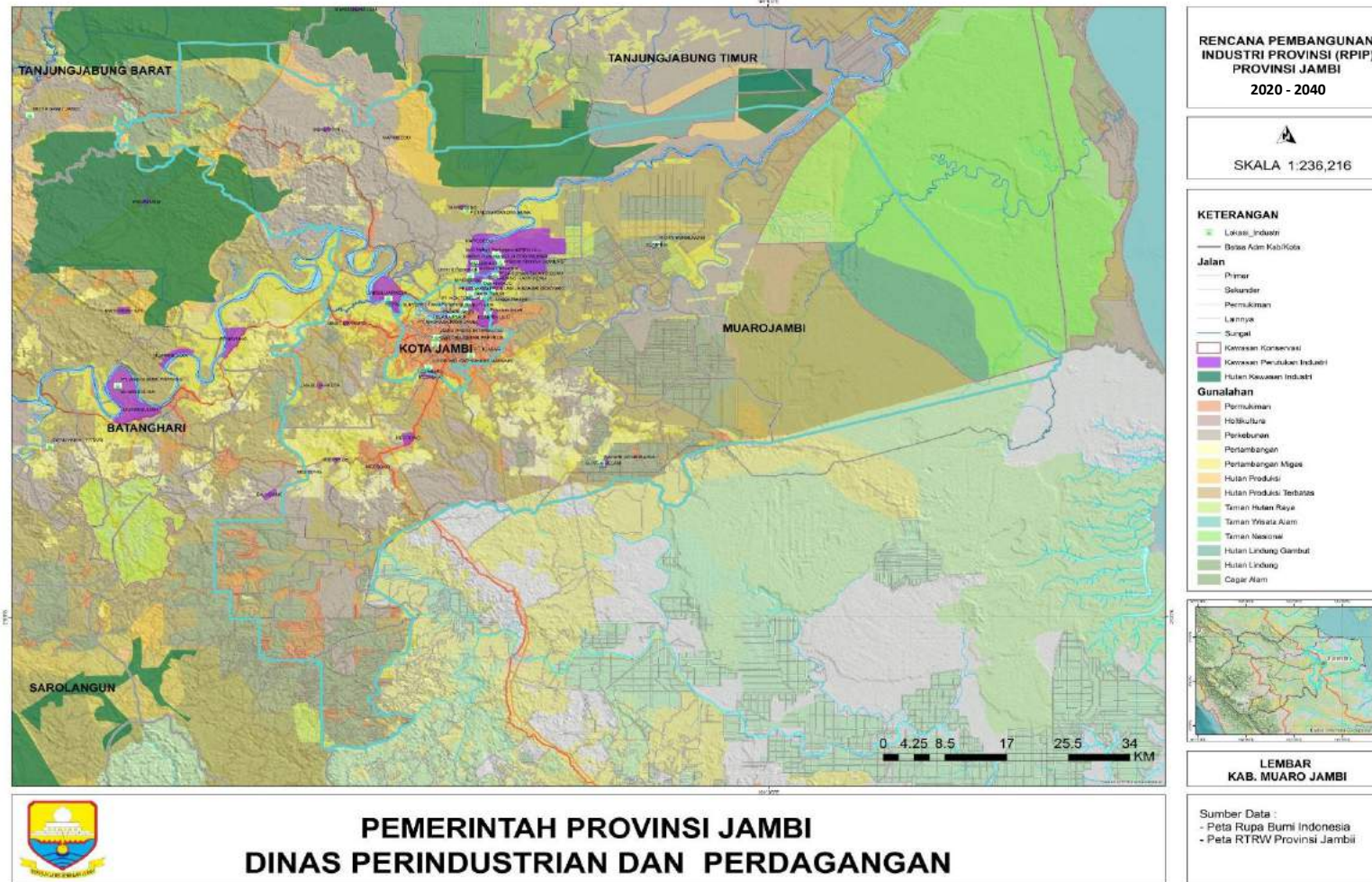
Gambar 4.5 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat



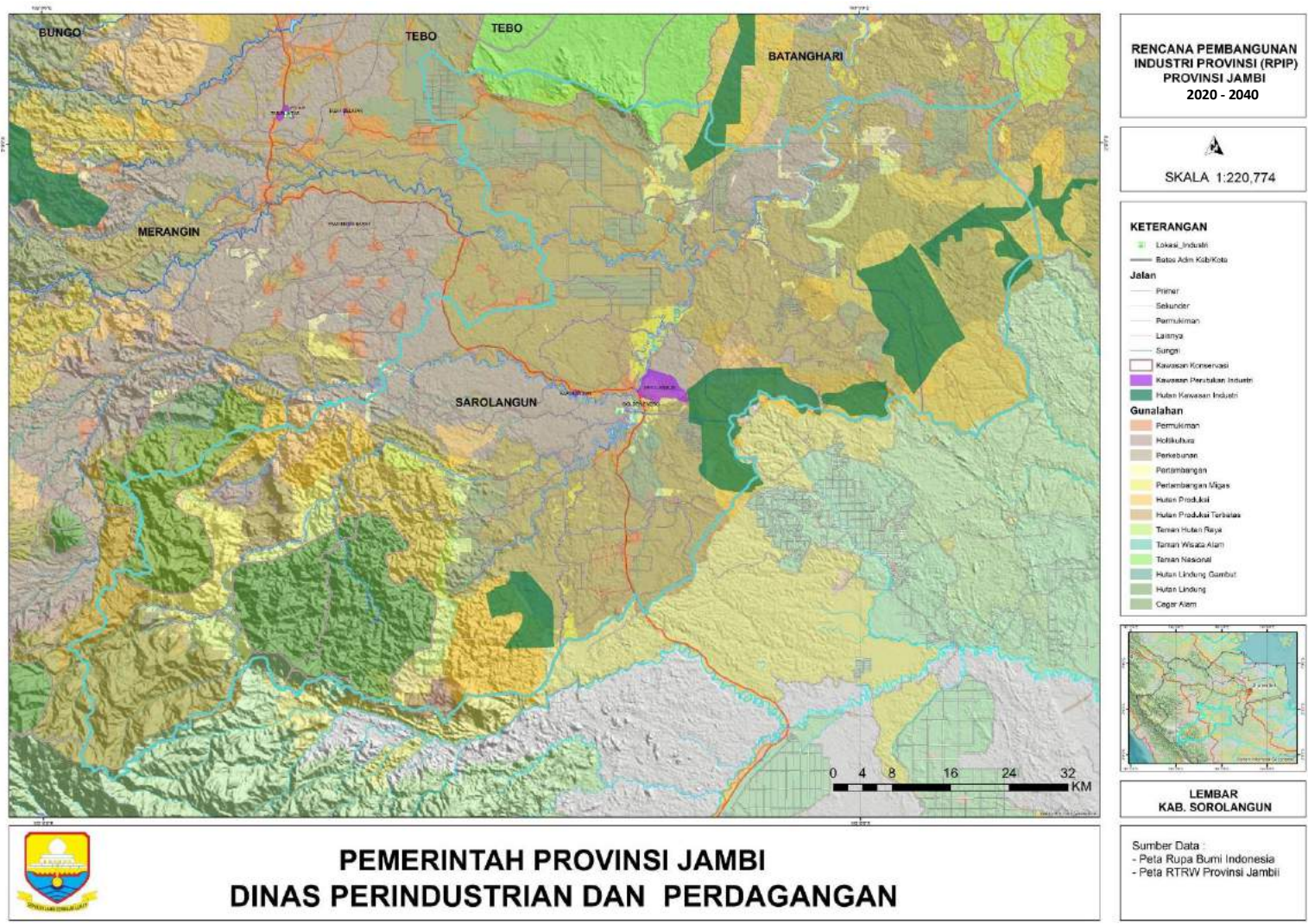
Gambar 4.6 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur



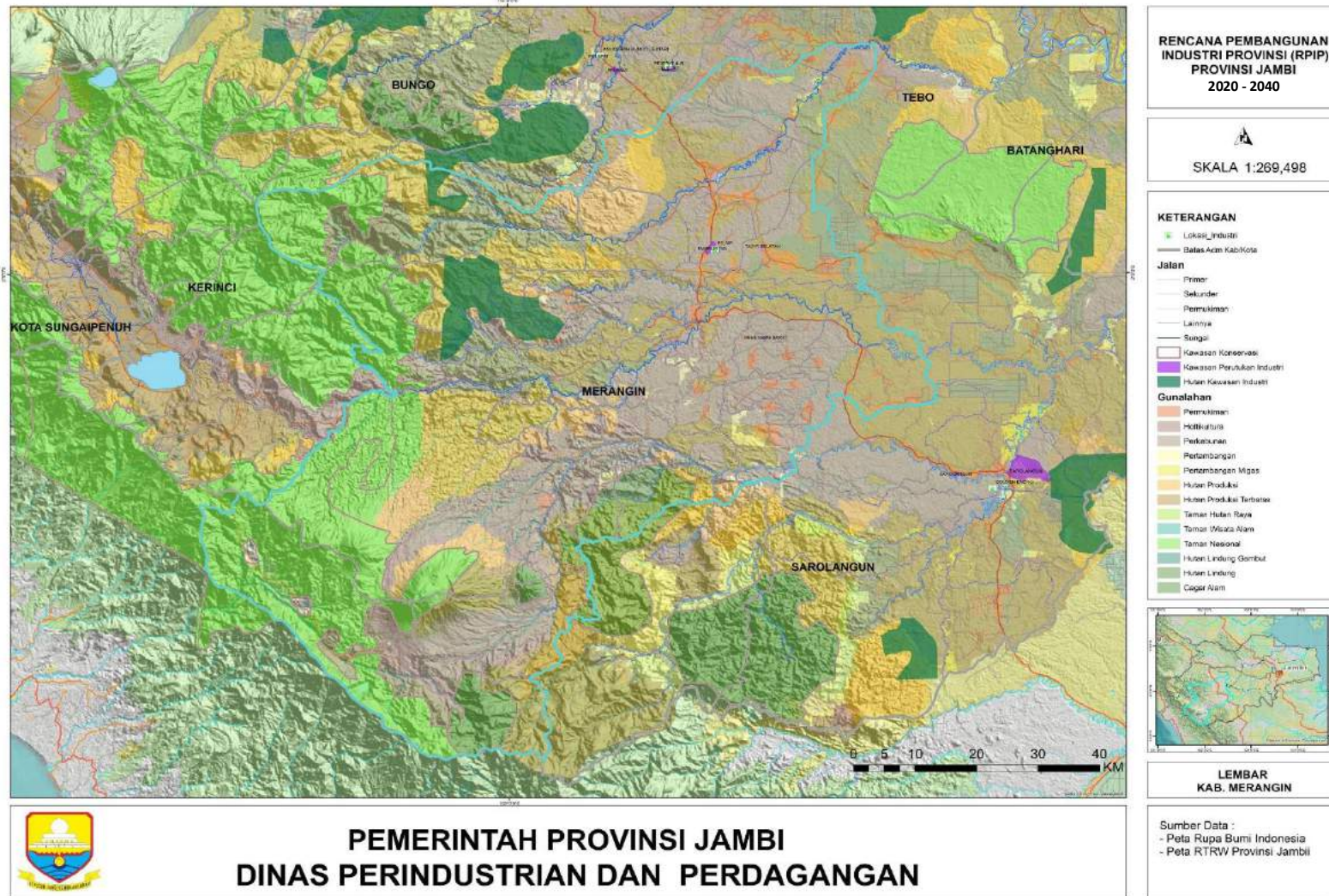
Gambar 4.7 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 4.8 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sarolangun

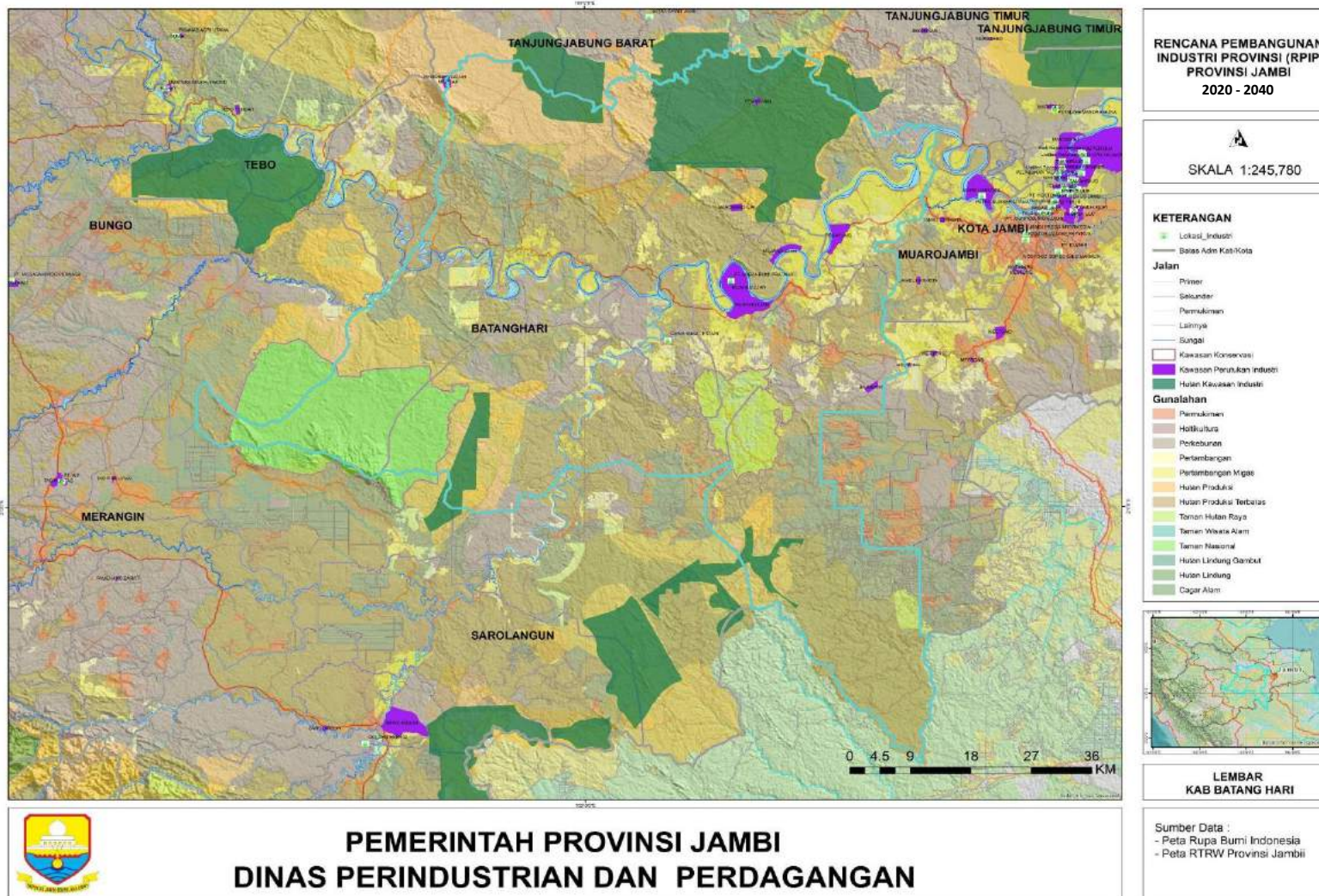


Gambar 4.9 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Merangin

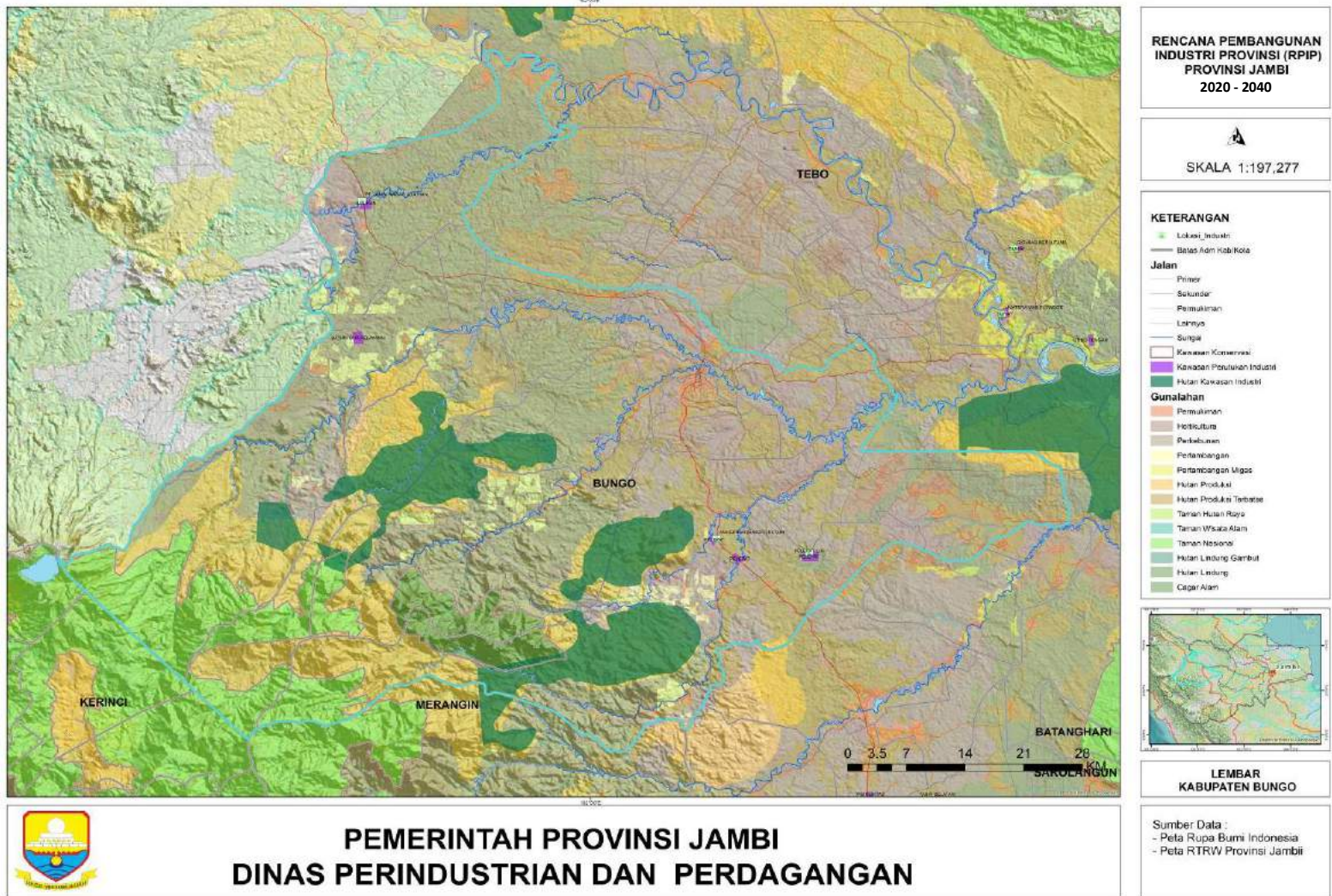




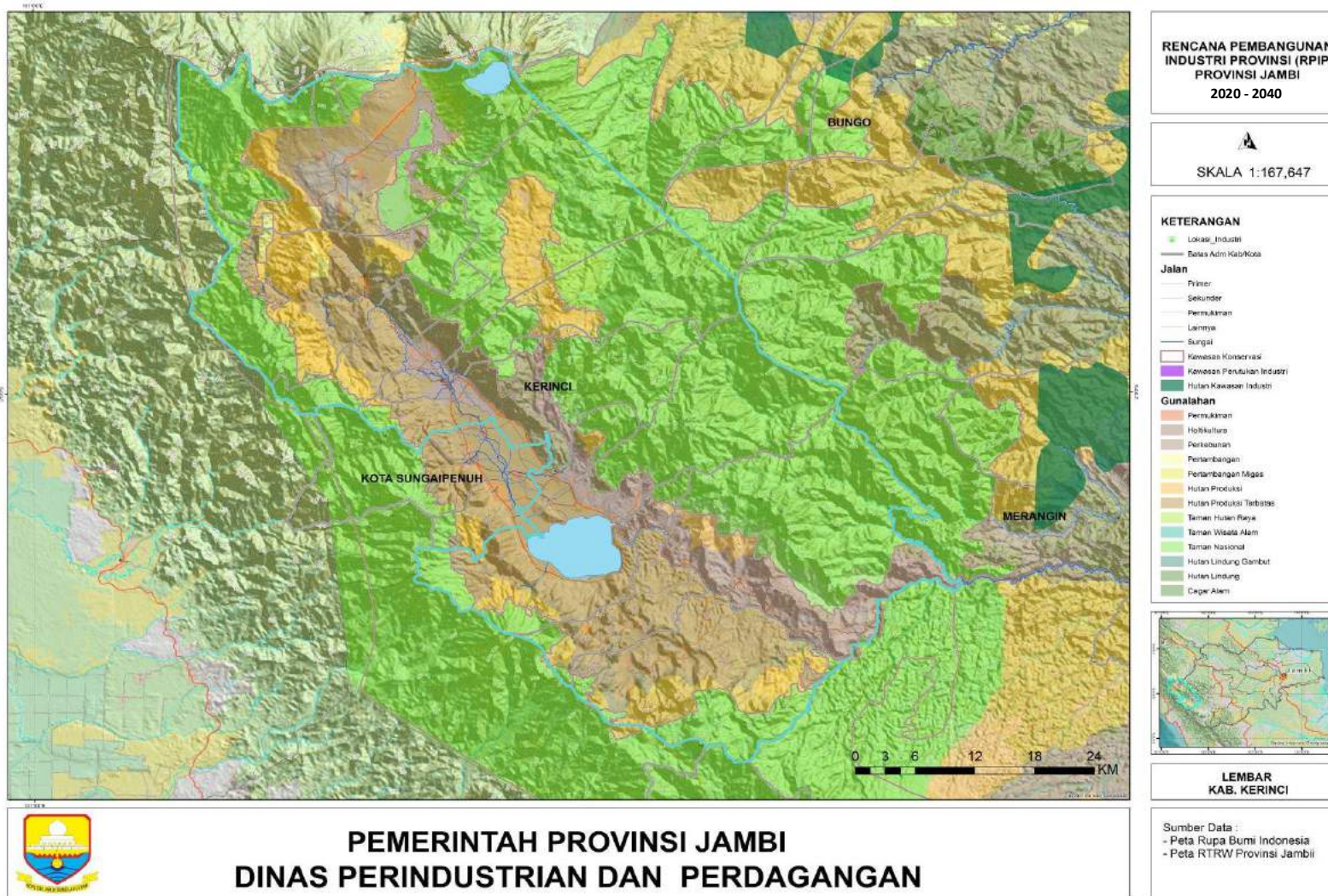
Gambar 4.10 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Batang Hari



Gambar 4.11 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bungo



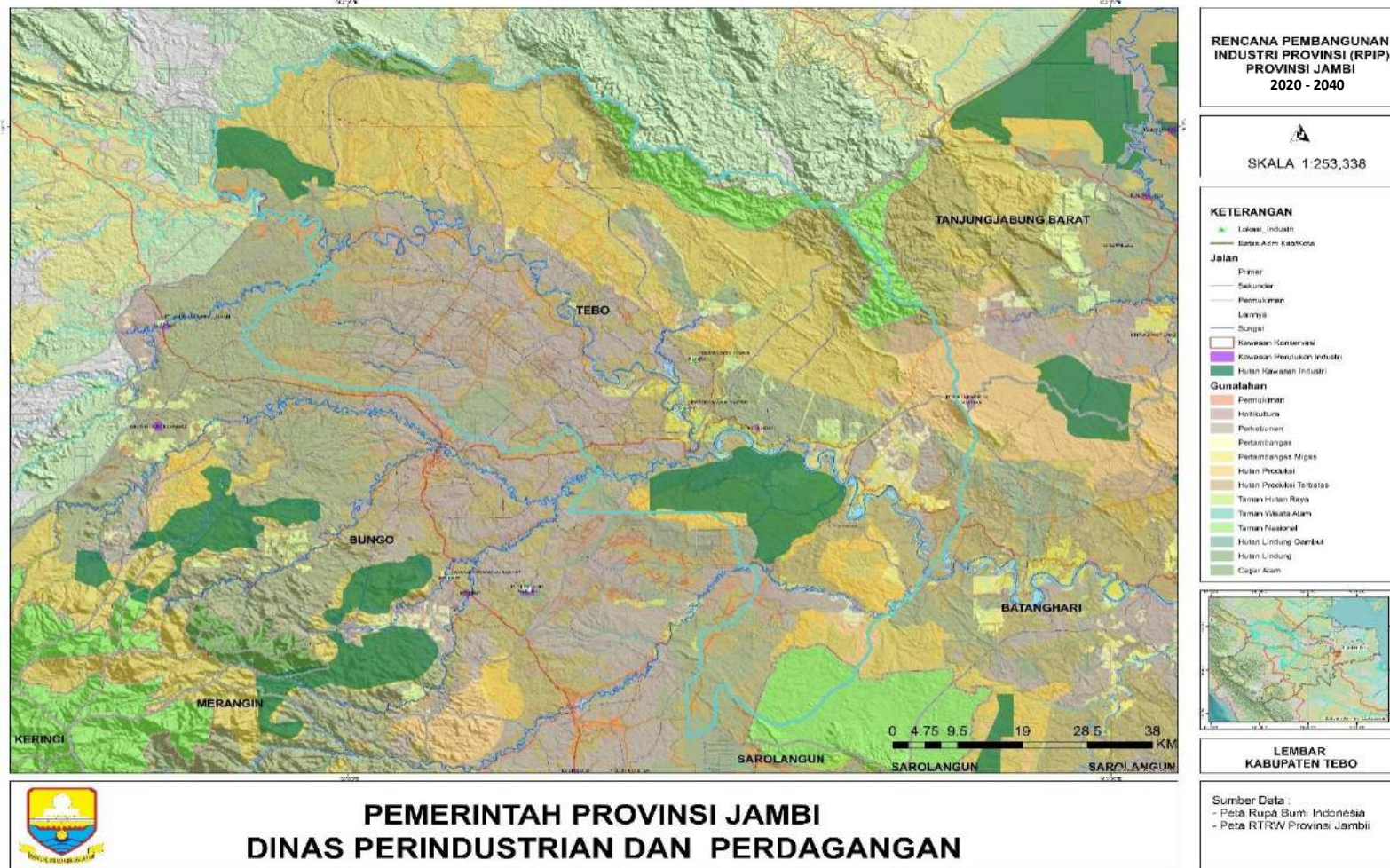
Gambar 4.12 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kerinci



Gambar 4.13 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Sungai Penuh



Gambar 4.14 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tebo



#### 4.2.3.3 Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Disamping kebutuhan lahan untuk Industri Besar dan Menengah, juga direncanakan peruntukan kebutuhan lahan untuk keberlangsungan pembangunan Industri Kecil dan Menengah, sebagai asumsi proyeksi pertumbuhan industri IKM yang ada di Provinsi Jambi sebagai berikut;

**Tabel 4.25 Proyeksi Kebutuhan Lahan untuk Aktivitas IKM**

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Tahun				
		2020	2025	2030	2035	2040
1	Kab Kerinci	80	91	111	136	167
2	Kota Sei Penuh	52	58	72	88	107
3	Kab Bungo	75	85	105	128	157
4	Kab Sarolangun	31	35	43	52	64
5	Kab Tebo	47	53	65	80	98
6	Kab Merangin	96	109	133	164	200
7	Kab Batanghari	50	56	69	85	104
8	Kab Muaro Jambi	23	26	32	39	48
9	Kab Tanjab Barat	17	19	23	28	35
10	Kab Tanjab Timur	28	32	39	48	59
11	Kota Jambi	135	153	188	230	282
Total		634	717	880	1078	1321

**Tabel 4.26 Proyeksi Pertumbuhan IKM di Provinsi Jambi**

No	Kab/Kota	Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040		
		Jumlah Unit (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp)
1	Kab. Kerinci	4.534	9.219	42.013.879.421	5.554	11.984	54.618.043	6.804	15.579	71.003.456.221	8.335	20.253	92.304.493.087
2	Kota Sungai Penuh	2.923	13.560	37.308.195.747	3.581	17.290	48.500.654.471	4.387	22.044	63.050.850.813	5.374	28.106	81.966.106.057
3	Kab. Bungo	4.237	14.200	118.776.776.630	5.235	18.460	154.409.809.620	6.412	23.998	200.732.752.505	7.855	31.197	260.952.578.257
4	Kab. Sarolangun	1.737	6.729	1.100.547.160.630	2.128	8.747	1.430.711.308.820	2.607	11.371	1.859.924.701.465	3.193	14.783	2.417.902.111.905
5	Kab. Tebo	2.654	8.099	523.300.367.274	3.251	10.123	680.290.477.456	3.982	12.654	884.377.620.692	4.878	15.817	1.149.690.906.900
6	Kab. Merangin	5.448	18.726	946.024.327.382	6.674	24.343	1.229.831.625.597	8.176	31.646	1.598.781.113.276	10.016	41.140	2.078.415.447.259
7	Kab. Batanghari	2.817	10.211	38.766.953.695	3.451	13.274	50.397.039.803	4.227	17.256	65.516.151.744	5.178	22.433	85.170.997.267
8	Kab. Muaro Jambi	1.304	15.417	1.070.809.003.779	1.597	20.042	1.392.051.704.913	1.957	26.054	1.809.667.216.387	2.397	33.870	2.352.567.381.303
9	Kab. Tanjab Barat	948	3.553	180.523.751.117	1.161	4.797	234.680.876.452	1.422	6.476	305.085.139.387	1.742	8.742	396.610.681.204
10	Kab. Tanjab Timur	1.610	5.114	16.517.068.941	1.972	6.521	21.472.189.623	2.415	8.314	27.913.846.510	2.959	10.601	36.288.000.463
11	Kota Jambi	7.658	34.418	329.390.456.192	9.381	50.904	428.207.593.050	11.492	67.448	556.669.870.964	14.077	89.368	723.670.832.254
Total		35.870	139.246	4.403.977.940.808	43.985	186.485	5.670.607.897.848	53.881	242.840	7.442.722.719.964	66.004	316.310	9.675.539.535.956

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan perwilayahah industri, yang terkait sentra-sentra IKM, maka pengembangannya dilakukan melalui berbagai program. Berikut ini diantara program-program prioritas pembangunan perwilayahan industri di Jambi yang paling tidak harus dimunculkan terkait dalam rencana pengembangan perwilayahan industri untuk sentra IKM di Provinsi Jambi.

**Tabel 4.27 Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	<b>Pengembangan Sentra IKM</b>				
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√ (100%)	-	-	-
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	-	√ (100%)	-	-
3	Pelatihan dan kerjasama dengan industri besar/induk	√ (25%)	√ (25%)	√ (25%)	√ (25%)

### 4.3 Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri disuatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

#### 4.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumber daya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud. Pembangunan sumber daya manusia berdasarkan proyeksi kebutuhan industri unggulan selama periode 2020–2040, sebagai berikut;

**Tabel 4.28 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040
1	Peningkatan kemampuan SDM industri unggulan Provinsi Jambi	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)
a	Training/ diklat intensifikasi	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)
b	Workshop/ short course standar mutu	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri				
a	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)
b	Pendidikan industri khususnya pangan, Industri Pengolahan Karet, Industri Hulu agro Basis Kelapa Sawit dan Industri Unggulan Provinsi lainnya bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)
3	Pembangunan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	√ (1 buah Sentral Pelatihan Teknis Komoditas Unggulan Provinsi)	√ (100% Komoditas Unggulan mempunyai Sentral Pelatihan Teknis)	-	-

Pada periode 2020-2024 program 1a dan 1b dilaksanakan untuk sedikitnya hingga 10 % dari petani aktif dan potensial, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk wakil dari sedikitnya hingga 90 % unit industri IBS dan 20 % IKM. Melalui program 2b diharapkan ada sedikitnya masing-masing 1 orang ahli Industri Pangan, Industri Pengolahan Karet, Industri Hulu Agro Basis Kelapa Sawit dan Industri Unggulan Lainnya pada setiap institusi kabupaten/kota yang relevant dan sedikitnya 2 orang di tingkat provinsi untuk industri masing-masing komoditas.

#### 4.3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumber daya alam ini sangat



menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Jambi memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Jambi ini, maka potensi sumber daya ini sangat kuat pada sub-sektor Perindustrian dan Perdagangan. Sub-sektor ini dikontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu bahan Sawit dan Karet. Industri yang hingga saat tumbuh di Jambi juga berbasis pada 2 komoditas ini. Maka disamping sumber daya alam lainnya, sumber daya 2 komoditas ini haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

**Tabel 4.29 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2020 - 2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya bahan baku untuk industri prioritas Provinsi Jambi	-	-	-	-
a	Program intensifikasi dan ekstensi perindustrian (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi)	√ (sosialisasi)	√ (implementasi)	√ (implementasi)	√ (implementasi)
b	Fasilitas infrastruktur	√ 30% Pembangunan Infrastruktur Dasar Pendukung Industri (Air,Energi,Transportasi)	√ 80 % Pembangunan Infrastruktur Dasar Pendukung Industri (Air,Energi,Transportasi)	√ 100 % Pembangunan Infrastruktur Dasar Pendukung Industri (Air,Energi,Transportasi)	-
c	Pengendalian kualitas produk	√ 1 Buah Balai Uji Komoditas	√ 1 Buah Balai Uji Komoditas	-	-

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
		untuk Karet	untuk Kelapa Sawit		
2	Peningkatan distribusi (dari sumber-sumber bahan baku industri)	√ Terbangunnya Sistem Informasi terkait Pemasaran dan distribusi Produk Unggulan	√ Dimasukan Data Industri Lainnya pada Sistem Informasi	-	-
3	Peningkatan kualitas produksi sesuai kebutuhan konsumen	√ 1 kali per tahun Pelatihan Teknis Produksi terutama di Sisi Hulu Produksi	√	-	-
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	√	√	√	√
b	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√

Pada periode 2020-2024 program 1a ditargetkan untuk semua industri aktif potensial, sedangkan 1b untuk sedikitnya hingga 30 % dari industri aktif dan potensial. Program 1c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan lembaga nasional pengendali produksi. Untuk program 2, setidaknya seluruh pelaku industri potensial terhubung oleh jalur distribusi. Seperti halnya program 1a dan 1b, maka program 3a ditargetkan untuk semua industri aktif potensial, sedangkan 3b untuk sedikitnya hingga 30 % dari industri aktif dan potensial. Program 3c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha industri dan lembaga riset.

#### 4.3.2.1 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud. Tabel dibawah ini menunjukkan proyeksi pengembangan teknologi mendukung pembangunan industri Provinsi Jambi. Secara umum teknologi yang dikembangkan diarahkan pada pengolahan pada komoditas unggulan yang akan

dikembangkan, baik dari segi peralatan yang modern maupun pengembangan sistem produksi dari industri yang lebih maju.

**Tabel 4.30 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√ Pemberian Bantuan Alat Pada Industri Unggulan 2 Paket/Kab/ Tahun	√ Penerapan pada Industri unggulan berbahan baku Karet & Sawit	-	-
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i> )	√ Pemberian Bantuan Alat Pada Industri Unggulan 2 Paket/Kab/ Tahun	√ Pemberian Bantuan Alat Pada Industri Unggulan 2 Paket/Kab/ Tahun	√ Pemberian Bantuan Alat Pada Industri Unggulan 2 Paket/Kab/ Tahun	√ Pemberian Bantuan Alat Pada Industri Unggulan 2 Paket/Kab/ Tahun
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Universitas, Puslitbang Kementerian terkait, BPPT, COE Asosiasi Industri, dll.)	√ 2 MOU dengan PTN/PTS/ Lembaga Riset Terkait Pengembangan Produk, Teknologi dan Industri	√ 2 MOU dengan PTN/PTS/ Lembaga Riset Terkait Pengembangan Produk, Teknologi dan Industri	√ 2 MOU dengan PTN/PTS/ Lembaga Riset Terkait Pengembangan Produk, Teknologi dan Industri	√ 2 MOU dengan PTN/PTS/ Lembaga Riset Terkait Pengembangan Produk, Teknologi dan Industri

Dengan program 1 diharapkan seluruh industri IBS sudah menerapkan setidaknya SNI secara konsisten. Program 2 khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial. Sedangkan melalui program 3, SKPD terkait harus memfasilitasi terwujudnya kerjasama riset dan pengembangan industri maupun proses produksi yang dibutuhkan daerah.

#### **4.3.2.2 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi**

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

**Tabel 4.31 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi, Periode 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√ Terbangunnya Sistem Informasi terkait Pemasaran dan distribusi Produk Unggulan	√ Dimasukan Data Industri Lainnya pada Sistem Informasi	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market (dengan assosiasi, dll.)	√ (setidaknya 1 paket kerjasama per komoditas basis)	√ (lanjutan)	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Jambi	√ Bantuan Penguatan Local Branding per komoditas basis	√ Bantuan Penguatan Local Branding per komoditas basis	√	√
4	Kerjasama inovasi dan pengembangan dengan lembaga pendidikan dan lembaga riset di Jambi	√	√	√	√

Melalui program 1 diharapkan semua stakeholders/petani/pelaku industri yang relevant termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/ internet secara professional. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama pengembangan, seperti program 2 dan program 4. Dengan kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu tataran produk dan proses produksi yang relative berdaya saing spesifik, maka dalam tataran ini pengembangan 'branded' produk dalam program 3 menjadi langkah strategis untuk memunculkan image positif produk daerah dan daya saing produk.

#### **4.3.2.3 Penyediaan Sumber Pembiayaan**

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

**Tabel 4.32 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 – 2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√	√
2	Bimbingan/ training management financial	√	√	√	√

Pembiayaan/modal terkadang dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga financial atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau management financial-nya. Lemahnya management financial permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program 3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

#### **4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pembangunan Industri Unggulan di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Detailnya sebagai berikut.

##### **4.4.1 Pengelolaan Lingkungan**

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pengendalian bencana banjir abrasi;

2) Pengembangan dan pengelolaan polusi udara;

Kondisi tingkat polusi udara pada umumnya masih perlu mendapat perhatian karena masih ada industri yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar

**Tabel 4.33 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir	√	√	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan polusi udara	√	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	1 kali/tahun	√ 1 kali/tahun	√ 1 kali/tahun	√ 1 kali/tahun

#### 4.4.2 Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya Pembangunan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Jambi harus tuntas dalam periode 2020-2024 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

**Tabel 4.34 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020- 2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√ min. 1 kali/tahun	√ 2 kali/tahun	√	√
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√ lanjutan	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini: bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

#### **4.4.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan**

Kebutuhan listrik di Jambi terus meningkat terutamanya untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi Pembangunan industri. sementara Pembangkit Listrik: Potensi sumberdaya listrik yang dapat dikembangkan di Jambi disamping menggunakan diesel adalah menggunakan batubara, tenaga surya, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, *biodiesel*, *biomassa*, *biogas*.

Dalam hal energi atau listrik, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jambi dengan pendirian beberapa PLTU. Disamping itu juga dikembangkan sumber energi melalui teknologi *solar cell* (panas matahari) dan PLTMH

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pembangunannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan energi listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

#### **4.4.4 Jaringan Telekomunikasi**

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televisi dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas. Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi internet dan telepon seluler. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

#### 4.4.5 Jaringan Sumber Daya Air

Dalam pembangunan sarana air bersih di Jambi memanfaatkan sumber air dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

**Tabel 4.35 Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM] Pembangunan beberapa waduk di Jambi menjadi salah satu solusi dalam pengadaan air	√	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan air baku (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - Pembangunan beberapa Intake, Embung, Situ, waduk, jaringan distribusi di Jambi menjadi salah satu solusi dalam pengadaan air	√	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) - [PLN] Pembangunan beberapa Pembangkit listrik di Jambi baik PLTU maupun PLTA	√	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) - [untuk Telkom, dll.]	√	√	√	√

#### 4.4.6 Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Jambi adalah sebagai berikut.

1) Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: (i) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka); (ii) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; serta (iii) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai.



Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2) Pembangunan TPA Regional;

Dalam upaya mewujudkan Rencana Program Pemerintah Provinsi dalam bidang Sanitasi, Energi dan penurunan gas emisi telah dilakukan suatu kerjasama antara Provinsi Jambi dengan beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kota Jambi (Batanghari, Muaro Jambi) tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional. Diharapkan dengan adanya TPA Sampah Regional ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

**Tabel 4.36 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√ (min 1 IPAL)	√ (min 1 IPAL)	√ (min 1 IPAL)	√ (min 1 IPAL)
2	Pembangunan TPA Regional	√ (min 1 TPA regional)	√ (min 1 TPA regional)	√ (min 1 TPA regional)	√ (min 1 TPA regional)
3	Pembangunan TPS3R dan IPAL Komunal Untuk Masyarakat Sekitar Kawasan Industri / Sentra Industri Unggulan	√ (min 1 TPS3R/ Kawasan Industri)	√ (min 1 TPS3R/ Kawasan Industri)	√ (min 1 TPS3R/ Kawasan Industri)	√ (min 1 TPS3R/ Kawasan Industri)
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)

**4.4.6.1 Jaringan Transportasi**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri provinsi ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Jambi secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, *Airport*, Kereta Api Transportasi Moda Sungai. Pembangunan jalur kereta api masih dalam kajian untuk membangun jalur yang untuk mendistribusikan hasil produksi industri ke outlet yang sifatnya Hub Regional yaitu di Ujung Jabung

**Tabel 4.37 Program Pembangunan Infrastruktur Jaringan Transportasi di Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang melewati Jambi dan Penghubung Logistik antar WPPI dan menuju Outlet Industri Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ujung Jabung)	√ Perencanaan dan Pembangunan	√ Sudah Beroperasi	√ Sudah Beroperasi	√ Sudah Beroperasi
2	Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung (Ujung Jabung Industrial Park) sebagai Pelabuhan Outlet/Inlet Utama Industri Provinsi Jambi	√ Perencanaan dan Pembangunan	√ Sudah Beroperasi	√ Sudah Beroperasi	√ Sudah Beroperasi

#### 4.4.6.2 Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Jambi, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pembangunan industri di Provinsi Jambi.

**Tabel 4.38 Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√		
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√	√

#### 4.4.6.3 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

**Tabel 4.39 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Jambi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri	√ (min 1 unit)	√ (min 1 unit)		
2	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√	√	√

#### 4.4.7 Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

**Tabel 4.40 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2020-2024	2025-2029	2029-2034	2035-2040
1	Pendataan IKM (updating)	√	√	√	√
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√ (min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)
3	Fasilitasi alat tepat guna ( <u>lihat</u> program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	√	√	√	
4	Bimbingan dan pengawasan	√	√	√	√
5	Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√	√

#### **Pengelolaan Limbah IKM**

Bagian akhir dari suatu proses produksi menghasilkan komponen limbah baik cair, padat, gas atau bentuk limbah lainnya. Sampai saat ini, limbah skala industri kecil yang terjadi di sentra-sentra industri kecil, ternyata menjadi persoalan yang serius. Faktor utama yang mendasarinya terbatasnya instalasi pengolahan limbah, sehingga mayoritas limbah yang dihasilkan oleh industri kecil dibuang ke aliran sungai. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan limbah hasil industri kecil dilakukan melalui; 1). **Prinsip Reduce**, atau meminimalisasi limbah, terutama hasil akhir

proses produksi. 2). **Prinsip Reuse**, dilakukan melalui upaya pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi bisa lanjutan atau pemanfaatan kegiatan bidang lainnya. 3). **Prinsip Recycle**, pengelolaan limbah industri kecil dilakukan melalui proses daur ulang limbah yang dihasilkan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, untuk prinsip recycle ini telah dilakukan lembaga Bank Sampah, yang mengolah hasil limbah menjadi bermanfaat.

### **Kebijakan Afirmatif IKM**

Kebijakan Pemberdayaan IKM didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan IKM, banyaknya IKM yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya IKM dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Kebijakan pemberdayaan IKM pada RPIP Provinsi Jambi tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan. Namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu IKM melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam arah kebijakan RPIP Jambi, upaya pemberdayaan IKM diarahkan pada 2 fokus utama yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi.

#### *Strategi - 1.* strategi naik kelas

Pemerintah Daerah mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah:

- a) Memutakhirkan data seluruh IKM di daerah, dengan cara memverifikasi serta menetapkan IKM yang potensial kerjasama dengan usaha besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- b) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya IKM dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi% dan teknologi;
- c) Memfasilitasi IKM dalam pengenalan pasar produk- produk IKM dengan mengikutsertakan IKM dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial dan lain-lain.

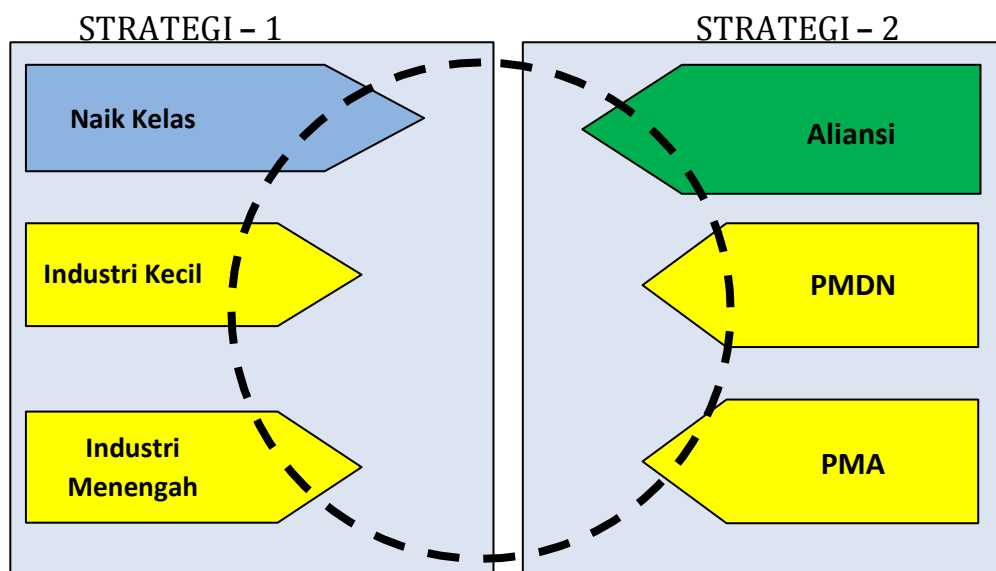
#### *Strategi - 2.* Strategi Aliansi

Pemerintah Daerah menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan (kerjasama) antara dua para pelaku usaha atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara industri kecil dan menengah dengan usaha besar. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan IKM sebaga berikut;

- a) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa dikerjasamakan dengan IKM yang ada.
- b) Pemerintah Daerah dalam hal menginisiasi, mengapresiasi investor yang mampu mengakomodasi IKM dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan.
- c) Pemerintah Daerah merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani IKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain.
- d) Pemerintah Daerah memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas IKM yang bergerak disektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

**Gambar 4.15 Strategi dan Kebijakan Afirmatif IKM**



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Jambi menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategis SKPD Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. RPIP Jambi juga sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. FACHRORI UMAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002